



**Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Barat**



LAPORAN KINERJA 2019





KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dapat terlaksana sesuai waktu telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disusun berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2019.

Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2019 memuat 6 sasaran strategis

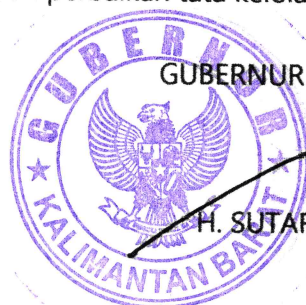
yang ingin di capai, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang merata melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam Sasaran strategis tersebut terdapat program-program yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai RPJMD periode 2018-2023. Laporan kinerja Tahun 2019 yang di sajikan ini berisikan informasi atas kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta upaya perbaikan yang akan di lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT, semoga informasi kinerja yang di sajikan dalam laporan ini dapat memberikan masukan yang berharga dan bermanfaat bagi internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dijadikan sebagai umpan balik dalam melakukan perbaikan manajemen dan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik (*good local governance*). Kami juga berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak lain yang terkait dalam mengukur dan menilai kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan meridhoi setiap langkah kita bersama guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.



GOVERNOR OF KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI

Jalan Sutan Syahrir No.3
Telepon: Kepala 760280, Sekretaris 769431, Sentral 760282, Sekretariat 769430 Fax. 760281
PONTIANAK 78116

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah dilakukan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pontianak, April 2020

Inspektur Provinsi,

Dra. MARLYNA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670115 198603 2 008



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat	1
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Letak Wilayah	5
1.2 Luas Wilayah.....	6
1.3 Topografi	7
1.4 Daerah Aliran Sungai dan Danau	8
1.5 Gunung-Gunung.....	9
1.6 Geologi.....	9
1.7 Kependudukan.....	10
1.8 Sosial Budaya dan Agama	11
2. Susunan Organisasi	11
3. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	13
B. Permasalahan Utama dan Isu-Isu Strategis Daerah.....	15
1. Permasalahan Utama.....	15
2. Isu-Isu Starategis Daerah.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	17
1. Visi Pembangunan Daerah.....	18
2. Misi Pembangunan Daerah	18
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	21
Sasaran Strategis 1	22
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	22
b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 – 2019 dan target RPJMD	25
c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	25



Sasaran Strategis 2	27
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	27
1. Indeks Reformasi Birokrasi	27
2. Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	38
b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 – 2019 dan target RPJMD	44
c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	46
Sasaran Strategis 3	48
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	48
1. Perkembangan IPM Kalimantan Barat Tahun 2010-2019.....	48
2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kalbar tahun 2010-2019	49
b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 - 2019 dan target RPJMD.....	58
c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dan target Nasional	58
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	59
Sasaran Strategis 4	61
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	61
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	61
2. Indeks Gini	67
3. Desa Mandiri	70
4. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	76
5. Angka Kemiskinan.....	82
b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2019 dan Target Akhir Jangka Menengah 2019	92
c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	94
Sasaran Strategis 5	97
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	97
b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2019 dan Target Akhir Jangka Menengah 2023	118
Sasaran Strategis 6	120
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	120
b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2017-2019 dan Target Akhir Jangka Menengah 2019	124
1. Indeks Kualitas Air (IKA)	126
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	128
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	129



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	130
KINERJA LAINNYA.....	132
B. REALISASI ANGGARAN.....	133
BAB IV PENUTUP	135
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.....	2
Gambar 1.2 Rencana Pengembangan Integrasi Antar Sistem Informasi	2
Gambar 1.3 Sistem Aplikasi e-Kinerja Provinsi Kalimantan Barat.....	3
Gambar 1.4 Sistem Aplikasi e-SAKIP Reviu Provinsi Kalimantan Barat.....	5
Gambar 1.5 Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat	6
Gambar 1.6 Peta Kelas Lereng Provinsi Kalimantan Barat.....	7
Gambar 1.7 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat.....	8
Gambar 1.8 Peta Gambut Provinsi Kalimantan Barat.....	9
Gambar 1.9 Peta Jenis Tanah Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	10
Gambar 1.10 Rincian Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	14
Gambar 3.1 (IPM) Kalimantan Barat Tahun 2010-2019.....	48
Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kalbar (tahun) 2010-2019	50
Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kalimantan Barat, Tahun 2010-2019.....	51
Gambar 3.4 Pengeluaran per Kapita per Tahun Kalbar, 2010-2019 (Rp 000)	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019 (Semester I)	11
Tabel 1.2	Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2016-2019	13
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan.....	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	20
Tabel 3.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	21
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 1.....	22
Tabel 3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	23
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2018 dan target RPJMD Sasaran Strategis 1.....	25
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 2.....	27
Tabel 3.6	Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.....	36
Tabel 3.7	Prestasi Yang Telah Diraih Provinsi Kalimantan Barat Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 S.D. 2019	37
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan target RPJMD Sasaran Strategis 2.....	44
Tabel 3.10	Realisasi Predikat dan Nilai Indeks RB dan Nilai SAKIP Pemprov. Kalbar.....	45
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 3.....	48
Tabel 3.12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar Menurut Komponen 2010-2019	49
Tabel 3.13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019.....	53
Tabel 3.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019.....	53
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 & target RPJMD Sasaran Strategis 3.....	58
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 dan target Nasional Sasaran Strategis 3	58
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 4.....	61
Tabel 3.18	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	62
Tabel 3.19	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)	66
Tabel 3.20	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Barat September 2017 - Maret 2019 (persentase).....	69
Tabel 3.21	Desa Mandiri Tahun 2019.....	72
Tabel 3.22	Progres Peningkatan Indeks Desa Membangun Tahun 2018 Dan Tahun 2019.....	75
Tabel 3.23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Agustus 2018-2019	76
Tabel 3.24	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Terbanyak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-2019.....	78
Tabel 3.25	Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2019	79
Tabel 3.26	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018 – 2019.....	80



Tabel 3.27	Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018 - 2019.....	81
Tabel 3.28	Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018 - 2019	81
Tabel 3.29	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2018 - September 2019	83
Tabel 3.30	Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, September 2018 - September 2019	84
Tabel 3.31	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan diurut berdasarkan Kontribusinya (%), September 2019	85
Tabel 3.32	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kalimantan Barat Menurut Daerah, September 2018 - September 2019.....	87
Tabel 3.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	87
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan Target 2019 Sasaran Strategis 4	92
Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 5.....	97
Tabel 3.36	Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat.....	98
Tabel 3.37	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	116
Tabel 3.38	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan Target 2023 Sasaran Strategis 5.....	118
Tabel 3.39	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 6.....	120
Tabel 3.40	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	120
Tabel 3.41	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan Target RPJMD Sasaran Strategis 6.....	124
Tabel 3.42	Perubahan IKLH Kalimantan Barat Tahun 2017 dan 2018.....	124
Tabel 3.43	IKLH Kalimantan Barat dari 2014 – 2018	124
Tabel 3.44	IKA Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018.....	127
Tabel 3.45	Baku Mutu Perhitungan IKU	128
Tabel 3.46	IKU Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018.....	128
Tabel 3.47	IKTL Kalimantan Barat Tahun 2014-2018.....	130
Tabel 3.48	Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	133



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019.....	63
Grafik 3.2	Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019 (<i>c-to-c</i>).....	63
Grafik 3.3	Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019 (<i>q-to-q</i>).....	64
Grafik 3.4	Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2019 (<i>c-to-c</i>).....	65
Grafik 3.5	Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2019 (<i>y-on-y</i>).....	66
Grafik 3.6	Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2019 (<i>y-on-y</i>).....	66
Grafik 3.7	Perkembangan Gini Ratio, 2010-2019.....	67
Grafik 3.8	Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah, September 2017 - September 2019.....	69
Grafik 3.9	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2009-2019.....	82
Grafik 3.10	IKLH Kalimantan Barat 2014-2018.....	125
Grafik 3.11	Grafik IKA Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018.....	127
Grafik 3.12	Grafik IKU Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018.....	129
Grafik 3.13	Grafik IKTL Kalimantan Barat 2014-2018.....	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat

1. Pendahuluan

Penilaian dan Pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan capaian kinerja Instansi Pemerintah disusun secara transparan dan akuntabel yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Tahun Anggaran 2019.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, dan fungsi berdasarkan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Tahun 2019 telah mengintegrasikan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja dengan pengelolaan kinerja guna mempermudah dalam perencanaan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Gambar 1.1 terdapat Aplikasi *e-Planing* yang mengintegrasikan rencana program dan kegiatan tahunan dan target kinerja sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Anggaran yang selanjutnya akan diterima oleh Aplikasi *e-Budgeting* yang akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA dan DPA SKPD) serta terdapat Aplikasi *e-Monev* yang akan memonitor terhadap kinerja

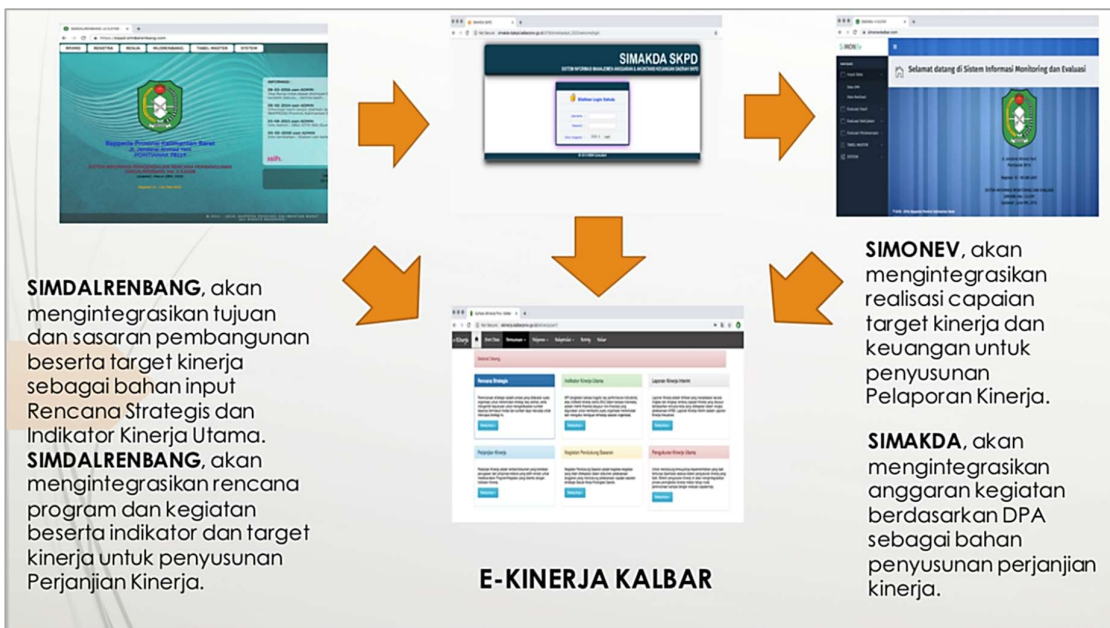
pembangunan dan realisasi anggaran sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Gambar 1.1 Kondisi Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



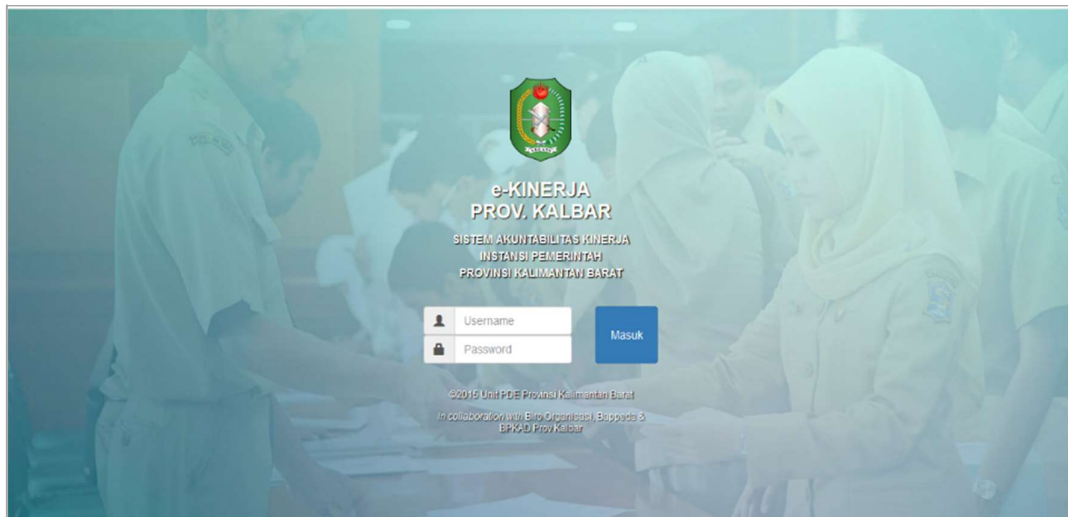
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini juga sedang dalam proses untuk mengembangkan integrasi antar sistem informasi perencanaan, akuntansi, pelaporan keuangan dan kinerja seperti yang terlihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2 Rencana Pengembangan Integrasi Antar Sistem Informasi



Oleh sebab itu, langkah-langkah perbaikan yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar menjadi kunci dalam perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Langkah konkret yang juga telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 yaitu membangun Aplikasi *e-Kinerja* (<http://ekinerja.kalbarprov.go.id>) sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Sistem Aplikasi e-Kinerja Provinsi Kalimantan Barat



Dengan pengembangan aplikasi e-kinerja ini diharapkan Kepala Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya dapat memantau dan memonitor terhadap progress setiap program pembangunan dalam mendukung sasaran strategis yang telah direncanakan dalam RKPD agar sesuai dengan target – target yang telah ditetapkan, sehingga capaian program tersebut dapat terealisasi dan terwujud serta membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat di Wilayah Kalimantan Barat.

Penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas dan selaras serta sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dengan meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan bagi arah pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang dijanjikan untuk



dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagai pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah yang dilakukan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan hasil reviu tersebut berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

Menindaklanjuti arahan Presiden tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka Pemerintah Provinsi Kalbar dalam penyampaian laporan kinerja menggunakan *e-government* Prov Kalbar dengan memanfaatkan sistem aplikasi Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu *e-SAKIP Reviu* sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Sistem Aplikasi e-SAKIP Reviu Provinsi Kalimantan Barat

OPD	RPJMD	Renstra	IKU	Renja/RKT	RKP	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	LHE AKIP
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat		✓		✓					
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat									
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat		✓				✓		✓	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat			✓			✓		✓	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat									
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat									
Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat						✓		✓	

1.1 Letak Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis $2^{\circ}08$ LU serta $3^{\circ}05$ LS serta di antara $108^{\circ}0$ BT dan $114^{\circ}10$ BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, daerah Kalimantan Barat secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing dengan telah terbukanya jalan darat antar Negara dari Pontianak-Entikong-Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang 400 km. Hal ini dapat memberikan peluang bagi perekonomian antara dua negara dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Batas-batas wilayah daerah provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah
- Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur
- Bagian Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata

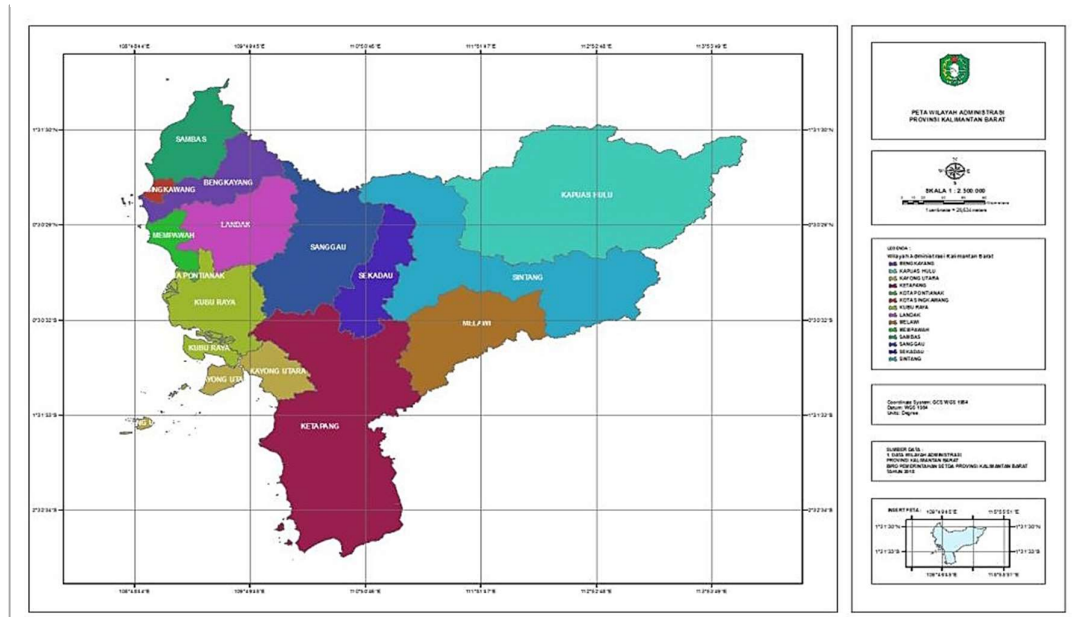
Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten

Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang. Sementara itu, di sebelah utara Kalimantan Barat terdapat kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.

1.2 Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 147.307 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari luasnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036 km²) dan Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km²), sedangkan keempat adalah Provinsi Kalimantan Timur (129,873 km² setelah Provinsi Kalimantan Utara membentuk provinsi baru).

Gambar 1.5 Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat



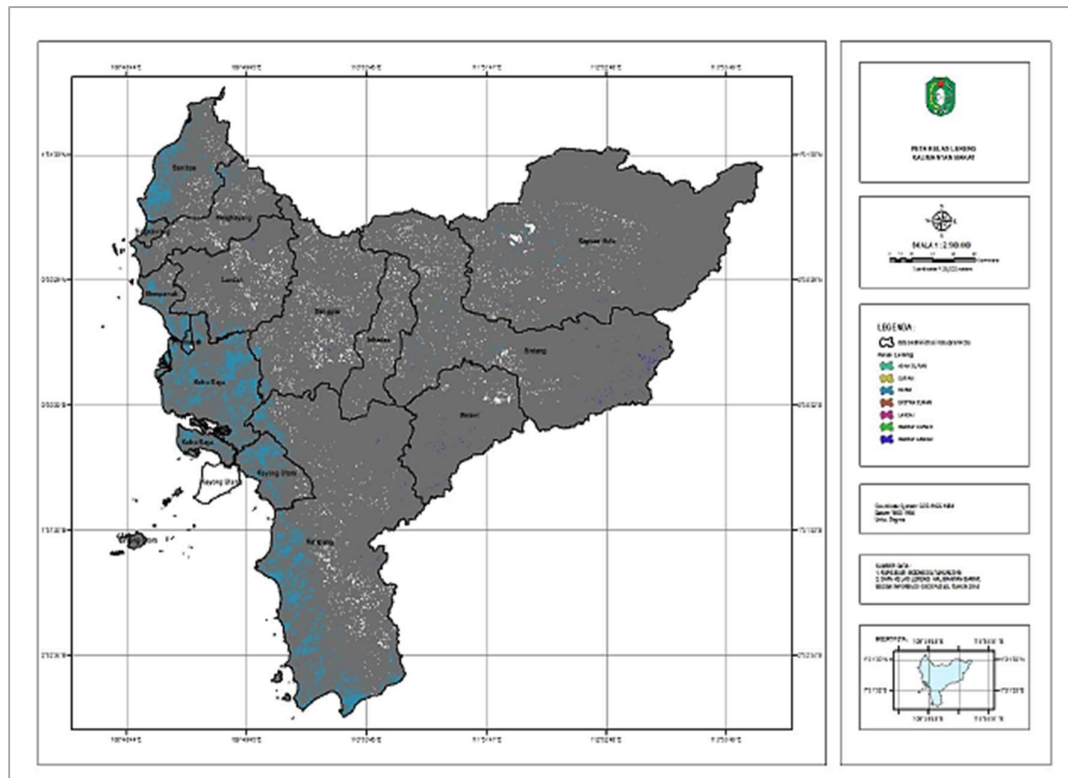
Sedangkan luas wilayah Kalimantan Barat menurut Kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (31.240 km²) kemudian diikuti Kapuas Hulu (29.842 km²) dan Kabupaten Sintang (21.638 km²), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya. Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota. 14 (empat belas) kabupaten/kota ini terbagi menjadi 174 kecamatan, 99 Kelurahan, dan 2031 desa.

1.3 Topografi

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Ambalau Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.

Sekitar 29,21 persen atau 4.287.880 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng <2 persen atau cenderung landai. Sementara itu sekitar 33,34 persen atau 4.894.333 Ha berada pada kelas lereng 2-15 persen atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31 persen atau 3.127.844 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada kelas lereng 15-40 persen atau cenderung curam dan sekitar 16,15 persen atau 2.370.634 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng >40 persen atau cenderung sangat curam.

Gambar 1.6 Peta Kelas Lereng Provinsi Kalimantan Barat



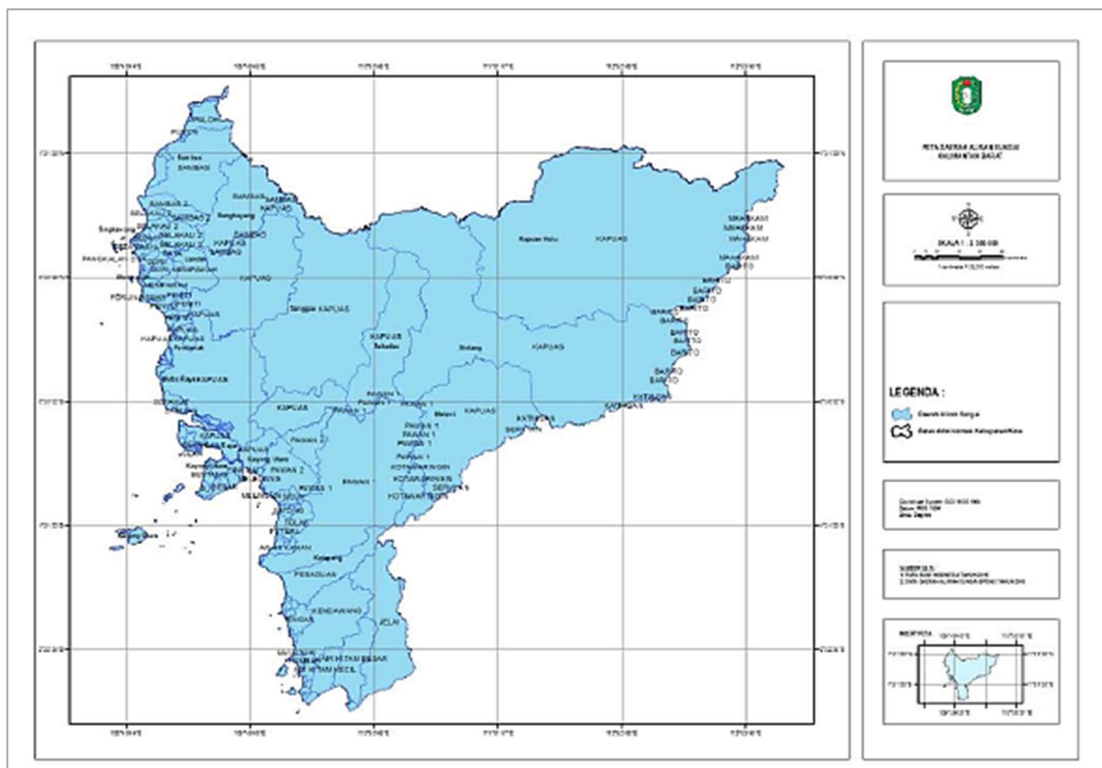
1.4 Daerah Aliran Sungai dan Danau

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang merupakan sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar wilayah kecamatan.

Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama di Kalimantan Barat yaitu Sungai Kapuas, yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya yaitu Sungai Melawi, (dapat dilayari 471 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Kendawangan (128 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Sekadau (117 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Landak (178 km).

Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Danau yang ada hanya dua dan cukup berarti yaitu Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering apabila di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi perikanan yang baik dan sebagai objek pariwisata.

Gambar 1.7 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat



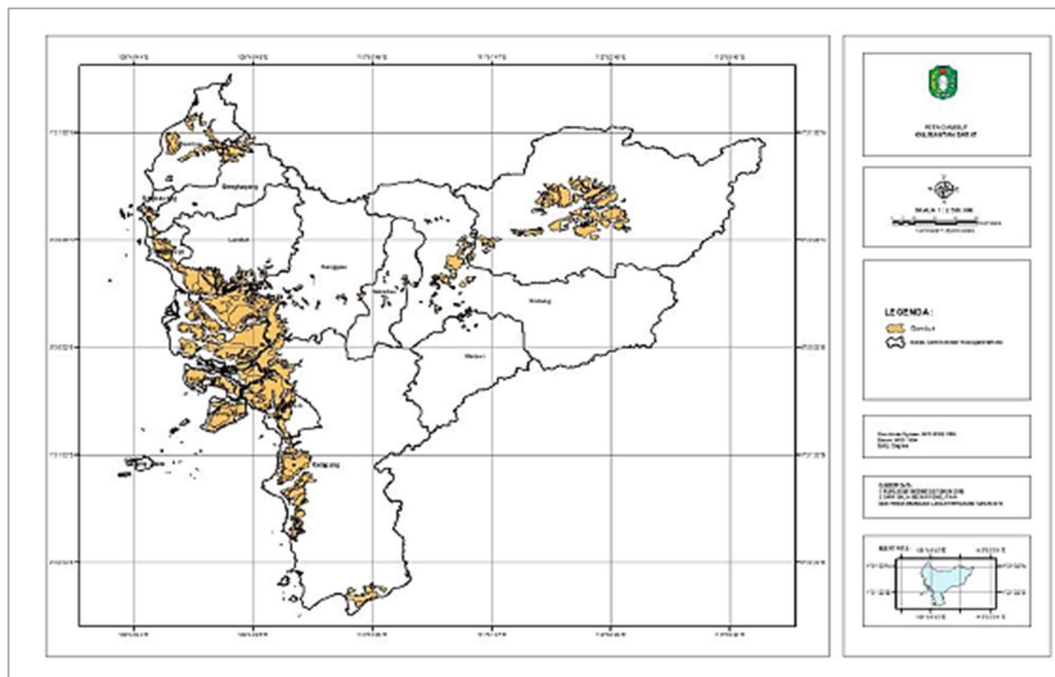
1.5 Gunung-Gunung

Wilayah Kalimantan Barat dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung yang ada relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Serawai Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibandingkan Gunung Semeru (Jatim, 3.676 meter) atau Gunung Kerinci (Jambi, 3.805 meter). Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu hanya menempati urutan tertinggi ketiga dengan ketinggian 1.767 meter. Sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter.

1.6 Geologi

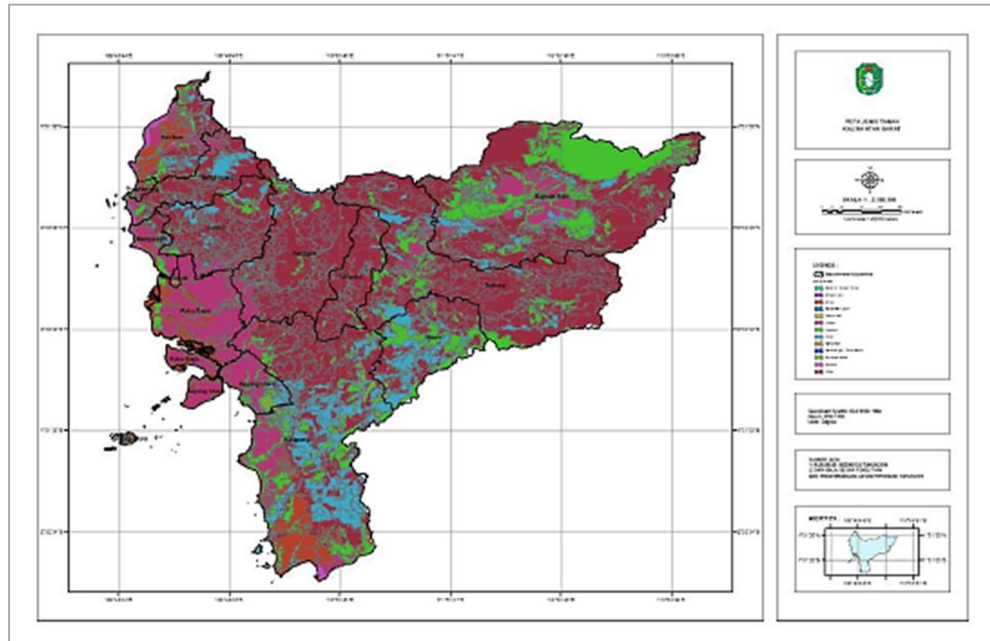
Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat memiliki jenis tekstur tanah Sedang yakni seluas 6.714.126 Ha, sementara 3.439.943 Ha merupakan jenis tekstur tanah halus, 2.762.006 Ha merupakan jenis tekstur tanah Kasar, 1.543.752 Ha merupakan jenis tekstur tanah Gambut dan 220.873 Ha merupakan jenis tekstur tanah rawa, dapat dilihat pada Gambar 1.8 Peta Gambut Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 1.8 Peta Gambut Provinsi Kalimantan Barat



Sementara itu pada Gambar 1.9 dapat dilihat dari kandungan tanah, sebesar 5.806.633 Ha memiliki kandungan tanah Kwartir. Sedangkan 3.102.464 Ha memiliki kandungan tanah Carboniferous jenis Effusive, dan 1.468.680 Ha memiliki kandungan tanah intrusif dan plutonik asam. Beberapa wilayah lainnya memiliki kandungan tanah Naegon, Kapur, Jura, Trias, Permokarbon Trias Atas, dan beberapa jenis Carboniferus lainnya.

Gambar 1.9 Peta Jenis Tanah Wilayah Provinsi Kalimantan Barat



1.7 Kependudukan

Berdasarkan data Agregat Kependudukan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 semester I berjumlah sekitar 5.427.075 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.792.628 jiwa 51,46 % dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.634.447 jiwa atau 48,54 %. Dengan luas wilayah 147.307 Km², maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2019 yaitu sekitar 37 jiwa per kilometer persegi.

Berdasarkan data sebaran penduduk, pada tahun 2019 (Semester I) Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yaitu sebesar 6.188 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yaitu hanya sebesar 8 jiwa per kilometer persegi. Jika dilihat dari jumlah penduduk tiap kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki proporsi jumlah terbanyak yaitu 667.053 jiwa, dan Kabupaten Kayong Utara yang memiliki proporsi jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 126.599 jiwa. Data jumlah dan kepadatan penduduk per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019 tercantum dalam Tabel 1.1.



Tabel 1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019 (Semester I)

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (KM)	Kepadatan Jiwa (Jiwa/KM)
1	Kab. Sambas	326.481	310.134	636.615	6.716,52	95
2	Kab. Mempawah	156.805	148.613	305.418	2.797,88	109
3	Kab. Sanggau	253.097	234.018	487.115	12.857,80	38
4	Kab. Ketapang	296.859	274.815	571.674	31.240,74	18
5	Kab. Sintang	211.979	197.987	409.966	21.638,20	19
6	Kab. Kapuas Hulu	126.009	119.547	245.556	29.842,00	8
7	Kab. Bengkayang	149.309	138.405	287.714	5.075,48	57
8	Kab. Landak	209.659	190.567	400.226	8.915,10	45
9	Kab. Sekadau	110.713	102.754	213.467	5.444,20	39
10	Kab. Melawi	120.187	112.819	233.006	10.640,80	22
11	Kab. Kayong Utara	65.322	61.277	126.599	4.568,26	28
12	Kab. Kubu Raya	311.089	294.698	605.787	6.958,22	87
13	Kota Pontianak	334.172	332.881	667.053	107,8	6,188
14	Kota Singkawang	120.947	115.932	236.879	504	470
Kalimantan Barat		2.792.628	2.634.447	5.427.075	147.307,00	37

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

1.8 Sosial Budaya dan Agama

Secara umum di Wilayah Kalimantan Barat terdapat enam agama dan aliran kepercayaan dan berdasarkan data, mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam dengan jumlah sebesar 3.251.481 jiwa atau 59,91%, penganut agama Katolik sebesar 1.203.137 jiwa atau 22,17%, penganut agama Protestan sebesar 623.839 jiwa atau 11,49%, penganut agama Budha sebesar 330.638 jiwa atau 6,09%, penganut agama Hindu sebesar 2.998 jiwa atau 0,06%, penganut agama Konghuchu sebesar 13.093 jiwa atau 0,24% dan penganut Aliran Kepercayaan sebesar 1.889 jiwa atau 0,03%.

2. Susunan Organisasi

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019. Adapun Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019 sebagai berikut :



a. Sekretariat Daerah

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi 3 (tiga) asisten dan 9 (sembilan) Biro yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membawahi Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan Biro Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang/Jasa;
3. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) membawahi Biro Organisasi, Biro Umum, serta Biro Administrasi Pimpinan.

b. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

c. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

d. Dinas Daerah Provinsi

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
19. Dinas Perkebunan
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Satuan Polisi Pamong Praja

e. Badan Daerah Provinsi

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Badan Penelitian dan Pengembangan
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



9. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
10. Badan Penghubung

f. Perangkat Daerah Dalam Ketentuan Peralihan

1. RSUD Dr. Soedarso
2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi
3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong

3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah ASN per 31 Desember 2019 sebanyak 10.882 orang. Jumlah Sumber Daya Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2016-2019

No	Pemprov/Kabupaten/Kota	Jumlah PNS/CPNS			
		2016	2017	2018	2019
1.	Pemprov Kalimantan Barat	6078	11263	10845	10882
2.	Kota Pontianak	6593	5407	5060	4997
3.	Kota Singkawang	4194	3565	3405	3377
4.	Kab. Bengkayang	4611	4273	4138	4084
5.	Kab. Kubu Raya	6032	5641	5442	5411
6.	Kab. Mempawah	4634	4116	3919	3868
7.	Kab. Sambas	7283	6571	6767	6262
8.	Kab. Landak	5004	4479	4238	4229
9.	Kab. Sanggau	6017	5438	5178	5118
10.	Kab. Sekadau	3277	3012	2899	2869
11.	Kab. Sintang	6387	6038	5828	5812
12.	Kab. Melawi	3783	3597	3497	3633
13.	Kab. Kapuas Hulu	5703	5275	5063	5074
14.	Kab. Ketapang	6965	6721	6465	6428
15.	Kab. Kayong Utara	2459	2229	2177	2266
Jumlah		79.020	77.625	74921	74310




Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

2. Sumber Daya Keuangan

Gambar 1.10 Rincian Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

Lampiran I : Peraturan Daerah Kalimantan Barat
Nomor : 13 Tahun 2019
Tanggal : 9 Oktober 2019

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019					
No	Uraian	Jumlah(Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	5.760.665.710.092,00	5.899.219.616.674,00	138.553.906.582,00	2,41
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.046.976.954.092,00	2.178.980.318.674,00	132.003.364.582,00	6,45
1.1.1	Pajak Daerah	1.756.322.680.300,00	1.842.872.680.300,00	86.550.000.000,00	4,93
1.1.2	Retribusi Daerah	39.184.694.000,00	47.678.024.000,00	8.493.330.000,00	21,68
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.295.077.792,00	92.200.665.383,00	4.905.587.591,00	5,62
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	164.174.502.000,00	196.228.948.991,00	32.054.446.991,00	19,52
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.696.069.297.000,00	3.701.419.839.000,00	5.350.542.000,00	0,14
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	227.170.469.000,00	232.521.011.000,00	5.350.542.000,00	2,36
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.756.069.684.000,00	1.756.069.684.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.712.829.144.000,00	1.712.829.144.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.619.459.000,00	18.819.459.000,00	1.200.000.000,00	6,81
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.348.000.000,00	3.548.000.000,00	1.200.000.000,00	51,11
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.760.665.710.092,00	5.899.219.616.674,00	138.553.906.582,00	2,41
2	BELANJA DAERAH	5.910.665.710.092,00	6.214.125.824.705,77	303.460.114.613,77	5,13
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.207.622.093.065,50	3.382.863.678.827,26	175.241.585.761,76	5,46
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.265.016.273.271,50	1.246.029.306.673,26	(18.986.966.598,24)	(1,50)
2.1.4	BELANJA HIBAH	1.080.408.050.000,00	1.028.209.050.000,00	(52.199.000.000,00)	(4,83)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	14.900.000.000,00	9.900.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(33,56)
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	818.630.876.210,00	1.070.058.428.570,00	251.427.552.360,00	30,71
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ,	23.666.893.584,00	23.666.893.584,00	0,00	0,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.703.043.617.026,50	2.831.262.145.878,51	128.218.528.852,01	4,74
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	206.571.427.454,00	225.016.747.678,00	18.445.320.224,00	8,93
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.511.349.261.081,58	1.565.518.295.376,18	54.169.034.294,60	3,58
2.2.3	BELANJA MODAL	985.122.928.490,92	1.040.727.102.824,33	55.604.174.333,41	5,64
	JUMLAH BELANJA	5.910.665.710.092,00	6.214.125.824.705,77	303.460.114.613,77	5,13
	SURPLUS(DEFISIT)	(150.000.000.000,00)	(314.906.208.031,77)	(164.906.208.031,77)	109,94
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	150.000.000.000,00	364.906.208.031,77	214.906.208.031,77	143,27
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	150.000.000.000,00	364.906.208.031,77	214.906.208.031,77	143,27
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150.000.000.000,00	364.906.208.031,77	214.906.208.031,77	143,27
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	150.000.000.000,00	314.906.208.031,77	164.906.208.031,77	109,94
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Pontianak, 4 Februari 2020
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Lampiran I : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Ringkasan Perubahan APBD TA 2019



B. Permasalahan Utama dan Isu-Isu Strategis Daerah

1. Permasalahan Utama

Permasalahan utama pembangunan di Wilayah Kalimantan Barat, perlu dirumuskan kembali agar lebih terarah, fokus, sinergi dan berkelanjutan. Adapun permasalahan utama yang dapat dirumuskan berdasarkan kriteria: a) Berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD; b) Merupakan tugas dan tanggungjawab Perangkat Daerah Provinsi; c) Dampak yang ditimbulkan terhadap publik; d) Memiliki daya ungkit bagi pembangunan daerah; e) Kemudahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka permasalahan utama pembangunan di Wilayah Kalimantan Barat yang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- 1) Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan berada pada posisi perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga mengakibatkan maraknya praktek illegal dan potensi ancaman terhadap wawasan kebangsaan;
- 2) Belum berkembangnya secara optimal wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil, pesisir dan kepulauan;
- 3) Rentang kendali yang panjang disebabkan konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat belum optimal serta kuantitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai;
- 4) Belum optimalnya pemerataan layanan akses, kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan dan tata kelola kesehatan;
- 5) Rendahnya minat investasi di Kalimantan Barat baik yang bersumber dari modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
- 6) Masih rendahnya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM) termasuk pemberdayaan ekonomi kreatif;
- 7) Masih rendahnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan;
- 8) Masih rendahnya nilai dan volume perdagangan Kalimantan Barat baik keluar negeri maupun dalam negeri;
- 9) Masih belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN;
- 10) Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa dan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan;
- 11) Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- 12) Masih rendahnya derajat kesejahteraan masyarakat serta ketimpangan pendapatan yang cenderung stagnan;
- 13) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.



2. Isu-Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan utama yang telah dikemukakan maka perlu merumuskan isu-isu strategis sebagai upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan di Wilayah Kalimantan Barat. Dalam mengidentifikasi isu strategis, terdapat dua garis besar yang perlu mendapatkan perhatian yaitu aspek lingkungan internal dan aspek lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimantan Barat dan perlu pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat.

Berdasarkan identifikasi lingkungan internal dan eksternal, maka dirumuskan beberapa isu strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- 1) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran;
- 2) Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar termasuk di daerah perbatasan;
- 3) Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang relatif rendah yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- 5) Masih rendahnya kesejahteraan penduduk;
- 6) Terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat;
- 7) Keberagaman penduduk Kalimantan Barat yang rentan akan terjadinya konflik sosial;
- 8) Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 9) Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat masa bhakti 2018-2023 berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 27 Juni 2018 telah dilantik oleh Presiden pada tanggal 5 September 2018 di Istana Negara. Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sesuai ketentuan pasal 263 ayat (3) yang mengatur bahwa RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah disusun selama 5 (lima) tahun dengan berpedoman RPJPD dan RPJMN, telah disusun RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 5 Maret 2019.

Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah "Kalimantan Barat Bersatu dan Maju". Oleh sebab itu, Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen untuk mewujudkan visi RPJPD tersebut. Dengan merumuskan permasalahan utama di wilayah Kalimantan Barat sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2018-2023 menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan RPJMD Nasional Tahun 2014-2019 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai dengan indeks program dan kegiatan bagi setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu 5 tahun. Setiap tahun pelaksanaan RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat penjabaran dari rencana program dan kegiatan indikatif sesuai dengan urusan dan fungsi yang dilengkapi dengan indikator keluaran, alokasi pendanaan serta lokasi pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Masing-masing komponen RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebagai berikut :



1. Visi Pembangunan Daerah

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT
MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambahkan panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambahkan pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin pada seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2. Misi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. *Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur*, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat;
- b. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance*, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka di bagian timur Kalimantan Barat akan



dibentuk Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu, dan dalam jangka panjang juga akan dibentuk Provinsi dibagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura);

- c. *Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif*, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan drajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. *Mewujudkan masyarakat sejahtera*, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintahan terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan;
- e. *Mewujudkan masyarakat yang tertib*, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antara kelompok, etnis, agama dan wilayah;
- f. *Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan*, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan Barat 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan

Misi		Tujuan		Indikator	
1		2		3	
1	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Infrastruktur Daerah serta Perbatasan	1	Indeks Infrastruktur



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

1		2		3	
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip Good Governance	2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2	Indeks Reformasi Birokrasi
				3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
3	Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif	3	Meningkatnya Kualitas SDM	4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	4	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	5	Pertumbuhan Ekonomi
				6	Indeks Gini
				7	Desa Mandiri
				8	Tingkat Pengangguran
				9	Terbuka Angka Kemiskinan
5	Mewujudkan Masyarakat yang Tertib	5	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	10	Konflik Sosial
6	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	6	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran strategis, diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam APBD tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang merupakan komitmen kinerja antara Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang. Perjanjian kinerja Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	59,93
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67,2
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5,2
		Indeks Gini	0,33
		Desa Mandiri (jumlah)	63
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90
		Angka Kemiskinan	6,92
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,2



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005 – 2025.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran target kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	59,93	62,31	103.97
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	100
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67,2	67.65	100.66
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5,2	4,95	96.15
		Indeks Gini	0,33	0.318	96.36
		Desa Mandiri (jumlah)	63	86	136.50
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90	4,45	85.89
		Angka Kemiskinan	6,92	4.45	94.79



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	100
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,2	n/a	n/a

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	59,93	62,31 %	103,97 %
Capaian Kinerja Sasaran 1					103.97

Indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan dalam RPJMD tahun 2018 – 2023 yaitu indeks infrastruktur yang menggambarkan kondisi infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi beberapa variabel sebagai berikut :

1. Jalan Kondisi Mantap
2. Irigasi Kondisi Mantap
3. Rumah Tangga Bersanitasi
4. Rumah Tangga dengan Air Bersih
5. Rasio Elektrifikasi

Target Indeks infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 sebesar 59,93 dan realisasi yang dicapai sebesar 62,31. Dengan demikian, kinerja sasaran strategis peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan dapat dicapai sebesar 103,97 %.



- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Tabel 3. 3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	1. Penyelenggaraan Jalan	437.244.279.450	386.845.943.330	88,47	103,97	26,03
		2. Pengelolaan Sumber Daya Air	147.808.934.670	144.265.439.610	97,6		
		3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	11.306.040.216	10.922.194.150	96,60		
		4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	19.908.708.500	18.782.706.500	94,34		
		5. Pengendalian Ketenagalistrikan	1.782.650.000	226.507.835	12,71		
					77,94		

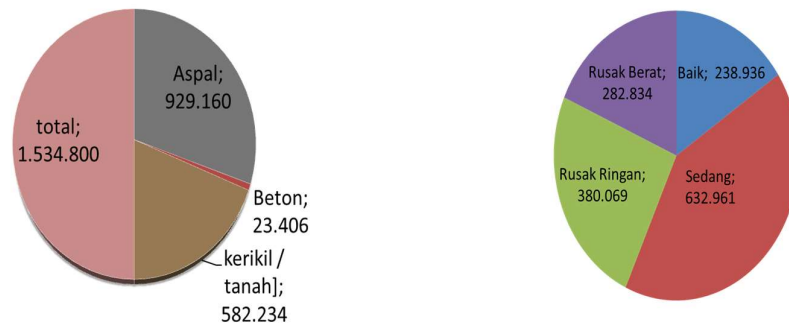
Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 77.94% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 103.97%, maka pada sasaran ini terdapat *Cost Cutting* Program atas efisiensi penggunaan anggaran sebesar 26.03.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

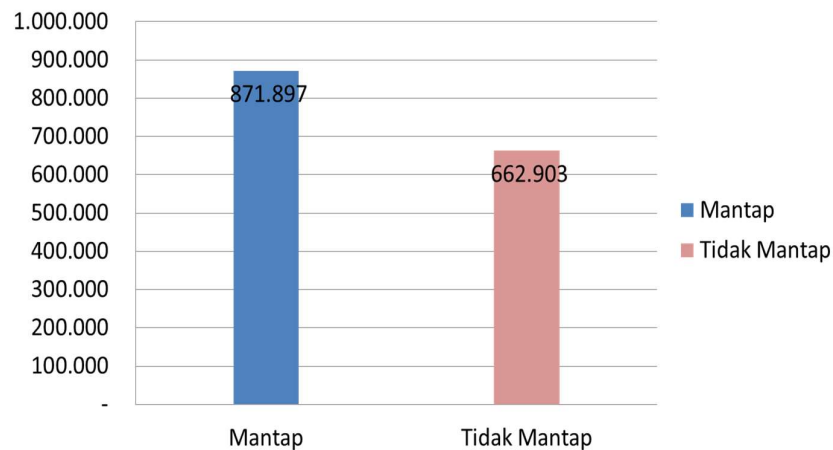
1. Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor bina marga dengan program Penyelenggaraan Jalan, maka terjadi peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang) sebesar 56,81% pada tahun 2019. Agar setiap tahun terjadi peningkatan, maka perlu dilaksanakan Strategi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 yaitu pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana dan sarana antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota terhadap infrastruktur jalan dan jembatan serta Kebijakan Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dengan mengoptimalkan Pemeliharaan jalan dan jembatan. Berdasarkan hasil survey bahwa kondisi jalan tahun 2019 dalam kondisi jalan mantap (Baik dan Sedang) sebesar 56,81 % atau sepanjang 871,89 Km sedangkan pada Tahun 2018 kondisi jalan mantap (Baik dan Sedang) di Wilayah Kalimantan Barat hingga 762.92 Km sehingga terjadi peningkatan infrastruktur daerah pada sektor penyelenggaraan jalan. Kondisi jalan mantap pada tahun 2019 sebagaimana tergambar dalam info grafis dibawah ini :



Jenis permukaan (Km)



Kondisi Pelayanan (Km)



Sumber : Dinas PU dan tata Ruang, 2019

2. Program Pengelolaan Sumberdaya Air melalui kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, normalisasi sungai dan penanganan pantai kritis dan Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di lakukan dengan penyediaan Sarana Penyediaan Air Minum di berbagai tempat baik dipertotaan maupun dipedesaan. Program/Kegiatan Penyediaan Air Minum mengalami peningkatan karena terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan indeks desa membangun. Target irigasi provinsi pada Tahun 2019 sebesar 48.26% dan dapat direalisasikan sebesar 51.31%. Sedangkan rumah tangga yang memiliki akses air minum memiliki target 58,30% dan direalisasikan sebesar 60,75%. Sementara pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir ditargetkan 49,47% dan dapat terealisasi sebesar 50.64%. Sedangkan untuk penanganan pantai kritis ditargetkan sebesar 56.52% dan dapat direalisasikan sebesar 56,47%.



3. Program yang mendukung pencapaian rasio elektrifikasi, program pengendalian ketenagalistrikan dengan kegiatan pendataan infrastruktur ketenagalistrikan eksisting dan rencana PLN/ Non PLN. Rasio elektrifikasi Tahun 2019 berdasarkan sumber data dari PT. PLN Wilayah V Provinsi Kalimantan Barat sebesar 91.17%. Hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang memiliki realisasi 87,21%. Sebagai informasi bahwa berdasarkan data dari PLN Wilayah Kalimantan Barat, pada Tahun 2019 realisasi rasio desa berlistrik sebesar 83.33%. Sedangkan pada Tahun 2018 hanya sebesar 79%, sehingga terdapat peningkatan rasio sebesar 4,33%. Selain itu terdapat juga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat (Komunal) di Kabupaten Landak. Kegiatan biofuel (bahan bakar nabati) dilakukan dengan data penggunaan biofuel dibawah 10.000 ton/ tahun sebanyak 6 (enam) lokasi Kabupaten, yaitu di Kabupaten Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Landak dan Sambas.
4. Daya mampu sistem ketenagalistrikan di Kalimantan Barat Tahun 2019 mencapai 638.2 MW dengan beban puncak 476.42 MW. Hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang mencapai 611.243 MW dengan beban puncak 475.043 MW.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 – 2019 dan target RPJMD

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2018 dan target RPJMD Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	-	56,61%	62,31 %	59,93%	103,97 %

Pada Tahun 2017 indikator Indeks Infrastruktur belum ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sedangkan pada tahun 2018 Indeks Infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis dan dapat terealisasi sebesar 56,61%. Sedangkan pada Tahun 2019 indeks infrastruktur dapat direalisasikan sebesar 62,31%. Sementara target RPJMD Tahun 2019 sebesar 59,93% sehingga terjadi peningkatan atau kemajuan sebesar 103,97%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat masih terkendala dengan proses perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu pola penyebaran pemukiman di desa- desa terpencil masih dalam pola-pola kelompok kecil sehingga di butuhkan perencanaan yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik.



2. Belum terdapat Peraturan Daerah dan rencana umum sektor tenaga listrik di Kalimantan Barat yang disinergikan dengan rancangan umum penyediaan tenaga listrik pada Perusahaan Listrik Negara sehingga program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PLN Wilayah Kalimantan Barat dapat berjalan terpadu dan searah dalam mendukung percepatan penyedia infrastruktur ketenagalistrikan di daerah.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perizinan dan non perizinan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sesuai kewenangan urusan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan penggunaan sumber energi berbasis lokal untuk pembangkit listrik sehingga dapat membantu kebutuhan akan energi listrik di daerah terpencil.
3. Peningkatan program dan kegiatan bagi pembangunan dan pemeliharaan terhadap jalan- jalan yang berada di kondisi mantap, dan jalan dalam kondisi tidak mantap. Pemerintah Provinsi juga terus berupaya melakukan peningkatan terhadap irigasi, sanitasi dan peningkatan masyarakat yang memiliki akses air minum.
4. Perlunya dukungan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Indeks Desa Membangun.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	100
Capaian Kinerja Sasaran 2					100

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam RPJMD pada Tahun 2018-2023 indikator kinerja dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah 68,15 dengan kategori B. Delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB)
Tim Kerja RB telah direvisi kembali dengan Keputusan Gubernur Kalbar No: 947/OR/2019 tentang Pembentukan Tim Kerja RB Provinsi Kalbar yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalbar No. 32/OR/2013. Revisi dilakukan karena menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru dan kebutuhan organisasi.
2. Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan telah disosialisasikan. Telah juga disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 – 2023 dan direncanakan akan disosialisasikan pada Tahun 2020.
3. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - a. PMPRB dilakukan oleh Aesor yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur No. 269/OR/2013 dan telah melaksanakan rapat dalam pelaksanaan PMPRB, dengan bukti :
 1. Surat Gubernur Kalbar No. 800/1331/OR-C tanggal 7 Mei 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. Surat Gubernur Kalbar No. 700/947/IP-I/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 3. Surat Gubernur Kalbar No. 700/994/IP-I/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Percepatan PMPRB.
 - b. Nilai internal PMPRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebesar 87,20. Sedangkan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor B/247/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebesar 67,37 dengan kategori B. selanjutnya untuk nilai internal PMPRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebesar 87,62.

- c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Juni 2019. Dalam aplikasi PMPRB online, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memasuki tahapan keempat atau tahap akhir.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan agen perubahan dengan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor. 948/OR/2019 yang melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai **role model** perubahan bagi pegawai lainnya.
 - b. Gubernur Kalbar secara langsung memimpin Rapat Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan menghadirkan seluruh Kepala Perangkat Daerah, dan meminta Kepala Perangkat Daerah berkomitmen untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerja masing-masing.
 - c. Pemerintah Provinsi Kalbar pada Tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang penambahan fungsi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
 - d. Internalisasi tentang reformasi birokrasi bagi PNS pada setiap pertemuan baik dalam rapat maupun diklat.

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengefisienkan produk hukum yang telah ada dan mengevaluasi produk hukum yang tumpang tindih dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Terkait Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundangan:

1. Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
2. Terdapat Informasi SOP terkait penataan perundang-undangan
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Informasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yaitu di situs www.jdih.kalbarprov.go.id
4. Telah melakukan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan daerah
5. Memiliki E-Legal Drafting untuk mempercepat Proses Penyusunan peraturan.



C. PENATAAN ORGANISASI

Penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan perangkat daerah secara proporsional sesuai visi dan misi kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi yang dibentuk menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam pelaksanaan tugasnya. Guna mendapatkan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran serta berkinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penghapusan 5 (lima) UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penghapusan sebanyak 3 (tiga) UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penghapusan sebanyak 8 (delapan) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah. UPT yang dilakukan penghapusan selama Tahun 2019 terdiri dari :

- A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I
 2. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II
 3. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III
 4. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV
 5. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V
- B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 1. UPT Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah
 2. UPT Taman Hutan Raya
 3. UPT Perbenihan Tanaman Hutan
- C. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 1. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah II
 2. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kubu Raya
 3. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ngabang
 4. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Sambas
 5. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Bengkayang
 6. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sekadau
 7. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Melawi
 8. UPT Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kayong Utara

Dengan demikian sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menghapus sebanyak 34 (tiga puluh empat) UPT, menghapus jabatan struktural eselon II sebanyak 5 (lima) jabatan, jabatan struktural eselon III dan eselon IV sebanyak 136 jabatan yang dihapus. Selain itu, untuk mendukung penyediaan informasi kelembagaan perangkat daerah telah disusun database perangkat daerah skala provinsi melalui web www.organisasi.kalbarprov.go.id. Selain melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dilakukan juga perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan perubahan Pergub Tupoksi yang menambahkan fungsi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Pelayanan Publik di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.



D. PENATAAN TATALAKSANA

Area perubahan pada Penataan Tatalaksana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019, yaitu :

1. Terdapat Peta Proses Bisnis di setiap Perangkat Daerah.
Perangkat Daerah telah menyusun peta proses bisnis pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Peta proses bisnis akan di evaluasi dan disusun kembali dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Selain itu perangkat daerah Provinsi Kalbar juga telah menyusun SOP dengan mempedomani Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu untuk layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Kalbar telah memenuhi 17 standar maksimal yang telah dipersyaratkan. Untuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemprov Kalbar juga telah mendapatkan predikat UKPBJ CoE (Center of Excellence) menuju level 3 dimana dari 9 variabel sudah terpenuhi 8 terverifikasi. Dan berdasarkan penilaian LKPP RI UKPBJ masuk dalam 5 besar secara nasional
2. Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2019 dilakukan melalui pengintegrasian system perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah melalui aplikasi Simdalrenbang dengan sistem penganggaran melalui aplikasi simakda. Menyediakan dan menciptakan Kalbar Satu Data dengan alamat "data.kalbarprov.go.id". Kalbar satu data merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menghimpun data-data yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah maupun instansi vertikal guna dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan berdasarkan data (*data driven policy*). Data tersebut dihimpun pada analytic room sebagai pusat data Kalbar. Melalui data analytic room, Pemprov Kalbar dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak, tak terkecuali setiap Perangkat Daerah dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Kemudian pada Tahun 2020, data analytic room akan dilengkapi dengan dashboard kependudukan, layanan publik, pendapatan daerah, kesehatan, pertanian, pengendalian inflasi daerah, pendidikan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan perindustrian dan perdagangan. Selain itu guna mendukung pelaksanaan *e-government* pada Tahun 2015 telah ditetapkan Grand design IT berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019. Sedangkan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2025 dalam tahap lelang pada tahun anggaran 2020. Pemerintah Provinsi Kalbar pada Tahun 2019 juga mendapatkan penghargaan Top 30 dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N LAPOR dari Kementerian PAN dan RB. Pemerintah Provinsi Kalbar juga aktif melakukan pengelolaan pengaduan melalui aplikasi tersebut. Selama tahun 2019 terdapat sebanyak 57 laporan dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 45 laporan dan sisanya masih diproses untuk diselesaikan. Dalam hal pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN



dan RB, Pemerintah Provinsi Kalbar merupakan terbaik ke-2 se Indonesia setelah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam pengelolaan SIPPN.

3. Keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan merupakan bagian dari keterbukaan informasi, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik serta melakukan monitoring dan evaluasi. Oleh sebab itu sejak Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalbar memperoleh **Peringkat Pertama** untuk Kategori Pemprov informatif yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Tahun 2018 untuk Kategori Pemprov yang mendapatkan kategori Informatif yaitu Kalbar, DKI Jakarta, Jabar dan Jateng. Sedangkan pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh penghargaan **Badan Publik Informatif** oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Pengelolaan Informasi Publik Provinsi Kalbar melalui website www.Kalbar.go.id.

E. PENATAAN SDM

Penataan SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kinerja. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

1. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka
Pelaksanaan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilakukan sebanyak dua kali yaitu :
 - a. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pengumuman Pansel Nomor 03/PANSEL-JPT/2018 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 22 Februari 2018.
 - b. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pengumuman Pansel Nomor 04/PANSEL-JPT/2019 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 12 Februari 2019.
 - c. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pengumuman pansel Nomor: 27/PANSEL-JPT/2019 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 18 April 2019. Promosi jabatan tersebut diikuti oleh peserta yang berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan maupun dari Kabupaten/ Kota se Kalbar. Panitia seleksi terdiri dari akademisi, psikolog dan pejabat widyaswara utama.
2. Perencanaan kebutuhan pegawai disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan analisis beban kerja dan analisis jabatan dari masing-masing perangkat daerah sehingga kebutuhan pegawai yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan formasi. Pada tahun 2019 kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar sebanyak 19.277 orang, namun formasi yang diberikan hanya 349 orang. Seluruh formasi tersebut diperebutkan oleh peserta



penerimaan CPNS sebanyak 6849 orang. Seluruh proses seleksi tersebut berjalan dengan aman dan lancar.

3. Proses penerimaan pegawai (CPNS) pada tahun 2019 dilakukan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengumuman penerimaan di informasikan secara luas kepada masyarakat dan pendaftaran melalui web www.sscn.bkn.go.id. selain itu, persyaratan penerimaan dibuat secara jelas dan tidak diskriminatif.
4. Pengembangan pegawai dengan berbasis kompetensi telah dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019. Saat ini terdapat sebanyak 70 orang jabatan administrator yang telah di assesment. Terdapat 160 orang jabatan dan sebanyak 206 pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah dilakukan assesment. Sedangkan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama semuanya telah dilakukan assesment.
5. Penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai.
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan Kode Etik Pegawai ASN dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pada Tahun 2017 sebanyak 20 keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan. Sedangkan Tahun 2018 terdapat sebanyak 6 hukuman disiplin, dan pada Tahun 2019 hanya terdapat sebanyak 3 keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan.
6. Sistem Informasi Pegawai
Pemerintah Provinsi Kalbar telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui aplikasi www.simpeg.kalbarprov.go.id. Sistem ini selalu dimuktahirkan dan juga digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan dalam pengelolaan manajemen SDM.
7. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Guna mendukung penataan SDM secara periodik dilakukan evaluasi jabatan dengan melihat peta jabatan dan informasi faktor jabatan. Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2019 telah menetapkan kelas jabatan dengan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 75 Tahun 2019 tentang evaluasi jabatan. Penetapan kelas jabatan berdasarkan rekomendasi dari menteri PAN dan RB melalui surat nomor : B/784/M.SM.04.00/2019 tanggal 28 Juni 2019.

F. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Gratifikasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Unit Pengendali Gratifikasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 675/ITPROV/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat UPG di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Unit pengendali gratifikasai pada tahun 2019 telah melaporkan sebanyak dua gratifikasi kepada Komisi



Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat struktural eselon II di lingkungan Provinsi Kalbar juga telah menyampaikan LHKPN kepada KPK.

2. Penerapan SPIP

Level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan penilaian BPKP pusat sudah masuk dalam level 3, yang diserahkan BPKP pada bulan Oktober tahun 2019. Dalam rangka pengendalian untuk meminimalisir resiko telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, setiap perangkat daerah wajib melakukan identifikasi resiko, penilaian resiko, dan rencana pengendalian penanganan resiko. Identifikasi resiko dilakukan sampai pada level kegiatan.

3. Pengaduan Masyarakat

Terhadap pengaduan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 03/ITPROV/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Laporan pengaduan masyarakat dapat diakses pada website www.kalbarprov.go.id/pengaduan. Selama tahun 2019 jumlah pengaduan sebanyak 22 pengaduan dengan rincian 11 kasus ditangani langsung, 4 kasus di teruskan ke inspektorat kabupaten / kota dan 7 kasus tidak ditangani karena hanya bersifat informasi.

4. Whistleblower system

Terhadap *whistleblower system* telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sistem Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan dimaksud dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan penanganan pengaduan.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai implementasi Peraturan Gubernur dimaksud pada Tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi dan identifikasi benturan kepentingan pada siklus anggaran di masing- masing perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengidentifikasi, mengelola dan meminimalisir potensi benturan kepentingan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Pembangunan Zona Integritas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2015 telah melakukan Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas. Selain itu melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 700/1186/IP-II/2019 tanggal 29 Mei 2019 telah diusulkan juga Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu :

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kalbar;



- RSUD dr. Soedarso Prov. Kalbar.

Unit kerja tersebut telah dilakukan penilaian oleh tim penilai nasional dan berdasarkan penilaian, perangkat daerah yang diusulkan tersebut belum mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Pemerintah Provinsi kalbar akan terus melakukan perbaikan- perbaikan dalam membangun zona integritas guna menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

G. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dalam tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Keterlibatan Pimpinan

Gubernur Kalimantan Barat memimpin langsung asistensi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Tahun 2020. Gubernur meminta Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan output dan outcome yang dihasilkan dari setiap kegiatan dan Gubernur langsung memangkas kegiatan yang tidak efisien, serta kegiatan yang tidak mendukung pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2019 dilakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 % yang dianggap kurang efektif. Selain itu dilakukan juga pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kepala perangkat daerah oleh Gubernur secara berkala melalui aplikasi e-monev.

2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang telah terintegrasi dari aspek perencanaan dan aspek keuangan serta aspek pelaporan akuntabilitas kinerja. Aplikasi pada sektor perencanaan yaitu Aplikasi Simdalrenbang (<https://www.simdalrenbang.com/>) merupakan aplikasi yang dapat membantu dalam menyusun RPJMD, Renstra, Renja Perangkat Daerah, RKPd, Usulan Musrenbang kabupaten/ Kota, pokok-pokok pikiran dewan dan realisasi melalui proses rekapitulasi dan simulasi untuk menghasilkan skenario perencanaan anggaran yang optimal. Sedangkan pada aspek keuangan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Simakda (sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah SKPD / <http://simakda-bpkpd.kalbarprov.go.id>). Aplikasi pelaporan kinerja yang digunakan adalah aplikasi e-kinerja. Aplikasi ini pada tahun 2019 dalam proses pembaharuan serta pembaharuan terhadap pengukuran kinerja setiap perangkat daerah berdasarkan triwulanan. alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu ekinerja.kalbarprov.go.id. pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan peraturan Gubernur tersebut dilakukan juga peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja pada masing-masing perangkat daerah. Sebagai informasi bahwa Nilai AKIP Pemprov. Kalbar Tahun 2019 memperoleh 65,85 dengan kategori B yang merupakan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.



H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan penilaian ombudsman RI pada Tahun 2018, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik masuk dalam zona kuning dan perangkat daerah yang masuk zona hijau hanya 1 (satu) dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan PSTP dan terdapat 5 dinas yang masih zona merah. Sedangkan Penilaian Ombudsman RI pada Tahun 2019 terdapat perangkat daerah yang masuk dalam zona hijau sebanyak 6 dinas dan hanya 1 (satu) Perangkat Daerah yang masuk zona merah. Peningkatan ini dapat terjadi karena dilakukan pembinaan dan monitoring secara terus menerus kepada seluruh perangkat daerah. Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar yang mendapatkan Indeks Pelayanan Publik terbaik kategori A (pelayanan prima) sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN dan RB UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah I Pontianak. Selain itu terdapat juga 2 (dua) perangkat daerah yang mengalami peningkatan penilaian IPP dari Kementerian PAN dan RB yaitu Dinas DPMPSTP yang pada Tahun 2018 dengan nilai 3.06 (B-), maka pada Tahun 2019 mendapatkan nilai 3.82 (B) serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 2.68 (C), maka pada Tahun 2019 mendapatkan nilai 3.61.

2. Budaya Pelayanan Prima

Dalam meningkatkan budaya pelayanan prima, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan perbaikan-perbaikan antara lain : penerapan kode etik, estetika pada unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Dr. Soedarso dan UPT Pendapatan Daerah Wilayah I. Selain itu terdapat juga sarana layanan terpadu dan terintegrasi yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dapat dilihat dari hasil penilaian pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 12 inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB untuk mengikuti Kompetisi Pelayanan Publik, sebagai mana tercantum pada tabel dibawah ini :



Tabel 3. 6 INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PESERTA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah
A	SIMPEDULI (Sistem InforMasi PELayanan penilaian DokUmen LInggungan secara <i>online</i>)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
B	SI KEPO	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
C	Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat	Dinas Kehutanan
D	AKSI PRAJA (ApliKaSI Pengadaan baRAng dan JAsa)	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
E	SILAHKAN MAS (reklamaSI LAHAn beKAs peNambangan eMAS tanpa izin)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
F	PESAN-TREND (program PEMantapan Sinergitas ANtara lembaga penyelenggara diklat dan insTansi pengiRim pesErta peNDidikan dan pelatihan)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
G	SAMSAT Drive Thru	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
H	SAMSAT Online	
I	PERI CANTEK (sistem PELayanan peRizinan seCAra elektroNik / PSE & sisTem pElacakan / <i>trackIng system</i> perizinan dan non perizinan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
J	KLAKSON (Kegiatan LAyanan Kepegawaian Secara ONline)	Badan Kepegawaian Daerah
K	DAPAT PULSA (DATang Pasien berobat, PULang SAma-sama)	Rumah Sakit Jiwa
I	PPID Online & SIKEDIP (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online & Sistem KElola Daftar Informasi Publik)	Biro Humas dan Protokol



Tabel 3. 7 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014 s.d. 2019

Tahun	Prestasi	Judul Inovasi	Perangkat Daerah / Pemda
2019	Top 99 (sedang dalam proses seleksi menuju Top 45)	Cegah Si Manis yang Berujung Kronis	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak
2018	Top 99	Posduren (Posyandu Remaja Entikong)	Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
2017	Top 40 & Top 99	"BANG ELIS HADIR, kampung kami jadi terang" (pembANGkit Energi Listrik tenaga mataHARI DI daerah pedalaman kalBAR)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar
	Top 40 & Top 99	BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar)	Dinas Perhubungan Kota Pontianak
2016	- Top 35 & Top 99 - Peserta Kompetisi Pelayanan Publik Internasional (UNPSA) - 4 besar role model nasional UPP RSUD	Pelayanan Anti Diskriminasi	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak
	Top 99	Pemberdayaan Masyarakat Melalui "Pos Gita" dalam Pencegahan Gizi Buruk di Kecamatan Sejangkung	Puskesmas Sejangkung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
	Best Practises / Kluster Inovasi SAMSAT	SAMSAT Keliling (SAMKEL)	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar
2015	Top 99	Penggunaan Simulator Risiko Karies (Gigi Berlubang) Melalui Pendekatan Interpersonal dalam Pelaksanaan Upaya Pengembangan dan Inovasi Program di Poli Gigi Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh	Puskesmas Sungai Pinyuh, Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah



Tahun	Prestasi	Judul Inovasi	Perangkat Daerah / Pemda
2014	Top 99	Layanan Gerai SAMSAT	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar
	Top 99	Pelayanan Administrasi Terpadu Gratis	Kantor Camat Pemangkat Kabupaten Sambas

3. Pengelolaan pengaduan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki Keputusan Gubernur Nomor 311 / ITPROV/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan pengaduan tersebut melalui aplikasi SP4N-LAPOR dan secara aktif dikelola. Unit kerja yang mengelola pengaduan yaitu Inspektorat Provinsi dan telah menindaklanjuti sebanyak 45 pengaduan. Pengelolaan pengaduan Pemprov Kalimantan Barat. Pada Tahun 2019 meraih penghargaan TOP 30 melalui aplikasi SP4N-LAPOR dari Kementerian PAN dan RB.

4. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 mendapatkan nilai 83,47 dengan kategori B. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka dan dilakukan tindak lanjut atas hasil Survey Kepuasan Masyarakat terutama pada unit kerja pelayanan pendapatan daerah, rumah sakit dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP sehingga Nilai Indeks Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kemenpan dan RB Tahun 2019 memperoleh nilai rata-rata 3.98 mendapat kategori B (Baik).

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mempunyai aplikasi pelayanan terpadu untuk melayani semua perizinan yaitu: www.oss.go.id dan untuk melayani khusus perizinan penanaman modal dan fasilitas penanaman modal melalui website www.online-spipise.bkpm.go.id

2. Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat

Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang laporan kinerjanya Tahun 2018 memperoleh nilai 65,85 atau predikat B. Pencapaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan, budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah berorientasi pada hasil.

Predikat Nilai B tersebut memang dirasakan belum cukup memuaskan, sehingga kami memandang perlu melakukan langkah- langkah perbaikan dalam penyelenggaraan SAKIP selama Tahun 2019, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan antara lain :



1. Aspek Perencanaan, Pemerintah Provinsi Kalbar telah membangun manajemen kinerja dengan mengintegrasikan sistem perencanaan (Simdalrenbang) dengan sistem penganggaran (Simakda) dengan Si-Monev sehingga penyusunan rencana pembangunan mulai dari RKPD, Renja SKPD, usulan musrenbang Kab/kota serta pokok-pokok pikiran melalui proses simulasi dan rekapitulasi dalam penyusunan perencanaan yang optimal dan terkoneksi dengan anggaran yang tersedia. Pengintegrasian sistem ini memudahkan dalam melakukan monitoring kinerja pembangunan yang dimonitor dalam aplikasi Si-Monev.
2. Penghapusan program-program yang tidak terkait dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, Gubernur Kalbar memimpin langsung asistensi rencana kerja perangkat daerah tahun 2020 dan terdapat sebanyak 1.385 kegiatan yang dicoret karena tidak mendukung pencapaian misi, sasaran, dan tujuan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2018-2023. Selain itu dilakukan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas dari 300 Milyar menjadi (\pm) 150 Milyar pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Alokasi anggaran yang telah dilakukan efisiensi tersebut digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso, Pembangunan Asrama RSJ Singkawang, Peningkatan Kawasan RSJ Singkawang. Selain itu digunakan juga untuk pembangunan sekolah terpadu tingkat kabupaten ; pembangunan SMA negeri Tebang Kacang, SMK terpadu Sambas, SMA terpadu Mempawah, serta SMA kecil Nanga Sokan. Pada urusan pendidikan lainnya diberikan beasiswa pelajar SMA/SMK/ LB negeri \pm 70,2 Milyar, beasiswa pelajar SMA/SMK/SLB Swasta 6 Milyar bagi masyarakat miskin. Bantuan untuk rumah kumuh dalam bentuk Belanja Tidak langsung sebesar \pm 7,5 Milyar. Selain itu terdapat program berkelanjutan terkait penerima bantuan iuran JKN KIS bagi masyarakat miskin yang tidak tercover JKN KIS sebesar \pm 20,6 Milyar, dengan pembagian 30% oleh Pemerintah Provinsi dan 70% oleh Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Pada urusan pengelolaan aset dilakukan penghapusan kendaraan dinas dari pejabat eselon II, dan efisiensi dan penghapusan rumah dinas menjadi aset Pemprov Kalbar.
3. Sebagai komitmen dalam melakukan perubahan dan membangun manajemen kinerja yang terintegrasi dibidang perencanaan, penganggaran dan kinerja mulai Tahun 2019. Sistem Informasi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar mulai dari aspek perencanaan, keuangan, serta monitoring dan evaluasi. Aplikasi yang di jalankan pada aspek perencanaan dikenal dengan nama SIMDALRENBANG (Sistem Informasi Pengendalian Rencana Pembangunan), aspek penganggaran dinamakan SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah SKPD. Sedangkan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan dinamakan SIMONEV di jalankan oleh unsur perencanaan sebagai upaya monitoring terhadap program-program dalam pencapaian visi dan misi RPJMD.
4. Dalam rangka membangun budaya kinerja dan pemahaman dalam penjabaran kinerja yang berorientasi pada hasil, pada Bulan November Tahun 2019 seluruh Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar ditugaskan untuk mengikuti workshop SAKIP selama 2 (dua) hari di Kementerian PAN dan RB dengan menghadirkan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Asisten Deputi dan tenaga fungsional Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB. Hasil dari workshop tersebut diharapkan kepala perangkat daerah dapat memahami tentang arti pentingnya program dan kegiatan yang berbasis kinerja dalam mencapai visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2018-2023.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	1. Program bina administrasi pembangunan	Rp. 974.829.600	Rp. 942.935.426	96.73		
		2. Program perumusan kebijakan umum perekonomian dan pembangunan daerah	Rp. 3.434.138.124	Rp. 3.290.283.377	95.81		
		3. Program penataan kualitas dokumentasi dan informasi hukum	Rp. 293.220.500	Rp. 281.493.830	96.00		
		4. Program peningkatan kualitas produk hukum	Rp. 646.472.131	Rp. 628.485.124	97.22		
		5. Program peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum dan ham	Rp. 690.910.550	Rp. 636.499.800	92.12		
		6. Program peningkatan kualitas pengawasan, monitoring, evaluasi perda kab/kota se kalbar	Rp. 633.455.808	Rp. 600.947.674	94.87		
		7. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 147.959.000	Rp. 137.059.000	92.63		
		8. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Rp.419.854.700	Rp.401.356.200	95.59		
		9. Program peningkatan manajemen pengelolaan barang milik daerah	Rp. 4.208.122.610	Rp. 3.397.844.443	80.74		
		10. Program penataan kelembagaan pemerintah daerah	Rp. 449.090.300	Rp. 411.850.500	91.71		
		11. Program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Rp. 577.403.200	Rp. 530.311.200	91.84		
		12. Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Rp. 844.730.600	Rp. 738.609.050	87.44		
		13. Program pengembangan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Rp. 385.458.600	Rp. 360.513.750	93.53		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		14. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Rp. 2.416.447.123	Rp. 2.364.929.505	97.87		
		15. Program fasilitasi pendidikan kader aparatur pemerintah daerah	Rp. 389.785.050	Rp. 267.480.812	68.62		
		16. Program meningkatkan kinerja fasilitasi dan pengembangan sdm dan perlindungan hukum	Rp. 1.089.396.991	Rp. 928.490.989	85.23		
		17. Program peningkatan kapasitas sdm aparatur pemerintah daerah	Rp. 1.208.986.950	Rp. 1.185.325.250	98.04		
		18. Program peningkatan kapasitas sdm aparatur pemerintahan kalimantan barat	Rp. 663.263.550	Rp. 642.545.650	96.88		
		19. Program fasilitasi pendidikan kader aparatur pemerintah daerah	Rp. 3.665.179.754	Rp. 2.754.856.050	75.16		
		20. Program pengembangan kompetensi sdm pemerintah daerah	Rp. 18.465.454.537	Rp. 16.179.077.883	87.62		
		21. Program peningkatan kapasitas kelembagaan institusi pengembangan kompetensi	Rp. 2.197.425.000	Rp. 1.757.684.496	79.99		
		22. Program sertifikasi kompetensi asn	Rp. 242.752.800	Rp. 213.135.000	87.80		
		23. Program penataan administrasi kependudukan	Rp. 3.486.230.412	Rp. 3.070.899.570	88.09		
		24. Program keluarga berencana	Rp. 165.212.000	Rp. 150.481.050	91.08		
		25. Program kelitbangan utama	Rp. 1.311.468.050	Rp. 1.174.058.652	89.52		
		26. Program manajemen kelitbangan	Rp. 1.835.773.300	Rp. 1.624.165.511	88.47		
		27. Program penataan administrasi kependudukan	Rp. 3.486.230.412	Rp. 3.072.899.570	88.14		
		28. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp. 535.181.500	Rp. 490.499.175	91,65		
		29. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Rp. 256.301.500	Rp. 200.477.000	78,22		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		30. Program pelestarian karya cetak dan karya rekam skala provinsi	Rp. 207.225.000	Rp. 205.205.000	99,03		
		31. Program pembudayaan kegemaran membaca dan pemberdayaan perpustakaan	Rp. 1.075.188.500	Rp. 1.016.288.540	94,52		
		32. Program pengembangan dan pengolahan bahan pustaka	Rp. 446.854.000	Rp. 432.627.690	96,82		
		33. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 9.322.490.110	Rp. 8.647.465.239	92,75		
		34. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 4.013.383.750	Rp. 3.643.539.103	90,78		
		35. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota (BPKPD)	Rp. 2.047.116.000	Rp. 1.988.800.900	97,15		
		36. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 189.786.400	Rp. 183.848.400	96,87		
		37. Program Fasilitasi dan Pembinaan Bansos dan Hibah	Rp. 684.501.900	Rp. 640.323.600	93,54		
		38. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Rp. 266.839.000	Rp. 251.396.100	94,21		
		39. Program Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Rp.1.640.727.092	Rp. 1.579.052.092	76,34		
		40. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Rp. 1.598.884.453	Rp. 1.507.747.335	94,00		
		41. Program Perencanaan ekonomi	Rp. 1.664.697.474	Rp. 1.468.955.344	83,31		
		42. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan prasarana wilayah	Rp.1.450.987.461	Rp. 1.290.688.267	84,82		
		43. Program pengembangan data dan informasi pembangunan	Rp. 851.548.795	Rp. 821.077.458	95,63		
		44. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 693,741.556	Rp. 621.415.888	86,82		
		45. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Rp.32.200.000	Rp. 30.550.000	94,00		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		46. Program Pengembangan Teknologi Informatika	Rp. 4.467.060.284	Rp. 4.340.625.496	97.17		
		47. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawas dan manajemen pemerintahan	Rp. 804.547.000	Rp. 804.547.000	100		
		48. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Rp. 10.800.713.150	Rp. 10.565.318.090	97.82		
		49. Program percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal pemerintah	Rp. 900.846.800	Rp. 877.668.000	97.43		
		50. Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	Rp. 830.434.900	Rp. 800.197.635	96.36		
					91.15	100	8.84

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91.15% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran strategis ini terdapat Cost Cutting Program atau efisiensi anggaran sebesar 8.84.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah ditunjang berbagai program- program *core business* yang di laksanakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Inspektorat Provinsi dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Program prioritas yang berpengaruh langsung atau berdampak terhadap pencapaian target sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang dapat dilihat pada Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 – 2019 dan target RPJMD

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan target RPJMD Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	0.78
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	B	B	2.72

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 mendapatkan nilai 66.08 dengan kategori B yang rincian nilai nya sebagai berikut :

- Komponen pengungkit
 - Manajemen perubahan : 2.91
 - Penataan perundang- undangan : 2.29
 - Penataan dan penguatan organisasi : 3.18
 - Penataan tatalaksana : 3.21
 - Penataan sistem manajemen SDM : 11.47
 - Penguatan akuntabilitas : 3.40
 - Penguatan pengawasan : 6.28
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik : 3.32
- Komponen hasil
 - Nilai akuntabilitas kinerja : 8.83
 - Survey internal integritas organisasi : 4.97
 - Survey eksternal persepsi korupsi : 5.02
 - Opini BPK : 3.00
 - Survey eksternal pelayanan publik : 8.20

Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 mendapatkan nilai 67.37 dengan kategori B. rincian nilai nya sebagai berikut :

- Komponen pengungkit
 - Manajemen perubahan : 2.80
 - Penataan perundang- undangan : 2.30
 - Penataan dan penguatan organisasi : 3.32
 - Penataan tatalaksana : 3.23
 - Penataan sistem manajemen SDM : 11.53
 - Penguatan akuntabilitas : 3.62
 - Penguatan pengawasan : 6.63
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik : 3.37
- Komponen hasil
 - Nilai akuntabilitas kinerja : 8.87
 - Survey internal integritas organisasi : 4.01
 - Survey eksternal persepsi korupsi : 5.79
 - Opini BPK : 3.00
 - Survey eksternal pelayanan publik : 8.90



Berdasarkan perbandingan tersebut, terjadi kenaikan sebesar 1.29 poin walaupun masih tetap kategori B. Sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 mendapatkan nilai 68,15, dengan kategori B. Rincian nilainya sebagai berikut :

1. Komponen pengungkit
 - Manajemen perubahan : 2.91
 - Penataan perundang- undangan : 2.40
 - Penataan dan penguatan organisasi : 3.47
 - Penataan tatalaksana : 3.40
 - Penataan sistem manajemen SDM : 11.68
 - Penguatan akuntabilitas : 3.73
 - Penguatan pengawasan : 6.71
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik : 3.46
2. Komponen hasil
 - Nilai akuntabilitas kinerja : 8.96
 - Survey internal integritas organisasi : 4.43
 - Survey eksternal persepsi korupsi : 6.17
 - Opini BPK : 2.00
 - Survey eksternal pelayanan publik : 8.83

Sementara itu Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2017 mendapatkan nilai 63,13 kategori B. Rincian nilai komponen SAKIP :

- a. Perencanaan Kinerja : 21.00
- b. Pengukuran Kinerja : 13.54
- c. Pelaporan Kinerja : 10.28
- d. Evaluasi Internal : 6.12
- e. Capaian Kinerja : 12.19

Sedangkan Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 mendapatkan nilai 64,01 dengan kategori B. Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2018 :

- a. Perencanaan Kinerja : 21.04
- b. Pengukuran Kinerja : 13.72
- c. Pelaporan Kinerja : 10.31
- d. Evaluasi Internal : 6.32
- e. Capaian Kinerja : 12.61

Untuk Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2019 mendapatkan nilai 65.85 dengan kategori B. Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2019 :

- a. Perencanaan Kinerja : 21.55
- b. Pengukuran Kinerja : 14.44
- c. Pelaporan Kinerja : 10.52
- d. Evaluasi Internal : 6.32
- e. Capaian Kinerja : 12.72



Berdasarkan perbandingan tersebut diatas, maka terdapat tingkat kemajuan sebesar 2.72 dan sesuai dengan target yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Nilai B. Realisasi predikat dan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP Pemprov Kalbar dapat dilihat dalam tabel 3.10

Tabel 3. 10 Realisasi Predikat dan Nilai Indeks RB dan Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalbar

Indikator Kinerja	2017	Nilai	2018	Nilai	2019	Nilai
Indeks RB	B	66.08	B	67.37	B	68.15
Nilai SAKIP	B	63.13	B	64.01	B	65.85

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran kinerja individu pada beberapa perangkat daerah belum menggambarkan cascade (penjabaran) kinerja dari organisasi. Selain itu masih terdapat perbedaan antara ukuran kinerja individu dengan tolok ukur keberhasilan yang dituangkan dalam dokumen sasaran kerja pegawai.
2. Perbaikan kualitas pelayanan publik belum di dukung dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang perbaikan pelayanan publik.
3. Pengendalian internal terhadap kegiatan- kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Beberapa perangkat Daerah yang diusulkan sebagai unit Zona Integritas belum memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, namun belum sepenuhnya menggambarkan pengelolaan kinerja yang berkualitas dan efektif terutama terkait dengan perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran dalam mewujudkan kinerja instansi.
6. Beberapa Perangkat Daerah masih belum memiliki indikator yang relevan dengan sasaran strategis pada dokumen rencana strategis.
7. Pemantauan atas pencapaian kinerja di level Perangkat Daerah belum dilaksanakan secara optimal, hal ini diakibatkan informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme pemantauan kinerja belum dimanfaatkan secara efektif untuk perbaikan kinerja yang diperlukan.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi organisasi yang menitikberatkan kesesuaian antara kinerja yang diharapkan dengan ukuran kinerja organisasi.
2. Perbaikan pada tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah disusun sehingga



mempunyai legalitas dan dapat di gunakan sebagai rujukan perencanaan, penganggaran dan penyelerasan dokumen perencanaan antara tingkat provinsi dan tingkat Perangkat Daerah. Penyelarasan indikator kinerja individu dengan kinerja organisasi sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* termasuk pembayaran tunjangan kinerja. Dengan pembayaran tunjangan kinerja ini diharapkan dapat menghapuskan penghasilan pegawai lainnya selain gaji yang terkait dengan tugas fungsi.

3. Melaksanakan penyusunan proses bisnis untuk memastikan perbaikan kualitas pelayanan publik terwujud dengan komprehensif. Hal yang menjadi titik berat adalah perbaikan kualitas pelayanan dan peningkatan SDM serta penguatan terhadap pengendalian internal.
4. Meningkatkan pembangunan zona integritas di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga mendapat predikat menuju WBK/ WBBM.
5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja PD, terutama pada penetapan tujuan dan indikator tujuan pada rencana strategis PD.
6. Penyelerasan ukuran kinerja dari level pemerintah provinsi sampai ke individu.
7. Peningkatan kualitas evaluasi program untuk menjamin tercapainya hasil program yang memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis dan mengurangi kegiatan yang tidak relevan dengan hasil program guna semakin meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran.
8. Peningkatan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui integrasi sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta meningkatkan mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu.



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas SDM

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 3

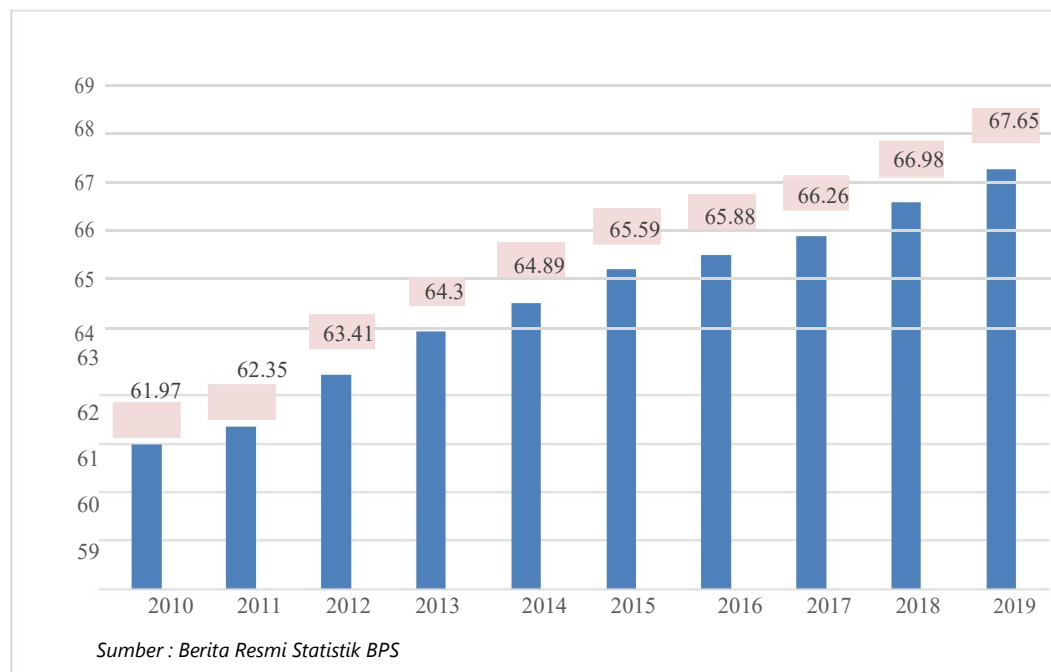
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67,2	67,65	100,66
Capaian Kinerja Sasaran 3					100.66

1. Perkembangan IPM Kalimantan Barat Tahun 2010-2019

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang, dan terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami kemajuan dari Tahun 2010 hingga 2019. IPM Kalimantan Barat pada Tahun 2010 sebesar 61,97 dan pada Tahun 2019 menjadi 67,65. Selama periode tersebut, IPM Kalimantan Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,98 persen per tahun. Pada Tahun 2018-2019, IPM Kalimantan Barat berhasil tumbuh 1 persen. Pertumbuhan IPM Kalimantan Barat dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat Tahun 2010-2019





2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kalimantan Barat tahun 2010-2019

Pencapaian pembangunan manusia di Kalimantan Barat sejak tahun 2010 sampai tahun 2019 didukung oleh peningkatan setiap komponen yang terdiri dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Komponen pembentuk IPM tersebut setiap tahun mengalami peningkatan, sebagai contoh angka harapan hidup tahun 2018 sebesar 70,18 sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,56. Begitu juga rata-rata lama sekolah, apabila tahun 2018 sebesar 7,12 maka pada tahun 2019 menjadi 7,31. Selain itu pengeluaran per kapita pada tahun 2018 sebesar 8,860 maka pada tahun 2019 menjadi 9,055. Peningkatan setiap komponen pembentuk IPM Kalimantan Barat dapat dilihat dalam Tabel 3.12

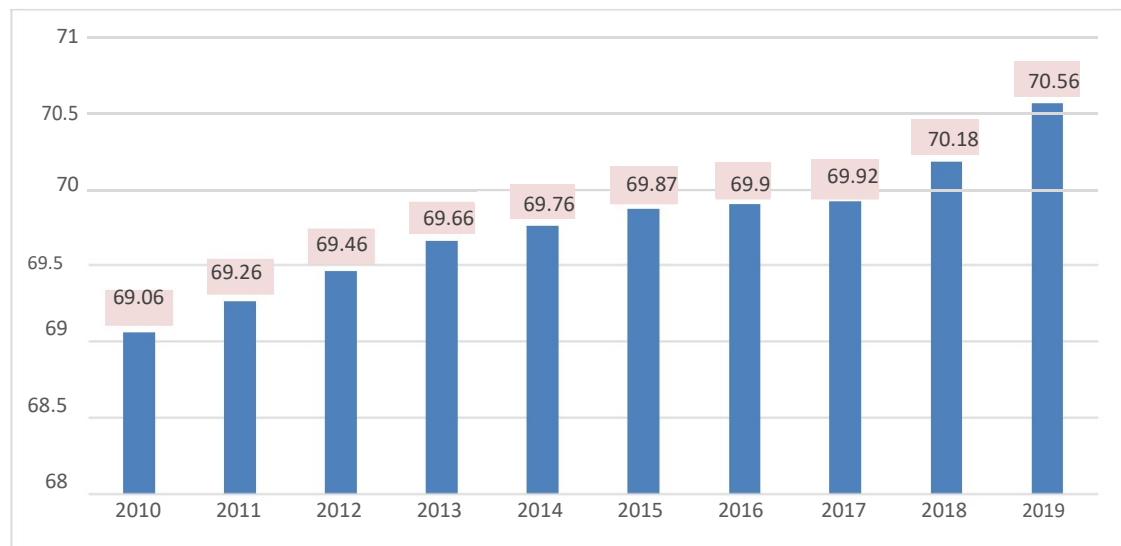
Tabel 3.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat Menurut Komponen 2010-2019

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Tahun	69,06	69,26	69,46	69,66	69,76	69,87	69,9	69,92	70,18	70,56
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	10,79	10,8	11,11	11,6	11,89	12,25	12,37	12,5	12,55	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,27	6,32	6,62	6,69	6,83	6,93	6,98	7,05	7,12	7,31
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Ribu Rp	7.654	7.825	8.002	8.127	8.175	8.279	8.348	8.472	8.860	9.055
IPM		61,97	62,35	63,41	64,3	64,89	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65
Pertumbuhan IPM	%		0,61	1,70	1,40	0,92	1,08	0,44	0,58	1,09	1

A. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Angka Harapan Hidup saat lahir yang menggambarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kalimantan Barat berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup tumbuh rata-rata sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kalimantan Barat hanya sebesar 69,06 tahun, maka pada tahun 2019 telah mencapai 70,56 tahun. Angka Harapan Hidup di Kalimantan Barat tahun 2019 juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2018 yaitu hanya sebesar 70,18 tahun. Peningkatan angka harapan hidup saat lahir di Kalimantan Barat dari tahun 2010 sampai 2019 dapat dilihat dalam Gambar 3.2.

**Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kalimantan Barat
(tahun) 2010-2019**



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

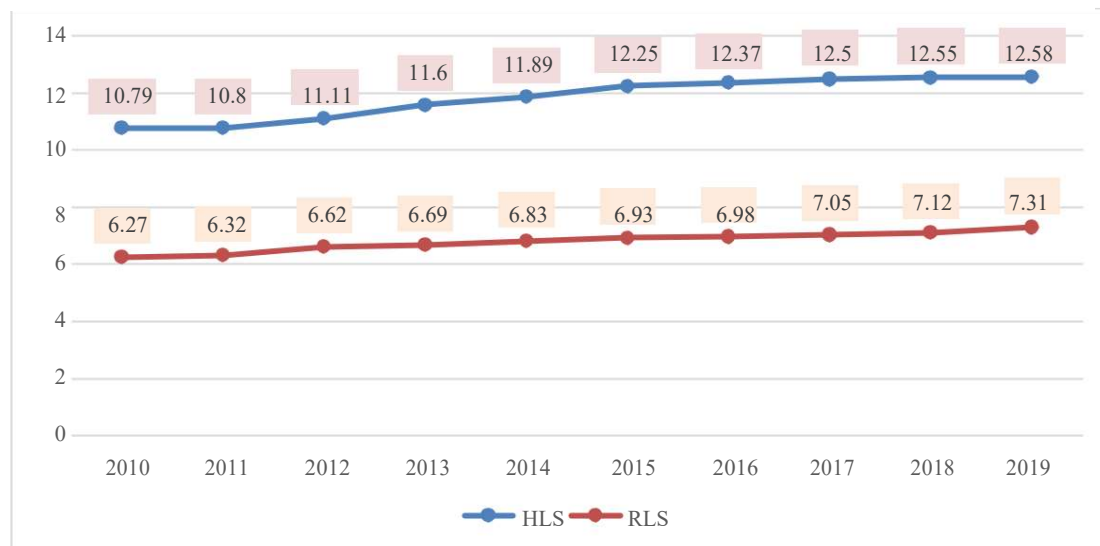
B. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Barat meningkat sebesar 1,79 setiap tahun. Sementara Rata-Rata Lama Sekolah meningkat 1,04 tahun. Sejak tahun 2010 sampai 2019, Harapan Lama Sekolah rata-rata tumbuh sebesar 1,73 persen setiap tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa semakin banyak penduduk di Kalimantan Barat yang dapat bersekolah. Apabila tahun 2018 Harapan Lama Sekolah sebesar 12,55, maka pada tahun 2019 mencapai 12,58 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tumbuh sebesar 1,73 persen setiap tahun sejak Tahun 2010 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kalimantan Barat yang lebih baik. Pada tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,12, maka pada tahun 2019 telah mencapai 7,31. Dengan demikian rata-rata penduduk Kalimantan Barat usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP Kelas I). Peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Gambar 3.3



**Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kalimantan Barat, Tahun 2010-2019**

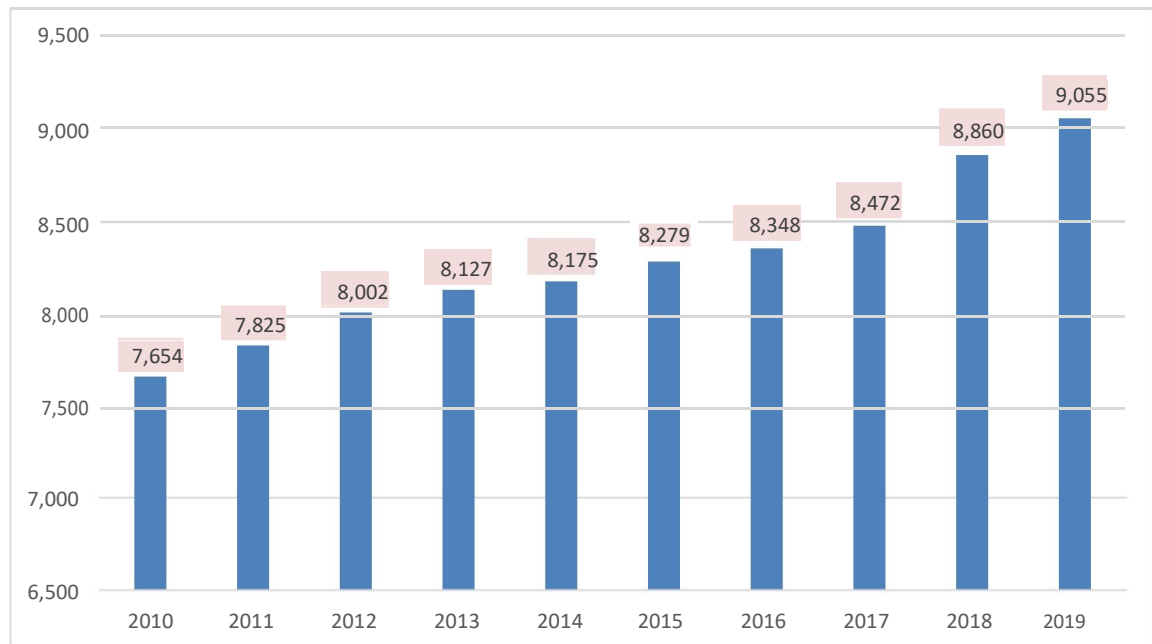


Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

C. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita masyarakat Kalimantan Barat mencapai Rp. 9,055 juta per tahun, sementara pada tahun 2018 baru mencapai Rp. 8,860 juta per tahun. Selisih pengeluaran per kapita tahun 2019 dan tahun 2018 sebesar Rp. 195 ribu. Dengan demikian pada tahun 2019 terjadi peningkatan pembangunan manusia di Kalimantan Barat yang digambarkan dari pengeluaran per kapita. Peningkatan pengeluaran per kapita Kalimantan Barat dari tahun 2010 sampai 2019 dapat dilihat dalam Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Pengeluaran per Kapita per Tahun Kalimantan Barat, 2010-2019 (Rp 000)



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

D. Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Barat juga tercermin pada IPM Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2019. Pada periode ini, terdapat tiga Kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu Kabupaten Kayong Utara sebesar 1,36%, diikuti Kabupaten Ketapang sebesar 1,13%, dan Kabupaten Bengkayang 1,08%. Kemajuan pembangunan manusia di 3 (tiga) kabupaten tersebut didorong oleh dimensi pendidikan. Dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat, maka pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) kota yang IPM berstatus "tinggi" yaitu kota Pontianak dan kota Singkawang, sedangkan 12 (dua belas) kabupaten lainnya berstatus "sedang".

Pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 62,66 (Kayong Utara) hingga 79,35 (Kota Pontianak). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup Saat Lahir berkisar antara 68,11 tahun (Kayong Utara) hingga 73,67 tahun (Bengkayang). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,15 tahun (Melawi) hingga 14,99 tahun (kota Pontianak). Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun keatas berkisar antara 6 tahun (Kayong Utara) hingga 10,14 tahun (kota Pontianak). Sedangkan, pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 7,206 juta rupiah per tahun (Kapuas Hulu) hingga 14,515 juta rupiah per tahun (kota Pontianak). Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Tabel 3.13



Tabel 3. 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019

Kode	Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran per Kapita		IPM	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
6100	KALIMANTAN BARAT	70,18	70,56	12,55	12,58	7,12	7,31	8.860	9.055	66,98	67,65
6101	Sambas	68,50	68,83	12,52	12,60	6,68	6,70	9.774	9.924	66,61	67,02
6102	Bengkayang	73,28	73,67	12,01	12,08	6,27	6,53	9.072	9.182	66,85	67,57
6103	Landak	72,34	72,70	12,37	12,39	7,09	7,10	7.183	7.403	65,45	65,96
6104	Mempawah	70,54	70,90	12,31	12,33	6,63	6,82	7.779	7.913	64,90	65,50
6105	Sanggau	71,05	71,35	11,54	11,56	6,94	6,95	8.126	8.410	65,15	65,67
6106	Ketapang	70,69	71,01	11,77	11,79	7,04	7,26	8.988	9.259	66,41	67,16
6107	Sintang	71,29	71,62	11,98	12,02	6,73	6,89	8.624	8.823	66,07	66,70
6108	Kapuas Hulu	72,12	72,44	12,03	12,04	7,25	7,47	7.074	7.206	65,03	65,65
6109	Sekadau	71,24	71,65	11,56	11,57	6,58	6,60	7.326	7.640	63,69	64,34
6110	Melawi	72,56	72,88	11,13	11,15	6,66	6,67	8.202	8.465	65,05	65,54
6111	Kayong Utara	67,71	68,11	11,79	11,81	5,86	6	7.552	7.905	61,82	62,66
6112	Kubu Raya	70,04	70,43	13,59	13,64	6,81	6,82	8.532	8.773	67,23	67,76
6171	Kota Pontianak	72,41	72,80	14,81	14,99	9,90	10,14	14.322	14.515	78,56	79,35
6172	Kota Singkawang	71,41	71,85	12,87	12,89	7,57	7,72	11.514	11.789	71,08	71,72

Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3. 14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3.	Meningkatnya kualitas SDM	1) Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.486.230.412	3.070.899.570	88,09		
		2) Program Keluarga Berencana	165.212.000	150.481.050	91,08		
		3) Program pengendalian dan kesetaraan gender	706.449.034	652.599.368	92,38		
		4) Program perlindungan dan pemenuhan hak anak	658.332.750	630.853.100	95,83		
		5) Program perlindungan perempuan	510.662.800	434.974.700	85,18		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		6) Program data dan partisipasi masyarakat	330.629.150	272.663.400	82,47		
		7) Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.090.863.100	6.537.790.346	92,20		
		8) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	245.595.185.253	240.303.932.840	97,85		
		9) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.632.775.000	3.392.672.563	93,39		
		10) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	435.245.326.000	305.325.166.088,25	70,15		
		11) Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.967.316.000	1.964.276.000	99,85		
		12) Program Pendidikan Tinggi	859.274.000	834.263.075	97,09		
		13) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.707.621.000	1.630.936.400	95,51		
		14) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	191.173.000	170.343.000	89,10		
		15) Program dan pengembangan olahraga	6.963.371.500	4.196.491.247.00	60,27		
		16) Program kepemudaan dan pramuka	3.332.372.800	3.091.190.519	92,76		
		17) Program Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pemberdayaan Perpustakaan	1.075.188.500	1.016.288.540	94,52		
		18) Program Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka	446.854.000	432.627.690	96,82		
		19) Program Upaya Pelayanan Kesehatan	1.966.246.800	1.091.632.524	55,52		
		20) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	4.102.100.000	4.045.396.900	96,58		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Pelayanan Kesehatan					
		21) Program Sumber Daya Kesehatan	679.564.000	379.359.300	55,82		
		22) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan	1.518.983.445,90	1.102.468.499	72,58		
		23) Program Pembekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	2.286.593.400	2.243.645.502	98,12		
		24) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.950.359.162,50	2.423.232.991	61,34		
		25) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.300.655.200	1.577.476.206	63,51		
		26) Program Upaya Pelayanan Kesehatan	2.133.064.728	1.484.282.126	69,58		
		27) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	200.625.000	174.745.000	87,10		
		28) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	2.647.330.300	2.443.402.535	92,30		
		29) Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	120.006.850.000	113.397.333.172	94,49		
		30) Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	43.225.057.372	40.685.056.178	94,12		
		31) Program Peningkatan dan pendayagunaan SDM kesehatan	772.877.000	691.128.171	89,42		
		32) Program Upaya Pelayanan Kesehatan	14.714.535.628	14.106.220.446	95,87		
		33) Program Pembekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	2.307.750.000	2.249.622.069	97,48		
		34) Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	515.567.000	428.276.016	83,07		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		35) Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	492.261.000	424.495.301	86,23		
		36) Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	10.563.609.000	8.994692.537	85,15		
		37) Program Upaya Pelayanan Kesehatan	4.820.599.400	4.155.684.800	86,21		
		38) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	62.168.500	60.738.540	97,70		
		39) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Masyarakat	1.576.400.000	1.418.414.926	89,98		
		40) Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	344.237.400	293.527.400	85,27		
		41) Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1.199.230.000	1.108.338.056	92,42		
		42) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit	221.800.000	219.057.000	98,76		
		43) Program Sumber Daya Kesehatan	48.504.900	38.649.100	79,68		
		44) Program Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	18.465.454.537	16.179.077.883	87,62		
		45) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan Kompetensi	2.197.425.000	1.757.684.496	79,99		
		46) Program Sertifikasi Kompetensi ASN	242.752.800	213.135.000	87,80		
					86,48	100,66	14,17

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 86.48 % dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100.66%, maka pada sasaran strategis ini terdapat Cost Cutting Program atas penggunaan anggaran sebesar 14.17.



- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Hampir seluruh program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dapat direalisasikan dengan baik. Terdapat sebanyak 46 program yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam mendukung sasaran strategis ini. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lagi antara lain :

1. Penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain, pendataan pengendalian penduduk sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, koordinasi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta pertemuan pemberdayaan peran serta ormas dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
2. Bidang pendidikan, sebagian besar program yang di jalankan untuk mendukung sasaran strategis ini dikategorikan berhasil dengan capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 7.92 dari target 7.78 pada tahun 2019. Capaian lain yaitu angka melek aksara terealisasi 98.3 dari target 98.3 pada Tahun 2019. Sementara angka harapan lama sekolah pada tahun 2019 sebesar 12.89 tahun, angka tersebut memang tidak mencapai target 2019 yaitu 12.9 tahun. Namun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang positif. Pada tahun 2018 angka tersebut hanya sebesar 12.5 tahun, sedangkan pada tahun 2019 menjadi sebesar 12.89 tahun dan mengalami kenaikan.
3. Program upaya kesehatan masyarakat sebagai salah satu program yang ditujukan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu dilakukan melalui program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman, bebas resiko tinggi (Making Pregnancy Safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran yang semuanya bertujuan untuk mengurangi kasus kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.
4. Dalam hal upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso menjadi 6 lantai yang pembangunan Tahap I dimulai pada tahun 2019, melakukan pembangunan gedung instalasi laboratorium, pembangunan gedung instalasi farmasi, pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan alat instalasi central stereril service department.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 - 2019 dan target RPJMD

**Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan target RPJMD
Sasaran Strategis 3**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2019	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	66.26	66.98	67.65	67.2	100.66

Pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apabila pada Tahun 2017 IPM Kalimantan Barat diangka 66.26 maka pada tahun 2018, IPM Kalimantan Barat telah mencapai 66.98, sementara IPM Kalimantan Barat pada tahun 2019 tercapai diangka 67.65. Bayi yang baru lahir pada tahun 2018 memiliki peluang hidup hingga 70.18 tahun dan meningkat 0.26 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.55 tahun (Diploma I), meningkat 0.05 tahun apabila dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7.12 tahun (kelas VII), meningkat 0.07 tahun di bandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan) masyarakat telah mencapai 8.86 juta rupiah pada tahun 2018, meningkat Rp. 388 ribu rupiah di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2019 dapat dicapai sebesar 67.65 sehingga mengalami kenaikan sebesar 0.67 apabila dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 66.98. Realisasi IPM tahun 2019 juga melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 67.2 sehingga mengalami tingkat kemajuan sebesar 100.66.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dan target Nasional

**Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 dan target
Nasional Sasaran Strategis 3**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET NASIONAL
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67.65	71.98

Target IPM Nasional pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 71.98, dan terealisasi sebesar 71.92. Angka tersebut meningkat 0.74 % apabila dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 71.39. Berdasarkan standar badan program pembangunan United Nations Development Programme (UNDP), indeks tersebut menunjukkan IPM indonesia berada di level yang tinggi.

Angka Harapan Hidup bayi baru lahir di indonesia sebesar 71.34 tahun, lebih lama 0.14 tahun. Sementara angka Harapan lama sekolah 12.95 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun keatas mencapai 8.34 Tahun, serta pendapatan per kapita penduduk sebesar 11.29 juta per tahun.



Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebesar 67.65. Angka harapan hidup bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70.56 Tahun. Sedangkan anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 12.58 Tahun dan penduduk usia 25 tahun keatas rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7.31 tahun. Sementara kebutuhan hidup masyarakat Kalimantan Barat dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 9.055 juta rupiah per tahun. Apabila dibandingkan dengan target nasional, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan angka IPM sehingga dapat melampaui target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pendataan pelaksanaan administrasi kependudukan di Kampung Keluarga Berencana masih terkendala dengan jumlah data kolektif. Hal ini disebabkan data yang diminta terkait cakupan data kependudukan di Kampung KB masih sulit untuk di dapat, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif agar data yang diperlukan dapat disampaikan tepat waktu dan valid.
2. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan di seluruh Kabupaten/ Kota dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.
3. Ketersediaan tenaga kesehatan masih sangat terbatas dan harus dipenuhi. Selain itu wilayah Kalimantan Barat yang sangat luas menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sampai daerah terpencil.
4. Perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita dari keluarga miskin sangat penting untuk ditingkatkan karena kondisi kesehatan dan gizi anak-anak secara umum masih rendah.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang intensif terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN dan RB untuk memberikan formasi CPNS tenaga guru guna mengatasi kekurangan guru dan mengadakan program sistem guru kontrak.
3. Perencanaan program tepat sasaran di tingkat Kabupaten/Kota dalam kaitannya peningkatan Pendidikan.
4. Penyusunan data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Perlunya sinkronisasi dan koordinasi program-program antar instansi, antar pemerintah dan swasta serta lembaga swadaya dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
6. Perlunya intervensi cost effective, kerja sama lintas sektor bagi upaya penanggulangan kemiskinan dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.



7. Perlu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, baik dari dana yang bersumber APBD maupun APBN.
8. Sosialisasi dan advokasi program kesehatan bagi masyarakat.
9. Merujuk pada kebijakan umum pembangunan kesehatan nasional, maka upaya penurunan angka kematian bayi dan balita merupakan bagian penting dalam Program Nasional Anak Indonesia Sehat serta meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan anak yang komprehensif dan berkualitas.
10. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso sehingga dapat memenuhi standar Rumah Sakit Kelas Internasional.



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui
Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5,2	5.00	96.15%
		Indeks Gini	0,33	0,318	96,36 %
		Desa Mandiri (Jumlah)	63	86	136,50 %
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90	4,45	85,89 %
		Angka Kemiskinan	6,92	7,28	94,79 %
Capaian Kinerja Sasaran 4					101.93

1. Pertumbuhan Ekonomi

1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y)

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Real Estate yang mengalami kontraksi sebesar 1,16 persen. Jasa lainnya merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 8,79 persen, diikuti Pengadaan Listrik, Gas sebesar 7,97 persen dan Industri Pengolahan sebesar 6,05 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,98 persen); Industri Pengolahan (16,40 persen); Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (14,26 persen); dan Konstruksi (13,22 persen) masih mendominasi PDRB Kalimantan Barat.

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV- 2019 (y-on-y), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,31 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,97 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,86; dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,26 persen. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dan sumber pertumbuhan beberapa lapangan usaha triwulan IV Tahun 2019 dapat di lihat pada Tabel 3.18 dan Grafik 3.1.



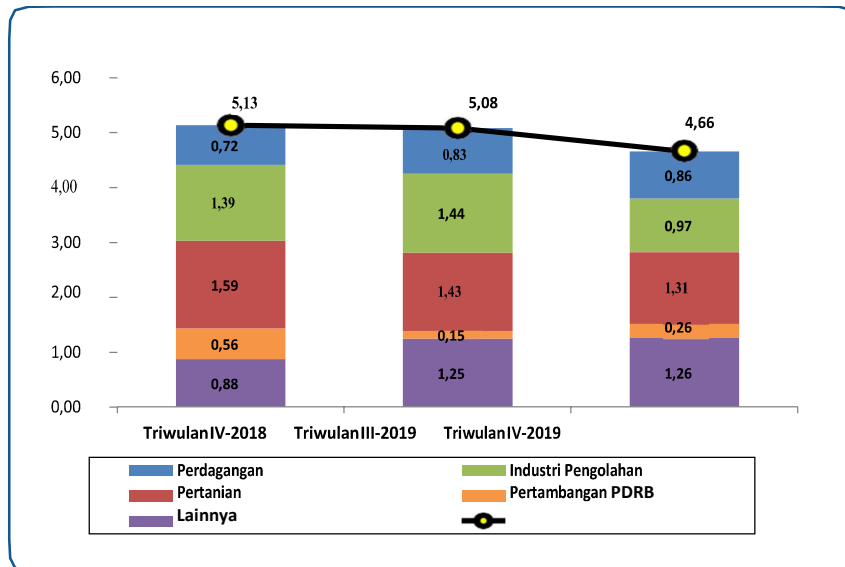
Tabel 3.18 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III- 2019	Triw IV- 2019	Triw III- 2019	Triw IV- 2019	Triw I sd IV-2019	Sumber Pertumbuhan
	Terhadap Triw II- 2019 (q-to-q)	Terhadap Triw III- 2019 (q-to-q)	Terhadap Triw III- 2018 (y-on-y)	Terhadap Triw IV- 2018 (y-on-y)	Terhadap Triw I sd IV-2018 (c-to-c)	Triw IV-2019 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,88	0,16	6,42	5,98	5,85	1,31
B. Pertambangan dan Penggalian	6,70	2,25	2,90	5,21	6,09	0,26
C. Industri Pengolahan	5,42	2,07	9,24	6,05	7,49	0,97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,44	3,41	5,65	7,97	5,70	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,13	0,67	4,89	5,35	4,75	0,01
F. Konstruksi	24,33	3,37	-1,66	2,18	0,73	0,25
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,96	2,26	5,60	5,82	5,54	0,86
H. Transportasi dan Pergudangan	0,10	0,20	3,42	2,17	3,67	0,09
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,32	0,60	7,69	5,90	6,52	0,14
J. Informasi dan Komunikasi	1,09	0,04	2,78	4,01	6,36	0,21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	-0,54	4,81	5,35	-2,73	0,19
L. Real Estat	3,63	-0,62	4,27	-1,16	2,99	-0,03
M,N. Jasa Perusahaan	2,79	-3,18	7,39	2,56	4,93	0,01
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,94	4,50	5,28	3,95	5,86	0,20
P. Jasa Pendidikan	2,49	3,93	2,87	0,55	3,92	0,02
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,15	-5,76	11,29	4,68	7,09	0,07
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,44	0,20	8,79	8,79	8,26	0,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,06	1,47	5,08	4,66	5,00	4,66

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar



**Grafik 3.1 Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2019 (y-on-y)**

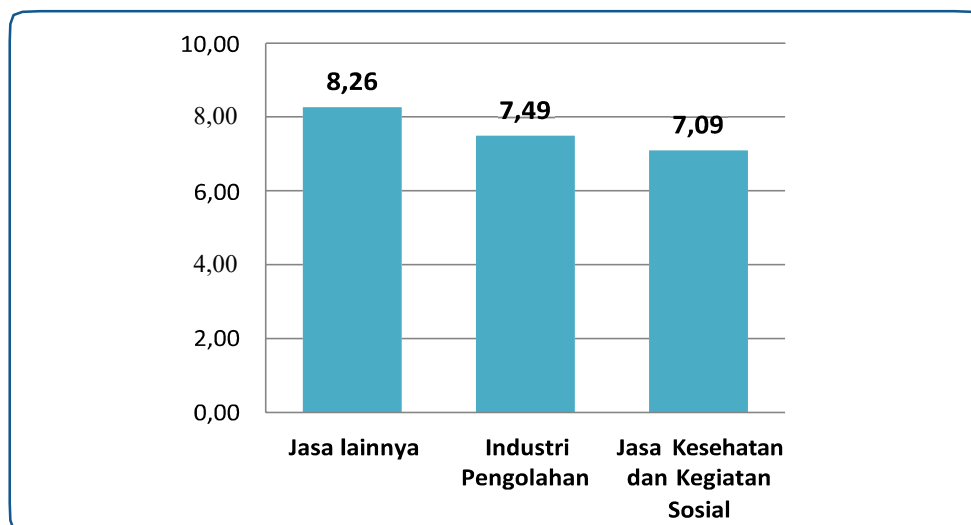


Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 (c-to-c)

Kumulatif perekonomian Kalimantan Barat untuk triwulan IV-2019 tumbuh sebesar 5,00 persen, pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa lainnya sebesar 8,26 persen; diikuti Industri Pengelolaan sebesar 7,49 persen; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,09 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha triwulan IV-2019 (c-to-c) dapat dilihat pada Grafik 3.2.

**Grafik 3.2 Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2019 (c-to-c)**

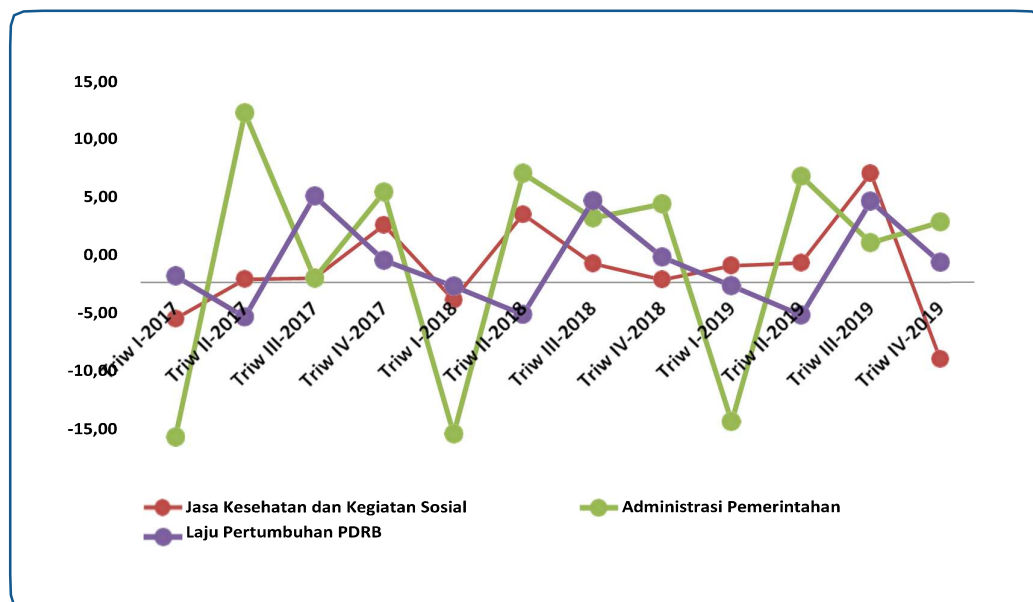


Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan III-2019 (q-to-q)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2019 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 1,47 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,50 persen. Kemudian diikuti Jasa Pendidikan sebesar 3,93 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,41 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa lapangan Usaha yang mengalami kontraksi yaitu, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami kontraksi sebesar 5,76 persen; Jasa Perusahaan 3,18 persen; Real Estate 0,62 persen; dan Jasa Keuangan 0,54 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha triwulan IV-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3 Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019 (q-to-q)



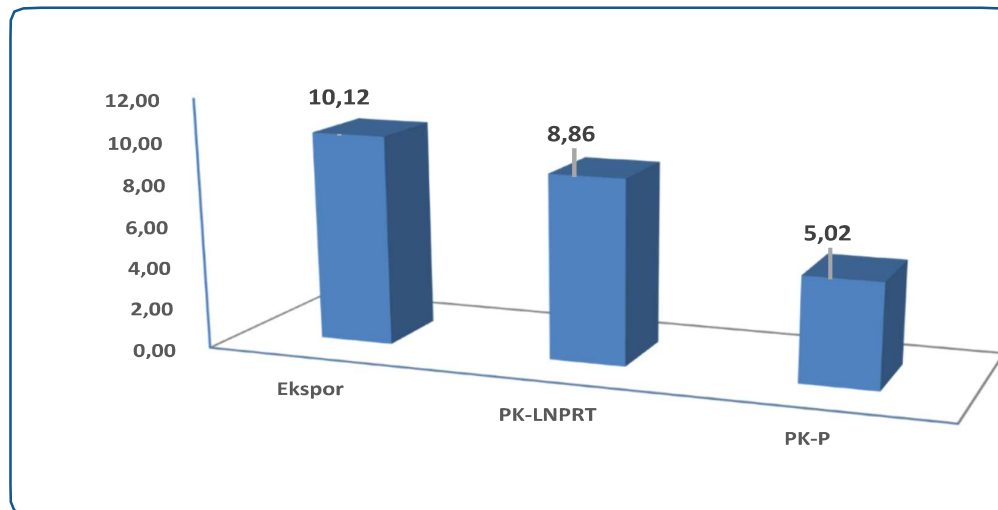
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

1.2 PDRB Menurut Pengeluaran

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 (c-to-c)

Dari sisi Pengeluaran, Kumulatif pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat selama triwulan IV-2019 mencapai 5,00 persen (c-to-c), melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 5,07 persen. Pertumbuhan tertinggi selama triwulan IV-2019 dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,12 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,86 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,02.

Grafik 3.4 Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2019 (c-to-c)



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y)

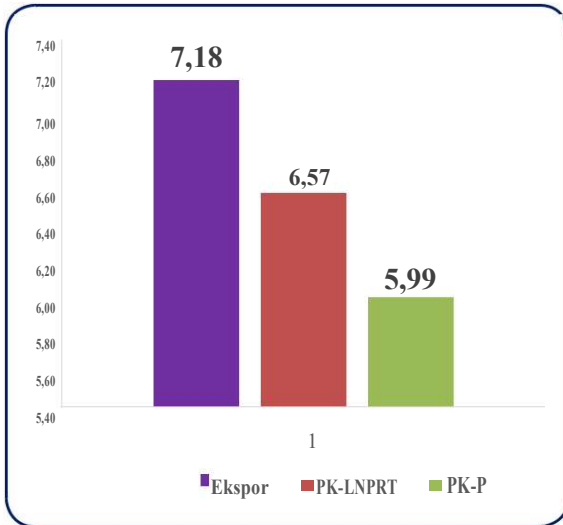
Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 terhadap triwulan IV-2018 (y-on-y) terjadi hampir pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,18 persen, diikuti Komponen Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,57 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,99 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mendominasi PDRB Kalimantan Barat. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P); Impor Barang dan Jasa; serta Ekspor Barang dan Jasa; sedangkan Komponen PK-LNPRT dan Komponen Perubahan inventori relatif kecil.

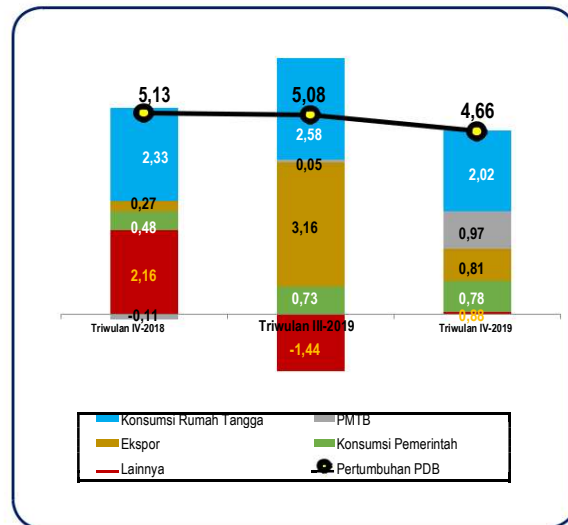
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV- 2019 (y-on-y), komponen PK-RT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,02 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,97 persen; Eskpor Barang dan Jasa 0,81 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 0,78 persen. Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran dan pertumbuhan beberapa komponen serta sumber pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 3.19, Grafik 3.5 dan Grafik 3.6.



Grafik 3.5 Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2019 (y-on-y)



Grafik 3.6 Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2019 (y-on-y)



Tabel 3.19 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Tw III-2019	Tw IV-2019	Tw III-2019	Tw IV-2019	Tw I sd IV-2019	Sumber Pertumbuhan Tw IV-2019 (y-on-y)
	Terhadap Tw II-2019 (q-to-q)	Terhadap Tw III-2019 (q-to-q)	Terhadap Tw III-2018 (y-on-y)	Terhadap Tw IV-2018 (y-on-y)	Terhadap Tw I sd IV-2018 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	(0,60)	0,68	4,98	3,90	4,96	2,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,47	0,79	8,54	6,57	8,86	0,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,76	21,67	6,69	5,99	5,02	0,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,87	3,93	0,17	3,11	1,39	0,97
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	12,27	(8,71)	30,59	7,18	10,12	0,81
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	18,83	28,63	6,64	12,12	5,85	1,34
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,06	1,47	5,08	4,66	5,00	4,66

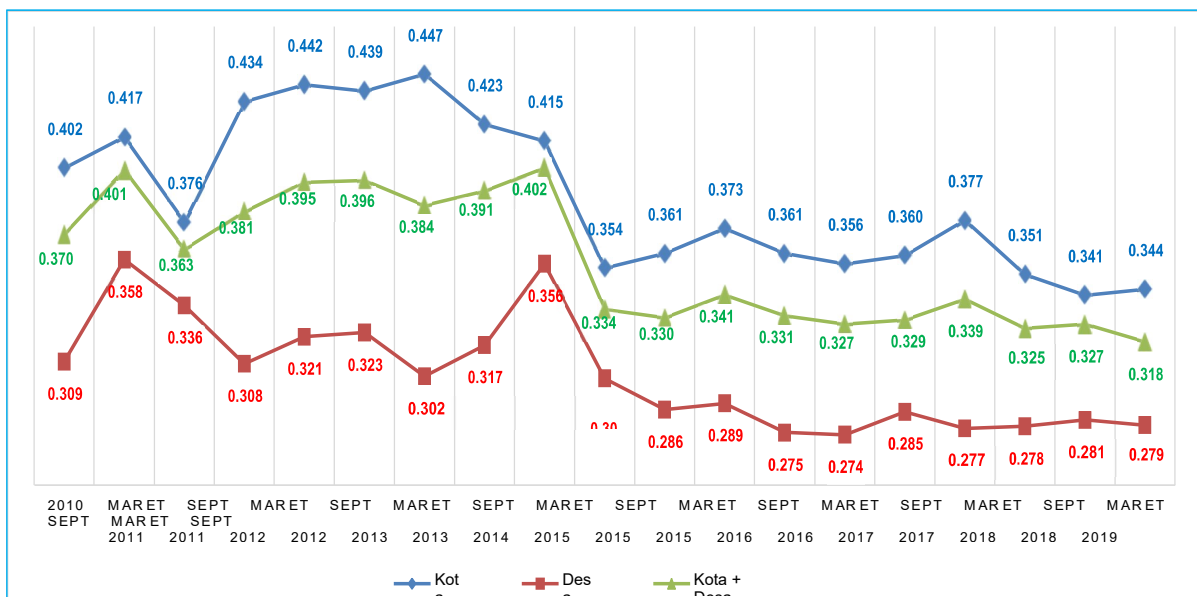
Sumber : Berita Resmi Statistik , BPS Kalbar

2. Indeks Gini

2.1 Perkembangan Gini Ratio Tahun 2010 - September 2019

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio. Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Data pada tahun 2010, Gini Ratio tercatat sebesar 0,370 dan angka ini berfluktuasi terus hingga September 2019 yang menunjuk pada angka 0,318. Pada bulan September Tahun 2019 Gini Ratio mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan Maret Tahun 2019 sebesar 0,327.

Grafik 3.7 Perkembangan Gini Ratio, 2010-2019



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan selalu di atas area perdesaan. Pada September 2019 Gini Ratio perkotaan sebesar 0,344 atau naik sebesar 0,003 poin apabila dibandingkan periode Maret 2019 yang hanya 0,341 dan turun sebesar 0,007 poin apabila dibandingkan periode setahun sebelumnya yaitu sebesar 0,351.

Pada wilayah perdesaan nilai Gini Ratio secara umum menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada bulan September Tahun 2019 menunjukkan angka 0,279 yang mengalami penurunan sebesar 0,002 poin apabila dibanding bulan Maret Tahun 2019 yaitu sebesar 0,281, dan terjadi kenaikan sebesar 0,001 poin, dari September Tahun 2018 yang tercatat sebesar 0,278.



2.2 Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2018 - September 2019

Disamping Gini Ratio, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada September 2019, persentase pengeluaran penduduk di Wilayah Kalimantan Barat pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 21,13 persen, yang berarti termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2019 naik apabila dibandingkan dengan kondisi bulan September Tahun 2018 yang sebesar 20,46 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran penduduk Wilayah Kalbar pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 19,12 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini tercatat lebih rendah apabila dibanding kondisi September Tahun 2018 sebesar 18,84 persen.

Sementara itu, untuk di daerah perdesaan, persentase pengeluaran penduduk Wilayah Kalbar kelompok penduduk 40 persen terbawah pada bulan September 2019 sebesar 23,05 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi bulan Maret Tahun 2018 sebesar 23,00 persen.

Dengan demikian, apabila mempedomani ukuran ketimpangan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah, maka selama Tahun 2019 tingkat ketimpangan penduduk di Wilayah Kalimantan Barat dapat ditekan sehingga masih masuk dalam kelompok ketimpangan kategori rendah. Distribusi pengeluaran penduduk di Kalimantan Barat dari Tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.20 dan Grafik 3.8.

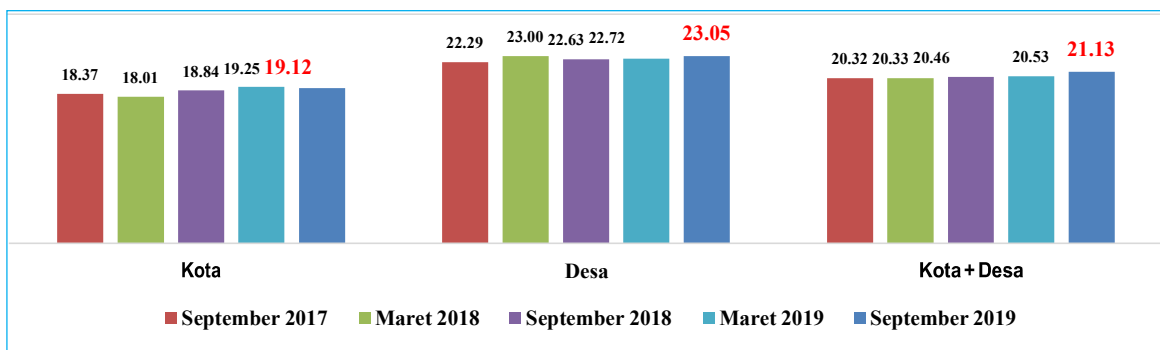


**Tabel 3.20 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Barat
September 2017 - Maret 2019 (persentase)**

Daerah/Tahun (1)	Penduduk 40 Persen Terbawah (2)	Penduduk 40 Persen Menengah (3)	Penduduk 40 Persen Atas (4)	Gini Ratio (5)
Perkotaan				
Maret 2018	18.01	37.07	44.92	0.377
September 2018	18.84	38.79	42.37	0.351
Maret 2019	19.25	38.95	41.80	0.341
September 2019	19.12	38.35	42.53	0.344
Perdesaan				
Maret 2018	23.00	39.85	37.15	0.277
September 2018	22.63	40.45	36.93	0.278
Maret 2019	22.72	39.82	37.46	0.281
September 2019	23.05	39.48	37.46	0.279
Perkotaan + Perdesaan				
Maret 2018	20.33	36.94	42.73	0.339
September 2018	20.46	38.53	41.02	0.325
Maret 2019	20.53	38.12	41.35	0.327
September 2019	21.13	38.04	40.83	0.318

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

**Grafik 3.8 Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen
terbawah, September 2017 - September 2019**



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2019 - September 2019, diantaranya adalah :

1. Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS), di Kalimantan Barat tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk naik sebesar 3,05 persen. Persentase kenaikan terbesar berada di kelompok 40 persen tebawah (sebesar 6,05 persen), sementara di kelompok 40 persen menengah tercatat kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 2,78 persen. Sedangkan di kelompok 20 persen teratas



tercatat kenaikan sebesar 1,90 persen. Hal ini sedikit-banyak menjelaskan fenomena penurunan angka *Gini Ratio* di Kalimantan Barat sebesar 0,009 poin.

2. Di daerah perkotaan, kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk mengalami pertumbuhan negatif, artinya rata-rata pengeluaran penduduk terjadi penurunan dari periode Maret 2019 ke September 2019. Secara berturut-turut, penduduk kelompok 40 persen terbawah mengalami pertumbuhan sebesar -2,18 persen, kelompok 40 persen Menengah sebesar -3,70 persen, dan 20 persen teratas tercatat terjadi peningkatan sebesar 0,16 persen.
3. Di perdesaan, terjadi pola yang berbeda. Kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas mengalami pertumbuhan positif. Kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk perdesaan di Kalimantan Barat sebesar 7,12 persen untuk periode Maret 2019 - September 2019. Penduduk kelompok 40 persen terbawah mengalami pertumbuhan sebesar 8,73 persen. Sementara kelompok 40 persen Menengah sebesar 6,24 persen, dan 20 persen teratas naik sebesar 6,99 persen.

3. Desa Mandiri

Guna mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status tersebut akan mempermudah bagi pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat desa untuk mengelola dan mencapai tujuan pembangunan desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan pembangunan desa berdasarkan undang-undang tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan harus difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga akan tercapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi sehingga dapat memahami tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta cara atau langkah kebijakan yang harus dikembangkan guna mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri. Klasifikasi tersebut tentu harus memperhatikan karakteristik desa yang sangat beragam, bukan hanya dari aspek fisik geografis tetapi juga terkait dengan nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa. Undang-Undang Desa telah memberi jalan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan mandiri.

Berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan status kemandirian desa telah diluncurkan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, di Provinsi Kalimantan



Barat dengan 14 Kabupaten/Kota, 163 Kecamatan dan 2.031 Desa, hanya terdapat 1 (satu) desa mandiri yaitu Desa Sutera di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Sisanya terdapat 677 desa dengan status desa sangat tertinggal, 928 desa tertinggal, 372 desa berkembang dan 53 desa maju.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat meningkatkan status kemandirian desa sehingga menjadi desa mandiri sekurang-kurangnya mencapai 425 Desa Mandiri.

Guna mewujudkan pembangunan dan menjawab keinginan masyarakat desa dalam meningkatkan status kemandirian desa, pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengubah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta dari desa berkembang dan desa maju menjadi desa mandiri. Untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui perangkat daerah terkait telah menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang sasaran percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa seluruh desa di Wilayah Kalimantan Barat untuk digunakan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan pembangunan dan percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa.

Rencana Aksi Daerah Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa dibutuhkan sebagai pendorong kepada seluruh lembaga pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa. Desa mandiri merupakan wujud keberhasilan pembangunan desa di suatu wilayah dan untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen dan kepedulian dari pemerintah serta seluruh komponen dalam melaksanakan berbagai program sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya, selama tahun 2019 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung dan menciptakan Desa Mandiri di Wilayah Kalimantan Barat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan Instansi Vertikal. Program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2019 antara lain :

1. Program Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam penyediaan pelayanan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, Infrastruktur, Keamanan, pemberdayaan, olah raga, gotong royong, budaya, Air bersih dan sanitasi. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Sosial yang dapat dilakukan antara lain :
 - a. Penguatan sarana pelayanan dasar dengan pembangunan sarana dan prasarana, rehabilitasi, penyediaan tenaga kesehatan, Penyediaan pusat pelatihan, Sarana olah raga, kebudayaan, keamanan dan pemberian edukasi dan penyuluhan.
 - b. Penguatan potensi seluruh lembaga terkait pelayanan dasar dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.



2. Program Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam kemandirian ekonomi masyarakat. Penyediaan Sarana dan kemampuan ekonomi desa yang terdiri dari Fasilitas Perbankan, pelayanan kredit, angkutan/Transportasi, infratraktur jalan, ketersediaan sarana perdagangan, jasa pengiriman, UKM. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi yang dapat dilakukan antara lain :
 - a. Penguatan ekonomi dengan pembangunan sarana dan prasana transportasi, Fasilitas Perbankan dan perkreditan, Pembinaan UKM, fasilitas perdagangan rehabilitasi, penyediaan tenaga kesehatan, Penyediaan pusat pelatihan, pemberian edukasi dan penyuluhan.
 - b. Penguatan potensi seluruh lembaga terkait pelayanan dasar dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.
3. Program Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi, dimaksudkan untuk meningkatkan Kualitas lingkungan, dan pencegahan bencana. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi yang dapat dilakukan antara lain :
 - a. Penguatan Kualitas Lingkungan dengan pembangunan dan pengadaan sarana Mitigasi penanggulangan bencana, dan peningkatan kualitas lingkungan.
 - b. Penguatan potensi seluruh lembaga terkait Ketahanan lingkungan dari unsure pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2019, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2019 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat, dari sebanyak 20.31 desa, ditetapkan 208 desa dengan status desa sangat tertinggal, sebanyak 781 desa tertinggal, desa berkembang sebanyak 767, desa maju sebanyak 188 dan desa mandiri sebanyak 87. Daftar nama Desa Mandiri tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan diatas tercantum dalam tabel 3.21 :

Tabel 3.21 Desa Mandiri Tahun 2019

No	Kabupaten	Kecamatan	Nilai IDM	Desa
1	Sambas	Sambas	0,8317	Pasar Melayu
2	Sambas	Teluk Keramat	0,8881	Sekura
3	Sambas	Tebas	0,9048	Tebas Kuala
4	Sambas	Tebas	0,8357	Makrampai
5	Sambas	Pemangkat	0,8232	Pemangkat Kota
6	Sambas	Paloh	0,8540	Nibung
7	Sambas	Sajingan Besar	0,8581	Kaliau'
8	Sambas	Sajingan Besar	0,8367	Sebunga
9	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8233	Sengkubang
10	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8159	Penibung
11	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8529	Pasir
12	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8311	Kuala Secapah
13	Mempawah	Mempawah Hilir	0,8343	Malikian



No	Kabupaten	Kecamatan	Nilai IDM	Desa
14	Mempawah	Sungai Pinyuh	0,8306	Sungai Batang
15	Mempawah	Sungai Pinyuh	0,8367	Galang
16	Mempawah	Siantan	0,9107	Jungkat
17	Mempawah	Sungai Kunyit	0,8845	Sungai Duri I
18	Mempawah	Segedong	0,8195	Sungai Burung
19	Mempawah	Anjongan	0,8322	Pak Bulu
20	Mempawah	Mempawah Timur	0,8716	Antibar
21	Mempawah	Mempawah Timur	0,8157	Pasir Palembang
22	Mempawah	Mempawah Timur	0,8199	Pasir Panjang
23	Mempawah	Mempawah Timur	0,8383	Sungai Bakau Kecil
24	Mempawah	Mempawah Timur	0,9218	Parit Banjar
25	Sanggau	Sekayam	0,9140	Balai Karang
26	Sanggau	Parindu	0,8390	Pusat Damai
27	Sanggau	Tayan Hulu	0,8199	Sosok
28	Sanggau	Tayan Hilir	0,9346	Pedalaman
29	Sanggau	Toba	0,8522	Teraju
30	Ketapang	Manis Mata	0,8217	Manis Mata
31	Ketapang	Kendawangan	0,8225	Kendawangan Kiri
32	Ketapang	Sandai	0,8389	Sandai Kiri
33	Ketapang	Sandai	0,8840	Sandai
34	Ketapang	Nanga Tayap	0,8933	Nanga Tayap
35	Ketapang	Tumbang Titi	0,8174	Tumbang Titi
36	Ketapang	Delta Pawan	0,8716	Paya Kumang
37	Ketapang	Benua Kayong	0,8343	Padang
38	Ketapang	Air Upas	0,8263	Air Upas
39	Ketapang	Air Upas	0,8263	Sari Bekayas
40	Ketapang	Air Upas	0,8584	Membuluh Baru
41	Ketapang	Sungai Melayu Rayak	0,8160	Sungai Melayu
42	Sintang	Sintang	0,9514	Sungai Ana
43	Sintang	Sintang	0,8194	Merti Guna
44	Sintang	Sepauk	0,8279	Tanjung Ria
45	Sintang	Kelam Permai	0,9102	Kebong
46	Sintang	Binjai Hulu	0,8197	Binjai Hulu
47	Sintang	Binjai Hulu	0,8216	Dak Jaya
48	Kapuas Hulu	Bunut Hulu	0,9011	Nanga Semangut
49	Kapuas Hulu	Bunut Hulu	0,9456	Semangut Utara
50	Kapuas Hulu	Semitau	0,8373	Semitau Hulu
51	Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	0,9007	Boyan Tanjung
52	Kapuas Hulu	Hulu Gurung	0,8640	Nanga Tepuai
53	Kapuas Hulu	Jongkong	0,8168	Jongkong Kanan



No	Kabupaten	Kecamatan	Nilai IDM	Desa
54	Kapuas Hulu	Jongkong	0,8782	Jongkong Pasar
55	Kapuas Hulu	Batang Lupar	0,8416	Sepandan
56	Bengkayang	Sungai Raya	0,8290	Sungai Duri
57	Bengkayang	Seluas	0,8340	Seluas
58	Bengkayang	Sanggau Ledo	0,8801	Lembang
59	Landak	Ngabang	0,8822	Hilir Kantor
60	Landak	Ngabang	0,8552	Hilir Tengah
61	Landak	Menjalin	0,8640	Menjalin
62	Sekadau	Sekadau Hilir	0,8406	Sungairingin
63	Sekadau	Sekadau Hilir	0,8311	Mungguk
64	Sekadau	Nanga Taman	0,8162	Nanga Taman
65	Sekadau	Nanga Mahap	0,8348	Nanga Mahap
66	Melawi	Nanga Pinoh	0,8245	Tanjung Niaga
67	Melawi	Nanga Pinoh	0,8799	Sidomulyo
68	Melawi	Pinoh Selatan	0,8251	Manggala
69	Melawi	Belimbing Hulu	0,8230	Beloyang
70	Kayong Utara	Sukadana	0,8940	Sutera
71	Kayong Utara	Sukadana	0,8621	Pangkalan Buton
72	Kayong Utara	Telok Batang	0,8365	Teluk Batang
73	Kayong Utara	Seponti	0,8511	Seponti Jaya
74	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8655	Sungai Raya
75	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8530	Arang Limbung
76	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8210	Kuala Dua
77	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8246	Limbung
78	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8195	Teluk Kapuas
79	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8470	Sungai Raya Dalam
80	Kubu Raya	Sungai Raya	0,8756	Parit Baru
81	Kubu Raya	Sungai Ambawang	0,8640	Sungai Ambawang Kuala
82	Kubu Raya	Rasau Jaya	0,8586	Rasau Jaya Satu
83	Kubu Raya	Teluk Pakedai	0,8282	Selat Remis
84	Kubu Raya	Sungai Kakap	0,9062	Sungai Kakap
85	Kubu Raya	Sungai Kakap	0,9179	Jeruju Besar
86	Kubu Raya	Sungai Kakap	0,8751	Sungai Rengas
87	Kubu Raya	Sungai Kakap	0,8914	Pal Sembilan

Sumber : SK Dirjen PPMD No. 201 Tahun 2019

Sedangkan progres peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 201 Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.22.



Tabel 3.22 Progres Peningkatan Indeks Desa Membangun Tahun 2018 Dan Tahun 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH		STATUS DESA 2018					STATUS DESA 2019				
		KEC	DESA	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SAMBAS	19	193	18	99	71	5	-	3	45	108	29	8
2	MEMPAWAH	9	60	2	21	30	7	-	-	2	7	35	16
3	SANGGAU	15	163	24	96	37	6	-	-	73	66	19	5
4	KETAPANG	20	253	88	103	54	8	-	36	96	91	18	12
5	SINTANG	14	390	212	148	29	1	-	86	180	104	14	6
6	KAPUAS HULU	23	278	124	125	25	4	-	3	75	169	23	8
7	BENGKAYANG	17	122	26	74	20	2	-	2	48	63	6	3
8	LANDAK	13	156	65	72	17	2	-	26	99	20	8	3
9	SEKADAU	7	87	8	50	25	4	-	4	43	30	6	4
10	MELAWI	11	169	93	63	13	-	-	47	83	32	3	4
11	KAYONG UTARA	6	43	1	17	20	4	1	-	7	26	6	4
12	KUBU RAYA	9	117	16	60	31	10	-	1	30	51	21	14
TOTAL		163	2.031	677	928	372	53	1	208	781	767	188	87

Sumber : SK Dirjen PPMD No. 52 Tahun 2018 & SK Dirjen PPMD No. 201 Tahun 2019



Hasil yang dicapai pada tahun 2019 merupakan keberhasilan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders). Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) melakukan monitoring dan evaluasi bersama baik lembaga pemerintah, Perangkat Daerah, maupun masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian target Rencana Aksi Daerah Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa. Hasil monitoring dan evaluasi oleh pelaku atau pemangku kepentingan diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Sekretariat Tim Rencana Aksi Daerah Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat) sehingga dihasilkan laporan monitoring dan evaluasi yang sistematis. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dan langkah kebijakan dalam meningkatkan status desa di Wilayah Kalimantan Barat menjadi Desa Mandiri.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

4.1 Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

Berdasarkan Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus Tahun 2019, jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2.479.287 orang. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus Tahun 2018, angkatan kerja tersebut mengalami kenaikan sebanyak 27.888 orang. Salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yaitu rasio dalam persen antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk 15+). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Agustus 2018 - 2019

Kabupaten/Kota	TPAK			TPT		
	2018	2019	Δ +/-	2018	2019	Δ +/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Sambas	71,29	71,49	0,20	3,34	3,58	0,24
Kab. Bengkayang	75,96	73,23	-2,73	2,40	2,71	0,31
Kab. Landak	74,46	68,39	-6,07	2,29	2,75	0,46
Kab. Pontianak	64,96	62,98	-1,98	6,87	5,19	-1,68
Kab. Sanggau	72,60	68,97	-3,63	2,47	3,07	0,60
Kab. Ketapang	66,20	65,36	-0,84	3,23	4,53	1,30
Kab. Sintang	71,64	71,77	0,13	2,34	3,20	0,86
Kab. Kapuas Hulu	75,93	76,93	1,00	1,58	2,46	0,88
Kab. Sekadau	76,40	77,19	0,79	2,80	3,14	0,34
Kab. Melawi	73,55	74,37	0,82	3,15	2,45	-0,70
Kab. Kayong Utara	65,64	66,17	0,53	3,93	4,00	0,07



Kabupaten/Kota	TPAK			TPT		
	2018	2019	Δ +/-	2018	2019	Δ +/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Kuburaya	62,22	64,68	2,46	5,04	5,62	0,58
Kota Pontianak	61,19	61,62	0,43	10,37	9,13	-1,24
Kota Singkawang	61,07	66,97	5,90	7,88	6,44	-1,44
Kalimantan Barat	68,65	68,30	-0,35	4,26	4,45	0,19

Sumber : Sakernas Agustus 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kalimantan Barat keadaan bulan Agustus Tahun 2019 sebesar 68,30 persen dan jika dibandingkan Tahun 2018 sebesar 68,65 persen, maka angka TPAK tersebut sedikit mengalami penurunan. Indikator penting lainnya adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu rasio dalam persen antara jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT Kalimantan Barat pada bulan Agustus Tahun 2019 sebesar 4,45 persen atau naik 0,19 poin apabila dibandingkan bulan Agustus Tahun 2018 sebesar 4,26 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi di Kalimantan Barat pada tahun 2019 terjadi di Kabupaten Sekadau (77,19 %) disusul kemudian Kabupaten Kapuas Hulu dan Melawi masing-masing 76,93 persen dan 74,37 persen. Sementara TPAK terendah terjadi di Kota Pontianak 61,62 persen.

Sementara itu angka TPT tertinggi terjadi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing 9,13 persen dan 6,44 persen terhadap angkatan kerjanya. Sedangkan Kabupaten Kubu Raya berada di urutan ketiga yaitu sebesar 5,62 persen. Sedangkan TPT terendah adalah Kabupaten Melawi sebesar 2,45.

Sementara untuk jumlah penduduk yang bekerja, pada bulan Agustus 2019, sebanyak 2.369.015 penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan yang tidak bekerja atau pengangguran sebesar 110.272 orang. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja terbanyak di Kota Pontianak sebesar 271.754 orang yang disusul oleh Kabupaten Sambas sebesar 259.273 orang. Sedangkan untuk yang terendah adalah di Kabupaten Kayong Utara sebesar 50.031 orang.

Sedangkan untuk pengangguran terbanyak berada di Kota Pontianak sebesar 27.311 orang disusul oleh Kabupaten Kubu Raya sebesar 15.006 orang. Untuk pengangguran yang terendah dari segi jumlah berada di Kabupaten Melawi sebesar 2.731 orang. Jumlah penduduk 15 Tahun keatas menurut kegiatan terbanyak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar dapat dilihat pada Tabel 3.24.



Tabel 3.24 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Terbanyak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018 - 2019

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja						Bukan Angk. Kerja	
	Bekerja		Pengangguran		Jumlah		2018	2019
	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Sambas	256.560	259.273	8.873	9.640	265.433	268.913	106.885	107.238
Kab. Bengkayang	128.501	125.863	3.163	3.506	131.664	129.369	41.666	47.288
Kab. Landak	190.837	175.916	4.477	4.977	195.314	180.893	67.007	83.620
Kab. Pontianak	111.942	112.154	8.261	6.141	120.203	118.295	64.828	69.534
Kab. Sanggau	238.055	228.488	6.024	7.244	244.079	235.732	92.129	106.078
Kab. Ketapang	230.233	228.921	7.685	10.855	237.918	239.776	121.484	127.065
Kab. Sintang	203.638	205.130	4.870	6.782	208.508	211.912	82.544	83.364
Kab. Kapuas Hulu	138.881	142.707	2.223	3.602	141.104	146.309	44.731	43.874
Kab. Sekadau	105.926	108.270	3.048	3.506	108.974	111.776	33.656	33.030
Kab. Melawi	104.613	108.663	3.401	2.731	108.014	111.394	38.843	38.395
Kab. Kayong Utara	48.743	50.031	1.993	2.083	50.736	52.114	26.557	26.649
Kab. Kuburaya	239.325	251.770	12.698	15.006	252.023	266.776	153.052	145.691
Kota Pontianak	261.653	271.754	30.272	27.311	291.925	299.065	185.121	186.242
Kota Singkawang	87.974	100.075	7.530	6.888	95.504	106.963	60.880	52.763
Kalimantan Barat	2.346.881	2.369.015	104.518	110.272	2.451.399	2.479.287	1.119.383	1.150.831

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019

4.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus 2019, menunjukkan bahwa kontribusi beberapa sektor dalam penyerapan tenaga kerja, dari 9 (sembilan) kelompok lapangan usaha dikelompokkan kembali menjadi 3 (tiga) sektor utama yaitu:

- Sektor Pertanian yaitu jumlah pekerja di sektor pertanian.
- Sektor Manufaktur yaitu jumlah pekerja disektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih serta kontruksi (bangunan).
- Sektor Jasa yaitu jumlah pekerja disektor perdagangan, transportasi, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa perorangan.

Tabel 3.25 memperlihatkan Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada bulan Agustus 2019 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 48,79 persen atau sebanyak 1.155.932 orang, sektor manufaktur sebesar 15,23 persen atau sebanyak 360.887 orang. Sedangkan sektor jasa sebesar 35,97 persen atau sebanyak 852.196 orang. Penyerapan tenaga kerja di sektor



pertanian yang tertinggi adalah Kabupaten Sekadau sebesar 70,13 persen atau sebanyak 72.928 orang dan Kabupaten Sintang sebesar 67,73 persen atau sebanyak 138.939 orang. Penduduk 15 Tahun keatas menurut lapangan pekerjaan utama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 3.25.

Tabel 3. 25 Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah			%		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Sambas	148.069	37.451	73.753	57,11	14,44	28,45
Bengkayang	73.757	17.776	34.330	58,60	14,12	27,28
Landak	120.618	13.911	41.387	68,57	7,91	23,53
Mempawah	34.005	26.040	52.109	30,32	23,22	46,46
Sanggau	149.099	25.706	53.683	65,25	11,25	23,49
Ketapang	118.831	38.086	72.004	51,91	16,64	31,45
Sintang	138.939	20.611	45.580	67,73	10,05	22,22
Kapuas Hulu	89.343	21.766	31.598	62,61	15,25	22,14
Sekadau	75.928	8.836	23.506	70,13	8,16	21,71
Melawi	62.450	18.441	27.772	57,47	16,97	25,56
Kayong Utara	22.999	10.674	16.358	45,97	21,33	32,70
Kubu Raya	88.218	49.162	114.390	35,04	19,53	45,43
Pontianak	10.488	54.166	207.100	3,86	19,93	76,21
Singkawang	23.188	18.261	58.626	23,17	18,25	58,58
Total	1.155.932	360.887	852.196	48,79	15,23	35,97

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

Sementara penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur yaitu di Kabupaten Mempawah sebesar 23,22 persen atau sebanyak 26.040 orang dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 21,33 persen atau sebanyak 10.674 orang. Untuk sektor jasa penyerapan terbesar terdapat di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing sebesar 76,21 persen atau sebanyak 207.100 orang dan 58,58 persen atau sebanyak 58.626 orang.

4.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Pada bulan Agustus Tahun 2019 persentase pekerja formal di Kalimantan Barat sebesar 40,02 persen. Sedangkan pekerja informal sebesar 59,98 persen. Jumlah pekerja formal menurun apabila dibandingkan bulan Agustus Tahun 2018 dengan jumlah sebesar 40,52 persen dan pekerja informal naik apabila dibandingkan bulan Agustus Tahun 2018 yaitu sebesar 59,48 persen. Apabila diperhatikan menurut status pekerjaan utama, persentase buruh/karyawan/ pegawai keadaan bulan Agustus Tahun 2019 mengalami penurunan dari 37,56 persen menjadi 36,91 persen. Status berusaha dibantu buruh mengalami kenaikan, apabila Tahun 2018 sebesar 2,96 persen, Tahun 2019 menjadi 3,11 persen bulan Agustus Tahun 2019. Terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada status pekerja berusaha sendiri dari 19,38 persen menjadi 21,88 persen. Sedangkan pada pekerja keluarga/pekerja tak dibayar mengalami penurunan dari 17,23 persen menjadi



16,51 persen. Perbandingan penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 3.26.

Tabel 3. 26 Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018 – 2019

Status Pekerjaan Utama	Status Pekerjaan			
	2018	%	2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha Sendiri	454.906	19,38	518.381	21,88
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	416.748	17,76	387.960	16,38
Berusaha dibantu Buruh Tetap	69.429	2,96	73.625	3,11
Buruh/Karyawan/Pegawai	881.446	37,56	874.357	36,91
Pekerja Bebas Pertanian	54.279	2,31	52.284	2,21
Pekerja Bebas Non Pertanian	65.798	2,80	71.355	3,01
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	404.275	17,23	391.053	16,51
Total	2.346.881	100,00	2.369.015	100,00

Sumber : Sumber : Susumber : survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019

4.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran ketenagakerjaan menurut pendidikan merupakan hal yang menarik pula untuk dicermati. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Pada bulan Agustus Tahun 2019 terlihat bahwa lebih dari setengah penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SD ke bawah atau sebesar 50,38 persen. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP sederajat sebesar 16,66 persen, SMA umum sebesar 18,06 persen, SMA kejuruan sebesar 6,03 persen, Diploma hanya sebesar 2,06 persen dan S1 ke atas sebesar 6,81 persen. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin tingginya tingkat pendidikan, maka penyerapan tenaga kerja semakin rendah. Jumlah penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan SMP, SMA, SMA Kejuruan dan S1 ke atas mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan Diploma justru mengalami sedikit penurunan. Data jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 3.27.



Tabel 3.27 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018 - 2019

No.	Pendidikan	Agustus 2018		Agustus 2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	<= SD	1.213.514	51,71	1.193.483	50,38
2	SMP	372.882	15,89	394.587	16,66
3	SMA	403.083	17,18	427.731	18,06
4	SMA Kejuruan	139.196	5,93	142.849	6,03
5	Diploma I/II/III	60.639	2,58	48.919	2,06
6	Universitas	157.567	6,71	161.446	6,81
Total		2.454.289	100,00	2.369.015	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2019

4.5 Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Data pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan supply angkatan kerja.

Secara absolut maupun persentase, jumlah pengangguran pada bulan Agustus Tahun 2019 terbesar pada tingkat pendidikan SMA. Pengangguran pada tingkat SD, SMP, dan SMA Kejuruan mengalami peningkatan. Namun pengangguran pada tingkat pendidikan SMP mengalami peningkatan yang cukup besar dari 13,87 persen pada bulan Agustus Tahun 2018 menjadi 18,13 persen pada bulan Agustus Tahun 2019. Persentase pengangguran pada tingkat pendidikan SMA kejuruan mengalami peningkatan sekitar 2,51 persen. Untuk pengangguran pada tingkat pendidikan Diploma dan S1 ke atas mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2018. Persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan Diploma I/II/III pada bulan Agustus Tahun 2018 sebesar 7,11 sedangkan pada bulan Agustus Tahun 2019 sebesar 2,70 dan pengangguran tingkat S1 ke atas pada bulan Agustus Tahun 2019 sebesar 7,17 persen atau turun 2,2 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penduduk 15 tahun keatas yang termasuk pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018 - 2019

No.	Pendidikan	Agustus 2018		Agustus 2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	<= SD	23.794	22,77	29.117	26,40
2	SMP	14.498	13,87	19.990	18,13
3	SMA	36.053	34,49	33.856	30,70
4	SMA Kejuruan	12.950	12,39	16.429	14,90
5	Diploma I/II/III	7.431	7,11	2.978	2,70
6	Universitas	9.792	9,37	7.902	7,17
Total		104.518	100,00	110.272	100,00

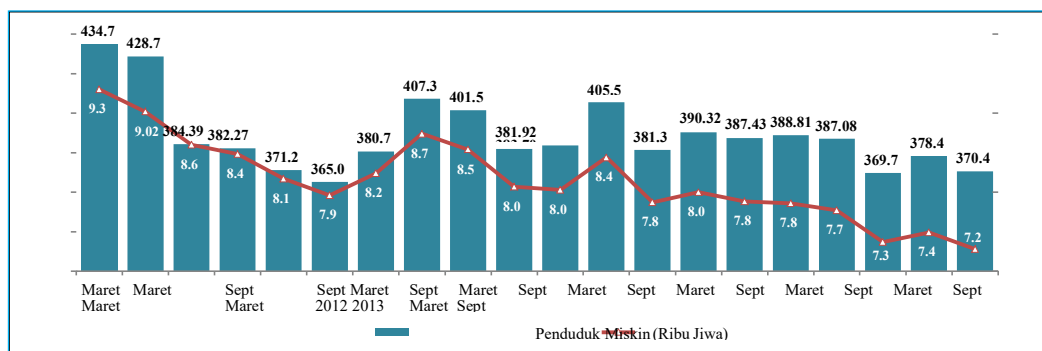
Sumber: Sakernas Agustus 2019

5. Angka Kemiskinan

5.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2009 - September 2019

Secara umum, pada periode Maret 2009 sampai September 2019 tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat mengalami fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Selama lebih dari satu dasawarsa ini, jumlah penduduk miskin Kalimantan Barat telah dapat ditekan cukup signifikan dari 434,77 ribu jiwa pada bulan Maret 2009, menjadi 370,47 ribu jiwa pada bulan September 2019. Terjadi penurunan angka kemiskinan yakni 2,02 persen dari periode bulan Maret 2009 sampai September 2019. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2009 sampai dengan September 2019 dapat dilihat pada Grafik 3.9.

Grafik 3.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2009-2019



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

5.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2018 - September 2019

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada bulan September 2019 mencapai 370,47 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 7,9 ribu orang apabila dibandingkan bulan Maret 2019. Jika dibandingkan dengan bulan September tahun 2018, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 740 orang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode bulan September 2018 sampai bulan September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 2.920 orang. Sedangkan daerah perdesaan turun sebesar 2.180 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,58 persen menjadi 4,60 persen. Sedangkan di perdesaan naik dari 8,84 persen menjadi 9,05 persen. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah bulan September 2018 sampai bulan September 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.29.



Tabel 3.29 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2018 - September 2019

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2018	79,360	4.58
Maret 2019	81,640	4.60
September 2019	82,280	4.61
Perdesaan		
September 2018	290,370	8.84
Maret 2019	296,770	9.05
September 2019	288,190	8.73
Perkotaan + Perdesaan		
September 2018	369,730	7.37
Maret 2019	378,410	7.49
September 2019	370,470	7.28

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

5.3 Perkembangan Garis Kemiskinan September 2018 - September 2019

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin pada bulan September Tahun 2019 yaitu Rp 452.899,- (kapita/bulan).

Selama periode Maret 2019 sampai September 2019, Garis Kemiskinan dari Rp4 38.555,- perkapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 452.899,- perkapita per bulan pada September 2019. Sementara pada periode September 2018 sampai September 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,62 persen, yaitu dari Rp 420.831,- perkapita per bulan menjadi Rp 452.899,- per kapita per bulan.

Apabila dibandingkan antara Maret 2019 dengan September 2019, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 4,52 persen. Sedangkan di daerah perdesaan meningkat 2,76 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) terlihat bahwa peranan komoditi makanan memberikan sumbangan yang cukup besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan yaitu sebesar 77,65 persen. Garis kemiskinan dan perubahannya menurut Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.30.



Tabel 3.30 Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, September 2018 - September 2019

Daerah/Tahun (1)	Garis Kemiskinan		Total (4)
	Makanan (2)	Bukan Makanan (3)	
Perkotaan			
September 2018	331,135	103,335	434,470
Maret 2019	348,116	108,409	456,525
September 2019	366,155	110,999	477,154
Perubahan Sept'18 - Sept'19	10.58	7.42	9.82
Perubahan Mar'19 - Sept'19	5.18	2.39	4.52
Perdesaan			
September 2018	326,707	87,099	413,806
Maret 2019	337,213	92,007	429,220
September 2019	345,098	95,986	441,084
Perubahan Sept'18 - Sept'19	5.63	10.20	6.59
Perubahan Mar'19 - Sept'19	2.34	4.32	2.76
Perkotaan + Perdesaan			
September 2018	328,115	92,717	420,831
Maret 2019	340,782	97,773	438,555
September 2019	351,667	101,232	452,899
Perubahan Sept'18 - Sept'19	7.18	9.18	7.62
Perubahan Mar'19 - Sept'19	3.19	3.54	3.27

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), terlihat bahwa komponen terbesar pembentuk Garis Kemiskinan adalah Garis Kemiskinan Makanan. Pada Tabel 4.14 terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komponen non makanan.

Garis kemiskinan apabila menurut daerah perkotaan dan perdesaan, maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 78,24persen, lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 76,74 persen. Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi Maret 2019.

Pada bulan September Tahun 2019, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan terbesar dalam komponen komoditi penyusun GK, sebesar 21,59 persen di perkotaan dan 27,90 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK di perdesaan sebesar 11,75 persen dan di perkotaan sebesar 16,99 persen. Posisi ke tiga komoditi dengan kontribusi terbesar di perkotaan dan perdesaan yaitu telur ayam ras di perkotaan sebesar 4,74 persen dan di perdesaan sebesar 4,15 persen.

Di perkotaan, sampai dengan posisi sepuluh besar kontributor utama penyusun GK meliputi: daging ayam ras, kembang, mie instan, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, dan kopi bubuk & kopi instan (sachet), yang masing-masing menempati posisi ke 4



sampai dengan 10 dengan porsi terbesar penyusun GK perkotaan. Komoditi yang hampir sama tapi menempati posisi yang berbeda, sebagai pemberi sumbangan terbesar kepada GK perdesaan dari posisi ke 4 sampai dengan 10 yaitu gula pasir, daging ayam ras, mie instan, kopi bubuk & kopi instan (sachet), cabe rawit, bawang merah dan daun ketela pohon. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan serta perlengkapan mandi. Daftar Komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap Garis Kemiskinan beserta kontribusinya dapat dilihat pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan diurut berdasarkan Kontribusinya (%), September 2019

Jenis Komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis Komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan			
Beras	21.59	Beras	27.90
Rokok Kretek Filter	16.99	Rokok Kretek Filter	11.75
Telur Ayam Ras	4.74	Telur Ayam Ras	4.15
Daging Ayam Ras	3.90	Gula Pasir	3.61
Kembung	2.81	Daging Ayam Ras	3.11
Mie Instan	2.74	Mie Instan	3.07
Tongkol/tuna/cakalang	2.65	Kopi bubuk & Kopi instan	2.94
Kue Basah	2.41	Cabe Rawit	1.91
Gula Pasir	2.35	Bawang Merah	1.64
Kopi bubuk & Kopi instan	1.57	Daun Ketela Pohon	1.61
Cabe Rawit	1.49	Kue Basah	1.48
Susu Bubuk	1.39	Tongkol/tuna/cakalang	1.46
Lainnya	12.13	Lainnya	13.61
Bukan Makanan			
Perumahan	6.71	Perumahan	7.97
Bensin	3.78	Bensin	4.19
Listrik	2.54	Listrik	1.63
Pendidikan	1.95	Pendidikan	1.06
Perlengkapan Mandi	1.04	Perlengkapan Mandi	0.96
Lainnya	7.24	Lainnya	5.94

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

5.4 Garis Kemiskinan Per Rumah Tangga Miskin

Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga agar tidak dikategorikan miskin. Nilai ini merupakan hasil perkalian Garis Kemiskinan per-Kapita dengan rata-rata jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin. Pada September 2019, rata-rata satu rumah tangga miskin di Kalimantan Barat memiliki 5,26 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan berdasarkan rumah tangga miskin di Kalimantan Barat pada periode September 2019 yaitu Rp 452.899,- x 5,26 yakni sebesar Rp 2.382.249,-/Rumah Tangga Miskin per bulan.



5.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode bulan Maret 2019 sampai September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, begitu juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 1,142, dan turun menjadi 1,024 pada bulan September 2019. Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,256 menjadi 0,218 pada periode yang sama.

Periode bulan September 2018 sampai bulan September 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga cenderung mengalami penurunan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada bulan September 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,780 sementara di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,155.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata (gap) pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil dibanding penduduk perdesaan. Untuk itu diperlukan usaha yang lebih besar dan terarah dalam mengentaskan penduduk di pedesaan daripada di perkotaan. Secara umum, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan dari bulan September 2018 sampai bulan September 2019. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Di perdesaan, nilai indeks ini masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada bulan September 2019, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan sebesar 0,231, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 0,194. Daftar indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 3.32.



Tabel 3.32 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) di Kalimantan Barat Menurut Daerah, September 2018 - September 2019

Tahun (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Total (4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			
September 2018	0,680	1,484	1,206
Maret 2019	0,758	1,350	1,142
September 2019	0,780	1,155	1,024
Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)			
September 2018	0,152	0,353	0,284
Maret 2019	0,170	0,303	0,256
September 2019	0,194	0,231	0,218

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.33 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1. Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan serta Energi Dan Sumberdaya Mineral	756.279.700,00	568.521.800	75,17		
		2. Program Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian Dan Pembangunan Daerah	476.651.800,00	284.942.004,00	59,78		
		3. Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Pedesaan	813.102.600,00	773.011.994,00	95,07		
		4. Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Pedesaan	1.007.154.000,00	963.025.652,00	95,62		
		5. Program Peningkatan Kapasitas, Penataan Wilayah Dan Kerjasama Desa	822.717.500,00	745.966.783,00	90,67		
		6. Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	1.539.892.186,00	1.503.259.100,00	97,62		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		7. Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja	176.634.400,00	150.254.040,00	85,06		
		8. Program Pembinaan Hubungan Industrial	374.494.500,00	361.120.900,00	96,43		
		9. Program Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	460.620.254,00	433.269.008,00	94,06		
		10. Program Perlindungan dan Legalitas Lahan Transmigrasi	120.659.600,00	64.998.581,00	53,87		
		11. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	112.769.370,00	89.463.670,00	79,33		
		12. Program Pemberdayaan Sosial	526.380.000,00	499.407.436,00	94,88		
		13. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	545.630.000,00	478.022.000,00	87,61		
		14. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	334.836.500,00	259.072.403,00	77,37		
		15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	222.155.600,00	153.039.996,00	68,89		
		16. Program Pemberdayaan Pakir Miskin	527.035.000,00	518.776.000,00	98,43		
		17. Program Peningkatan pertumbuhan usaha pemberdayaan masyarakat pariwisata	982.921.500,00	816.979.700,00	83,11		
		18. Program pengembangan dan pemasaran pariwisata	3.912.153.700,00	3.730.094.916,00	95,35		
		19. Program ekonomi kreatif	2.526.248.100,00	2.205.944.671,00	87,32		
		20. Program Peningkatan Produksi Perkebunan	15.272.231.115,00	14.636.209.234,00	95,84		
		21. Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	2.304.404.367,00	2.073.634.484,00	89,99		
		22. Peningkatan Informasi dan Sinergi Pembangunan Kehutanan	1.170.821.980,00	852.193.531,00	72,79		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		23. Program Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	4.157.665.920,00	1.882.819.839,00	45,29		
		24. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.150.727.800,00	3.129.999.494,00	99,34		
		25. Program Pengembangan Perikanan Budidaya	3.047.523.250,00	2.940.139.475,00	96,48		
		26. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	2.579.916.000,00	2.475.991.619,00	95,97		
		27. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.798.592.985,00	1.686.963.420,00	93,79		
		28. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	760.285.000,00	682.048.300,00	89,71		
		29. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	85.373.978.250,00	84.185.510.928,00	98,61		
		30. Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura	5.392.370.450,00	5.233.724.129,00	97,06		
		31. Program Pengembangan Usaha Agribisnis	1.549.283.900,00	1.501.821.900,00	96,94		
		32. Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian	5.514.524.900,00	5.046.869.027,00	91,52		
		33. Program Peningkatan Pengelolaan Investasi	1.344.102.907,00	1.270.238.035,00	94,50		
		34. Program Pelayanan perizinan	1.042.781.934,00	1.001.845.827,00	96,07		
		35. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen (APBD)	939.252.000,00	866.154.465,00	92,22		
		36. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (APBN)	1.307.277.000,00	1.119.597.461,00	85,64		
		37. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	3.003.084.932,00	2.478.207.626,00	82,52		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		38. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	534.877.000,00	529.014.700,00	98,90		
		39. Peningkatan Kualitas Koperasi	2.884.202.840,00	2.808.912.981,00	97,39		
		40. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	3.993.795.000,00	3.962.076.711,00	99,21		
		41. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4.808.191.752,00	4.634.460.119,00	96,39		
		42. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	11.728.930.000,00	11.545.035.689,00	98,43		
		43. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis	2.218.002.963,00	2.146.955.010,00	96,79		
		44. Program Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan	7.486.927.428,00	6.759.536.430,00	90,28		
		45. Program Pemenuhan Pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat	4.992.660.000,00	4.682.585.350,00	93,78		
		46. Program Peningkatan Prasarana dan sarana pertanian	629.000.000,00	620.250.600,00	98,60		
					90,08	101,93	10,94

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 90,08 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 101,03 %, maka pada sasaran ini terdapat tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 10,94.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Pertumbuhan PDRB sektor perkebunan Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2018 memiliki realisasi sementara sebesar 5,85% dengan didukung Program peningkatan produksi perkebunan yang kegiatannya antara lain : pengembangan kebun karet rakyat, pengembangan kebun lada rakyat, pengembangan kebun kopi rakyat,



pengendalian hama / OPT, updating database statistik perkebunan, pengawalan dan pembinaan perkembangan perkebunan kelapa sawit, penyusunan data spasial komoditi perkebunan. Sebagai informasi bahwa jumlah produksi perkebunan Kalimantan Barat tahun 2019 sebesar 3.387.731 ton. Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat merupakan indikator yang terus mengalami penurunan. Realisasi NTPR Tahun 2017 sebesar 97,88, pada Tahun 2018 sebesar 94,44, dan pada Tahun 2019 sebesar 89,38. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam memaksimalkan kegiatan yang bersifat ekstensifikasi sehingga dapat menekan biaya perawatan dan produksi pada tingkat petani. Dengan demikian, akan terjadi penurunan Indeks yang dibayar petani (Ib) sehingga dapat memicu peningkatan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat di Kalimantan Barat.

2. Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan tahun 2019 ditargetkan sebesar 3,64 %, dengan realisasi mencapai 4,50 % sehingga terdapat capaian kinerja sebesar 125,82 % dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di bidang tanaman pangan sudah lebih baik. Secara umum terdapat peningkatan terhadap nilai tambah pada produk tanaman pangan. Sedangkan laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura dari target tahun 2019 sebesar 8,82% mengalami penurunan sekitar 5,47 atau 62,02 % dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan terjadinya pergeseran pertumbuhan dari hortikultura ke sektor lain.
3. Pertumbuhan PDRB sektor kelautan Atas Dasar Harga Konstan memiliki realisasi sebesar 3,34 % dari target sebesar 3,22 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka tahun 2019 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan mengalami kenaikan sebesar 5,09 % dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya PDRB di sektor perikanan terus mengalami peningkatan.
4. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2019 sebesar 5,6% (data BPS triwulan III 2019) mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan sebesar 4,8%. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian berbagai indikator merupakan bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari Kementerian maupun Kab/Kota terkait dengan pertumbuhan sektor perdagangan di Kalbar. Namun di lain sisi, pencapaian kinerja tersebut harus didukung oleh instansi vertikal lain serta faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi perkembangannya dalam menunjang penumbuhan dan pengembangan sektor perdagangan di wilayah Kalimantan Barat.
5. Perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data realisasi investasi periode Januari sampai September tahun 2019, mencapai angka sebesar Rp. 15,68 Triliun dengan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 7,70 Triliun berada pada peringkat 13 secara nasional dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 7,99 Triliun berada pada peringkat 14 secara nasional dengan target sebesar 18,75 Triliun atau sebesar 83,63%.
6. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial capaian program di peroleh dengan berbagai kegiatan antara pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Barat, dengan hasil yang diraih adalah meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota.



7. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial, dalam bentuk kegiatan bimbingan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Pontianak. Selain itu bimbingan kepada eks narapidana, penyuluhan/pencegahan narkoba kepada pelajar, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan unsur perangkat daerah serta kepolisian. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah penyantunan anak, rehabilitasi eks kusta, pemulangan korban trafficking ke daerah asal. Pemulangan, pendampingan korban tindak kekerasan pekerja migran internal sebanyak 1.368 orang. Pada Tahun 2019 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan penanganan sejumlah 2.196 orang, sedangkan pada Tahun 2018 PMKS yang mendapatkan penanganan sebanyak 1.532 orang.
8. Program Perlindungan dan legalitas lahan transmigrasi, memiliki realisasi anggaran hanya 53.87%, akan tetapi capaian kinerja dapat direalisasikan 100%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengusulan program pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik (Pencadangan kawasan permukiman transmigrasi) yang diusulkan oleh Kabupaten penerima transmigrasi lahan seluas 1.175.699 Ha.
9. Pertumbuhan PDRB sektor kehutanan di dukung oleh Program Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial. Program ini di dukung oleh kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH, Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak, pengembangan usaha masyarakat di bidang kehutanan, penyusunan Program penyuluhan kehutanan tingkat Provinsi, pendampingan kegiatan RHL oleh penyuluh kehutanan, fasilitasi percepatan pengakuan hutan adat. Penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) pengelola hutan adat, pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial, penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pengembangan perhutanan sosial, peningkatan sarana media informasi penyuluhan kehutanan, pendampingan kepada perhutanan sosial / hutan desa.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2019 dan Target Akhir Jangka Menengah 2019

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan Target 2019
Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2019	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5.17	5.07	5.00	4.95	101
		Indeks Gini	0.329	0.325	0.318	0.33	96
		Desa Mandiri (jumlah)	-	1	86	63	136
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.36	4.26	4.45	3.90	85.89
		Angka Kemiskinan	7.86	7.37	7.28	6.92	94.79

Berdasarkan tabel di atas, Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada Tahun mencapai 5.17% pada Tahun 2017, pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 16.44%, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 7.28%, lapangan usaha konstruksi sebesar 6.68%.



Pada Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5.07%. dari sisi produksi, pertumbuhan ini di dorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan di dorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi di capai lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh 9.66%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran LNPRT yang tumbuh sebesar 8.81%. Pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 28.24%. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 8.48%. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 16.16%. Pada Tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,00 %, dari sisi produksi, pertumbuhan di dorong oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,26%, sementara dari sisi pengeluaran didorong oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 10,12 %.

Pada September 2017, gini rasio Kalimantan Barat sebesar 0.329. angka ini menurun sebesar 0.002 poin dibandingkan dengan gini rasio Maret 2017 yang sebesar 0.327. gini rasio di daerah perkotaan sebesar 0.360, naik sebesar 0.004 poin dibandingkan bulan Maret 2017 sebesar 0.356. periode Maret -September 2017, distribusi pengeluaran dari kelompok-kelompok penduduk 40% terbawah mengindikasikan terjadi penurunan, yaitu sebesar 20.44% pada Maret 2017 turun menjadi 20.32% pada September 2017.

Pada Bulan september 2018, gini rasio Kalimantan Barat sebesar 0.325. angka ini menurun sebesar 0.014 di bandingkan dengan Maret 2017 yang sebesar 0.339 dan naik 0.012 di banding periode september 2017. Selama periode Maret- September 2018, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah mengindikasikan terjadi kenaikan, yaitu sebesar 20.33% pada Maret 2018 naik menjadi 20.46% pada September 2018. Di daerah perkotaan, distribusi pengeluaran kelompok 40% terbawah pada periode Maret – September 2018 menunjukkan kenaikan yaitu dari 18.01% pada Maret 2018 naik menjadi 18.84% pada september 2018. Hal ini berbeda terjadi di daerah perdesaaan, dimana distribusi pengeluarannya turun dari 23.00% pada Maret 2018 menjadi 22.63% pada September 2018. Pada Bulan September 2019, gini rasio Kalimantan Barat sebesar 0.318. gini rasio tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan Maret Tahun 2019 sebesar 0.327.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat pada bulan Agustus 2017 sebesar 4.36% atau naik 0.13% terhadap keadaan agustus 2016 sebesar 4.23%. TPT tertinggi dijumpai dikota pontianak dan kota singkawang masing- masing 9.36% dan 8.08% terhadap angkatan kerjanya. Sedangkan TPT terendah adalah kabupaten Sekadau sebesar 0.64. Pada Tahun 2018 angka TPT Kalbar pada bulan agustus sebesar 4.26% atau turun 0.10% terhadap keadaan agustus 2017 sebesar 4.36. TPT tertinggi dijumpai di kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing 10.37 % dan 7.88% terhadap angkatan kerjanya. TPT terendah adalah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 1.58. sedangkan untuk Tahun 2019 pada Bulan Agustus angka TPT sebesar 4.45% atau naik 0,19 poin apabila dibandingkan bulan Agustus 2018 sebesar 4,26%. TPT tertinggi dijumpai di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing- masing 9,13% dan 6,44% terhadap angkatan kerjanya.



Pada Bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kalimantan Barat mencapai 388.81 ribu orang (7,86%), bertambah sebesar 1.4 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 387.43 ribu orang (7,88%). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 4.88% naik menjadi 5.25% pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 9.28% turun menjadi 9.09% pada September 2017.

Pada Bulan September 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kalimantan Barat sebanyak 369.73 ribu orang (7.37), menurun sebesar 17.35 ribu orang di bandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 387.08 ribu orang (7.77%). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 50.3% turun menjadi 4.58% pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 9.16% turun menjadi 8.84% pada September 2018. Pada Bulan September 2019, jumlah penduduk miskin sebanyak 370,47 ribu jiwa, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dibandingkan bulan Maret 2019 sebesar 7,9 ribu orang. Persentase penduduk miskin perkotaan bulan September 2019 sebesar 4,61%. Sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan bulan September 2019 sebesar 8,73%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Produksi Perkebunan masih belum tercapai karena dipengaruhi tingginya penyusutan lahan perkebunan akibat adanya alih fungsi lahan maupun alih komoditas. Selain itu juga kurangnya perawatan kebun sehingga serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) semakin meningkat. Selain itu Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) masih rendah dari target banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi, selain itu rendahnya harga jual komoditi perkebunan di tingkat pekebun berpengaruh terhadap NTPR.
2. Pada sektor pertanian masih lemahnya kebijakan, budaya dan kelembagaan petani, penerapan teknologi usaha tani, pemanfaatan sumber daya lahan, infrastruktur pengairan dan alsintan serta penanganan pasca panen dan pengolahan hasil.
3. Pada Sektor perikanan masih terbatasnya sarana pengolahan di unit pengolah ikan (UPI) yang menggunakan teknologi terbaru dan memenuhi standard mutu. Ekspor hasil perikanan Kalbar masih rendah, Inovasi dan daya saing produk olahan hasil perikanan Kalbar masih cukup rendah, dan produk perikanan banyak yang belum terpantau distribusi dan pemasarannya.
4. Pencapaian target Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB Kalbar banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar membutuhkan dorongan seluruh pihak sehingga seluruh permasalahan yang ditemui dapat teratasi. Dibutuhkannya regulasi, pemahaman yang kuat, serta kejelian dalam membaca peluang pasar oleh seluruh



pemagku kepentingan dan pelaku usaha sehingga diharapkan kedepannya struktur ekspor Kalbar tidak hanya bergantung pada komoditi SDA saja.

5. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online ke DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota.
6. Belum optimalnya penyediaan faktor-faktor penunjang dalam merangsang dan mempercepat masuknya investasi yang dapat menimbulkan lemahnya minat untuk berinvestasi.
7. Lahan transmigrasi di Kalimantan Barat masih banyak mengalami permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usaha oleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, lahan transmigrasi masuk ke dalam wilayah hutan produksi dan masuk ke dalam kawasan gambut, sehingga menghambat penerbitan SHM.
8. Belum tersedianya RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) yang digunakan untuk menampung warga negara migran korban tindak kekerasan dan orang terlantar sebelum dikembalikan ke daerah asal. Dalam hal penanganan kebutuhan dasar disabilitas dan tuna sosial milik pemerintah belum tersedia, sebagai pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Penyediaan bantuan kepada fakir miskin yang diberikan masih menjadi kendala antara alokasi anggaran dengan jumlah fakir miskin yang ada.
9. Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) sesuai dengan PMK No. 230/PMK.07/2017 berisi kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan di jabarkan dalam bentuk petunjuk teknis dari Kementerian LHK. Sampai dengan Triwulan III Juknis tersebut belum terbit sehingga menghambat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. PMK 230 /PMK.07/2017 telah di cabur dan diganti dengan PMK No.131/PMK.07/2017.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Dukungan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan/kebun Rakyat, khusus bagi perkebunan besar wajib memiliki sistem pengendalian OPT dan kebakaran lahan/kebun.
2. Pada sektor pertanian, perlunya peningkatan teknologi usaha tani, alsintan, penguatan infrastruktur pengairan, pemanfaatan sumber daya lahan, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil.
3. Pada sektor perikanan perlunya Revitalisasi sarana dan prasarana pengolahan UPI yang berstandar mutu, membangun sistem rantai dingin (cool chain system) produk kelautan dan perikanan serta Pembinaan dan pengembangan standar mutu di pusat-pusat perikanan melalui pengembangan rantai dingin, Pengembangan sistem logistik ikan daerah untuk menghindari kelangkaan stok produk kelautan dan perikanan di saat paceklik.
4. Sektor perdagangan, melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Kalbar, pembinaan pelaku ekspor impor, pencarian akses pasar, serta peningkatan kualitas produk berorientasi ekspor. Selain



- itu melaksanakan konsultasi dengan Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Kalbar.
5. Sektor penanaman modal, Mendorong semua proyek-proyek investasi memiliki perizinan investasi melalui OSS dengan melakukan layanan konsultasi dan pendampingan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) kepada pelaku usaha, selain itu melakukan bimtek Tatacara Pengisian LKPM Online terhadap pelaku usaha di Kalimantan Barat, hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online ke DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota.
 6. Permasalahan lahan transmigrasi merupakan kewenangan kab/kota, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah bersama dengan ATR/BPN Provinsi untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi penerbitan SHM warga transmigrasi.
 7. Membentuk satgas penanganan pengangguran melalui program dan kegiatan serta data yang valid dari masing-masing stakeholder yang berwenang untuk menekan tingginya angka pengangguran.
 8. Sinkronisasi program dan kegiatan transmigrasi Pemerintah Pusat dan Daerah pada saat penyusunan anggaran.
 9. Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan telah memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi, sehingga membutuhkan dukungan program dan sarana prasarana SDM yang memadai dalam rangka pemenuhan SPM.
 10. Untuk mendukung mengurangi tingkat pengangguran salah satunya dengan mewujudkan tenaga kerja yang terampil hingga dapat bekerja pada sektor formal dan informal. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten memiliki 7 lembaga pelatihan yang didukung oleh 49 instruktur pelatihan kerja dan 3 instruktur produktivitas. Dalam hal penyerapan lulusan oleh unit pelaksana teknis latihan kerja industri Provinsi Kalimantan Barat menyediakan layanan kios "3 in 1" yaitu untuk mengakses lowongan pekerjaan secara online yang dapat dimanfaatkan oleh lulusan maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kegiatan –kegiatan yang dijalankan antara lain pembinaan dan pendampingan LPK se- Kalbar (pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan modul pelatihan mengacu pada standar kompetensi yang dikembangkan industri), penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (memperkirakan angkatan kerja yang belum terserap, potret situasi ketenagakerjaan dan dampak perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan berbagai karakteristiknya), penyusunan laporan informasi pasar kerja Provinsi Kalbar, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
 11. Terkait Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) Pemerintah Provinsi telah melaksanakan rakor dengan narasumber dari Kementerian Keuangan dan telah dijelaskan bahwa PMK Nomor 230/PMK.07/2017 merupakan juknis penggunaan DBHDR sehingga di harapkan capaian serapan kegiatan sumber dana DBHDR dapat lebih di gunakan secara maksimal.



Sasaran Strategis 5

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	100%

"Peningkatan kesejahteraan semua masyarakat di Kalimantan Barat merupakan cita-cita Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023. Terciptanya kesejahteraan di masyarakat, maka di harapkan dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kalimantan Barat sehingga tidak lagi terjadi konflik antar etnis". Selain itu saling hormat dan menghormati juga sangat penting, sehingga tercipta kedewasaan dalam hidup penuh keberagaman dan perlu terus di tumbuh kembangkan. Saat ini perlu di kedepankan berbicara tentang bagaimana Kalbar bisa maju, dan bisa unggul di bandingkan dengan daerah-daerah lain. Apalagi Provinsi Kalbar sangat kaya dengan sumber daya alamnya (SDA) dan strategis wilayahnya". "Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, kalau masyarakat sudah menganggap negara hadir, Insya Allah konflik sosial tidak akan terjadi dan teredam dengan sendirinya". Sambutan Gubernur Kalimantan Barat saat menerima kedatangan rombongan peserta Studi Strategi Dalam Negeri Program Pendidikan Singkat (SSDN-PPSA) XXII Lemhanas RI ke Provinsi Kalbar hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019.

Statement tersebut di atas selaras dengan kondisi di wilayah Kalbar yang tergambar dalam Tabel 3.12 dimana selama Tahun 2019 konflik sosial yang terjadi terealisasi Nol, dengan capaian 100%. Hal ini merupakan langkah positif bagi kehidupan bermasyarakat di wilayah Kalimantan Barat dan menjadi modal berharga dalam melanjutkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019 dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban telah ditetapkan dalam rencana aksi tim terpadu penanganan konflik tingkat provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 yang disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.



TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

LAMPIRAN PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015 TENTANG
PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Tabel 3. 36 RENCANA AKSI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2019 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENCEGAHAN							
1. KONFLIK SOSIAL							
a. PENANAMAN NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA							
Peningkatan Nilai-Nilai Bela Negara Dalam Rangka Revolusi Mental Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KODAM XII/TPR ▪ Bakesbang pol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanwil Kemenag; ▪ Disdikbud; ▪ Dissos; ▪ Dispora; ▪ POLDA; ▪ BINDA; ▪ Perwakilan Menhan Prov. Kalbar 	Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda/pelajar/ mahasiswa dalam upaya bela negara guna meredam terjadinya potensi konflik sosial.	TARGET : Terlaksananya pembinaan kesadaran bela negara bagi generasi muda/pelajar/ mahasiswa sebanyak 3 kali	TARGET B.04 : Terlaksananya Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bagi generasi muda/pelajar/ mahasiswa sebanyak 1 kali; TARGET B 08 : Terlaksananya Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bagi generasi muda/pelajar/ mahasiswa sebanyak 1 kali;		Kegiatan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sosialisasi, atau ➢ Dialog; atau ➢ Diklat, ➢ dll.



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B 12 : Terlaksananya Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bagi generasi muda/pelajar/ mahasiswa sebanyak 1 kali;		
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI)(RA: 02)	Bakesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dispora; ▪ Kanwil Kemenag; ▪ Disdikbud; ▪ KODAM XII/TPR; ▪ POLDA; ▪ Perwakilan Menhan Prov. Kalbar 	Terinternalisasinya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET : Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air bagi generasi muda/pelajar/ mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali	TARGET B 04 : Terlaksananya Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air bagi generasi muda/pelajar/ mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali; TARGET B 08 : Terlaksananya Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air bagi generasi muda/pelajar/ mahasiswa dalam		Kegiatan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sosialisasi, atau ➢ Dialog; atau ➢ Diklat, ➢ dll.



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali; TARGET B 12 : Terlaksananya Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air bagi generasi muda/pelajar/ mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali;		
Pelaksanaan Sosialisasi Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Revolusi Mental Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka	Bakesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dispora; ▪ Kanwil Kemenag; ▪ Disdikbud; ▪ KODAM XII/TPR; ▪ POLDA; ▪ Perwakilan Menhan Prov. Kalbar 	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi pelajar/mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET : Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi pelajar/ mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan	TARGET B 04 : Terlaksananya Kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi pelajar/mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali; TARGET B 08 : Terlaksananya Kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi pelajar/mahasiswa dalam		Kegiatan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi, atau ➤ Dialog; atau ➤ Diklat, ➤ dll.



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tunggal Ika, NKRI) (RA: 03)				kesatuan bangsa sebanyak 3 kali	mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali; TARGET B 12 : Terlaksananya Kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi pelajar/mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali;		
Kegiatan Penerangan Hukum Masyarakat dalam meredam potensi konflik (RA : 04)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kejaksaan Tinggi ▪ Kanwil Kemenkumham; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biro Hukum; ▪ Bakesbangpol; ▪ Kanwil BPN; ▪ KODAM XII/TPR; ▪ POLDA; ▪ BINDA; ▪ Dinas Pendidikan Prov Kalbar; 	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam meredam potensi konflik	TARGET : Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik sebanyak 3 kali	TARGET B 04 : Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik sebanyak 1 kali TARGET B 08 : Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik sebanyak 1 kali TARGET B 12 : Terlaksananya kegiatan		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik sebanyak 1 kali;		
Pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah (RA : 05)	<ul style="list-style-type: none"> Kejaksaan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Prov Kalbar; 	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum dikalangan pelajar	TARGET : Terlaksananya kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan, Pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah, Pelaksanaan Penguatan jaringan Masyarakat anti KKN sebanyak 3 kali	TARGET B 04 : Terlaksananya kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan, Pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah, Pelaksanaan Penguatan jaringan Masyarakat anti KKN sebanyak 1 kali TARGET B 08 : Terlaksananya kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan, Pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah, Pelaksanaan Penguatan jaringan Masyarakat anti KKN sebanyak 1 kali TARGET B 12 : Terlaksananya kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan, Pelaksanaan Jaksa Masuk		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekolah, Pelaksanaan Penguatan jaringan Masyarakat anti KKN sebanyak 1 kali		
Peningkatan Kesadaran Hukum di masyarakat (RA : 06)	POLDA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biro Hukum; ▪ Bakesbangpol; ▪ Kanwil Kemenkumham; ▪ Kanwil BPN; ▪ Kejati; ▪ KODAM XII/TPR; ▪ BINDA; 	<p>1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan hukum aparat pemerintah dan masyarakat</p> <p>3. Melaksanakan sambang/tatap muka kepada organisasi pemerintah maupun non pemerintah</p>	<p>TARGET :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program penyuluhan hukum kepada masyarakat di Polres/ta sebanyak 3 kali - Tergalangnya para toga, tomas dan todat untuk mendapatkan informasi yang berkembang. 	<p>TARGET B 04:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program penyuluhan hukum di jajaran Polres/ta dan masyarakat, serta terlaksananya kegiatan sambang/tatap muka kepada ornop/orpem baik toga, tomas dan todat sebanyak 1 kali <p>TARGET B 08:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program penyuluhan hukum di jajaran Polres/ta dan masyarakat, serta terlaksananya kegiatan sambang/tatap muka kepada ornop/orpem baik toga, tomas dan todat sebanyak 1 		<p>Bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Dialog - Tatap muka



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>kali</p> <p>TARGET B 12 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program penyuluhan hukum di jajaran Polres/ta dan masyarakat, serta terlaksananya kegiatan sambang/tatap muka kepada ornop/orpem baik toga, tomas dan todat sebanyak 1 kali 		
<p>Monitoring, pengawasan, evaluasi, dan pengamanan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019 (RA : 07)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kesbangpol Provinsi, • Polda 	<ul style="list-style-type: none"> • Binda, • Polda, • Korem/kodam, • Kejati, • Kanwil Hukum dan Ham, • Kanwil Agama, • Biro Hukum, • Biro Pemerintahan, 	<p>Terlaksananya Pileg dan Pilpres tahun 2019 dengan aman dan lancar</p>	<p>TARGET:</p> <p>Terlaksananya monitoring, pengawasan dan pengamanan sebelum, pada saat dan pasca Pileg dan Pilpres Tahun 2019 sebanyak 3 Kali</p>	<p>TARGET B04:</p> <p>Terlaksananya monitoring pengawasan dan pengamanan sebelum dan pada saat Pileg dan Pilpres tahun 2019 sebanyak 1 kali</p> <p>TARGET B08:</p> <p>Terlaksananya monev pengawasan dan pengamanan</p>		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> Biro Humas, Dinas Perhubungan Dinas Sosial, Satpol PP, Bawaslu KPU 			<p>pasca Pileg dan Pilpres tahun 2019 sebanyak 1 kali</p> <p>TARGET B12: Terlaksananya monev pengawasan dan pengamanan pasca Pileg dan Pilpres tahun 2019 sebanyak 1 kali</p>		
Mensinergikan system pencegahan dini (RA : 08)	<ul style="list-style-type: none"> POLDA Badan Kesbangpol Provinsi, 	<ul style="list-style-type: none"> Pemprov ; Kejati; KODAM XII/TPR; 	Terbangunnya system peringatan dini di masyarakat tentang konflik sosial	<p>TARGET : Terlaksananya Sosialisasi pedoman kerja tentang penyelenggaraan system pencegahan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan Kamdagri, terbentuknya posko terpadu,</p>	<p>TARGET B 04: - Terlaksananya Sosialisasi pedoman kerja tentang penyelenggaraan system pencegahan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan Kamdagri, terlaksananya monev pelaksanaan pedoman kerja sebanyak 1 kali</p> <p>TARGET B 08: - Terlaksananya Sosialisasi pedoman kerja tentang penyelenggaraan system</p>		-



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				terbangunnya sinergitas jaringan komunikasi, terlaksananya monev pelaksanaan pedoman kerja sebanyak 3 kali	<p>pencegahan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan Kamdagri, terlaksananya monev pelaksanaan pedoman kerja sebanyak 1 kali</p> <p>TARGET B 12 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Sosialisasi pedoman kerja tentang penyelenggaraan system pencegahan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan Kamdagri, terlaksananya monev pelaksanaan pedoman kerja sebanyak 1 kali 		
Sosialisasi Pembentukan Kader Perempuan Siaga Bencana dan Konflik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polda ▪ Kejaksaan Tinggi ▪ Dinas Sosial ▪ Biro Hukum; ▪ Bakesbangpol; ▪ Kanwil 	Membentuk Kader Perempuan yang selalu Siaga dalam menghadapi	<p>TARGET :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Kader Perempuan Siaga Bencana dan Konflik 	<p>TARGET B 04 :</p> <p>-.</p> <p>TARGET B 08 :</p> <p>Terlaksananya Workshop Pencegahan Konflik Tingkat</p>		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosial, dan Workshop Pencegahan konflik Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota (RA : 09)	Kalbar ▪ Kemenag	Kemenkumham; ▪ Kemenag ▪ Biro Hukum ▪ Organisasi Wanita dan Tokoh Agama ▪ LSM Peduli Perempuan dan Anak ▪ Satgas Perlindungan Perempuan	kemungkinan Bencana dan Konflik Sosial yang terjadi di dalam masyarakat.	Sosial sebanyak 1 kali. 2. Terlaksananya Workshop Pencegahan Konflik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 1 kali.	Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 1 kali TARGET B 12 : Terbentuknya Kader Perempuan Siaga Bencana dan Konflik Sosial sebanyak 1 kali.		
Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal (RA : 10)	DPMPTSP Prov. Kalbar	▪ Disnakertrans Prov. Kalbar ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Energi dan Sumber Daya mineral ▪ Dinas pangan, peternakan dan kesehatan hewan ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Kehutanan ▪ Dinas	▪ terselesaikannya penyelesaian permasalahan penanaman modal.	TARGET : Terlaksananya kegiatan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal sebanyak 2 kali	TARGET B. 04 : - TARGET B. 08 : Terlaksananya kegiatan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal sebanyak 1 kali TARGET B. 12 : Terlaksananya kegiatan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman		Kegiatan dapat berupa : ➢ Sosialisasi, atau ➢ Dialog; atau ➢ Diklat, dll



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perhubungan ▪ Instansi Penanaman modal dan PTSP Kab/Kota			Modal sebanyak 1 kali		
b. SARA							
Peningkatan Nilai-Nilai Toleransi Kehidupan Beragama (RA : 11)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanwil Kemenag ▪ Bakesbang pol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disdikbud; ▪ Biro Humpro; ▪ Biro Kessos; ▪ Dispora; ▪ Dissos; ▪ Kejati; ▪ KODAM XII/TPR; ▪ POLDA; ▪ BINDA; ▪ FKUB; 	Terinternalisasi nya toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET : Terlaksananya peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali	<p>TARGET B 04 : Terlaksananya Kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali;</p> <p>TARGET B 08 : Terlaksananya Kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali;</p> <p>TARGET B 12 : Terlaksananya Kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi</p>		Kegiatan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sosialisasi, atau ➢ Dialog; atau ➢ Diklat, ➢ dll.



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali;		
c. LAHAN TRANSMIGRASI							
Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi wilayah Kabupaten dan Kota di provinsi Kalimantan Barat (RA : 12)	Disnakertrans Prov. Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPN ▪ Dinas Kehutanan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Pertanian ▪ Biro Hukum; ▪ Biro Kesra ▪ BPKH Wilayah II 	Terwujudnya kepastian hukum pada wilayah lahan transmigrasi agar bebas dari kawasan hutan, tidak tumpang tindih dengan HGU, dengan batas wilayah maupun dengan kepemilikan adat/ulayat.	TARGET : Terlaksananya rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terprosesnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ▪ Tebitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 3 kali 	TARGET B 04 : Terlaksananya rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi sebanyak 1 kali TARGET B 08 : Terlaksananya rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi sebanyak 1 kali TARGET B 12 : Terlaksananya rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan		



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Lahan Transmigrasi sebanyak 1 kali		
Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3) Provinsi (RA : 13)	Dinas Perkebunan Prov. Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPN ▪ Dinas Kehutanan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Pertanian ▪ Biro Hukum; 	Tertanganinya Pembinaan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi Dalam Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Dalam Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebanyak 3 kasus.	TARGET : Terlaksananya Pembinaan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi Dalam Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebanyak 3 kasus.	TARGET B 04 : Terlaksananya Pembinaan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi Dalam Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebanyak 1 kasus TARGET B 08 : Terlaksananya Pembinaan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi Dalam Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebanyak 1 kasus TARGET B 12 : Terlaksananya Pembinaan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi Dalam Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan		



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					sebanyak 1 kasus		
B. PENGHENTIAN/PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL							
Terlaksananya perundingan damai dalam rangka penyelesaian konflik, pemulihan pasca konflik, pembinaan dan penyuluhan terhadap warga (RA. 14)	POLDA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda ▪ TNI/POLRI ▪ BPBD ▪ Kejati ▪ SAR ▪ Bakesbangpol ▪ Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - . Menciptakan situasi normal/ aman paca konflik. - . Masyarakat bisa kembali beraktifitas - . Siskamtibmas terkendali 	<p>TARGET:</p> <ul style="list-style-type: none"> - . Terlaksananya patroli dan binlul di lokasi konflik untuk ciptakan rasa aman di masyarakat sebanyak 3 x - . Terlaksananya perundingan damai penyelesaian konflik sebanyak 1 x 	<p>TARGET B04:</p> <ul style="list-style-type: none"> - . Terlaksananya Patroli dan Binlul di lokasi konflik untuk ciptakan rasa aman di masyarakat dan terlaksananya perundingan damai penyelesaian konflik sebanyak 1 x <p>TARGET B08:</p> <ul style="list-style-type: none"> - . Terlaksananya Patroli dan Binlul di lokasi konflik untuk ciptakan rasa aman di masyarakat dan terlaksananya perundingan damai penyelesaian konflik sebanyak 1 x <p>TARGET B12:</p> <ul style="list-style-type: none"> - . Terlaksananya Patroli dan Binlul di lokasi konflik untuk 		



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					ciptakan rasa aman di masyarakat dan terlaksananya perundingan damai penyelesaian konflik sebanyak 1 x		
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK							
Percepatan Proses penegakan hukum atas pelaku terkait konflik periode Tahun 2019 secara damai (apabila terjadi konflik) (RA. 15)	POLDA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kejari ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Kodam XII Tanjungpura 	-. Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial atau terorisme.	TARGET: Terselesaikannya penegakan hukum dan atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif sebanyak 3 kali.	<p>TARGET B04: Terlaksananya penegakan hukum dan atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif sebanyak 1 x</p> <p>TARGET B08: Terlaksananya penegakan hukum dan atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif sebanyak 1 x</p>		



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B12: Terlaksananya penegakan hukum dan atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif sebanyak 1x		
D. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2019							
Terlaksananya Rakor Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (RA : 16)	Bakesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Terpadu Tingkat Provinsi; ▪ Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota; 	Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kab./Kota	TARGET : Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 3 kali	TARGET B 04 : Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 kali; TARGET B 08 : Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 kali; TARGET B 12 :		



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 kali;		
E. PELAPORAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Pemetaan Konflik (<i>Conflict Mapping</i>) di Kalimantan Barat pada Tahun 2019 (RA. 17)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesbangpol • Polda 	<ul style="list-style-type: none"> • Binda • Kejati • Korem • Kanwil Kumham • Satpol PP 	Pemetaan Konflik (<i>Conflict Mapping</i>) yang meliputi Peta Potensi Konflik dan Peta Peristiwa Konflik pada Tahun 2019	TARGET: Pemetaan Konflik (<i>Conflict Mapping</i>) yang meliputi Peta Potensi Konflik dan Peta Peristiwa Konflik pada Tahun 2019 sebanyak 3 kali; <ul style="list-style-type: none"> - Rapat sebanyak 1 kali - Monev sebanyak 1 	TARGET B04: 1. Rapat Pemetaan Konflik (<i>Conflict Mapping</i>) yang meliputi Peta Potensi Konflik dan Peta Peristiwa Konflik sebanyak 1 kali 2. Penerbitan Dokumen Pemetaan Konflik (<i>Conflict Mapping</i>) yang meliputi Peta Potensi Konflik dan Peta Peristiwa Konflik sebanyak 1 kali TARGET B08: Monev Pemetaan Konflik		Kegiatan dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Rapat - Penerbitan Dokumen - Monev



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 04, B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kali - Penerbitan Dokumen sebanyak 1 kali	(<i>Conflict Mapping</i>) yang meliputi Peta Potensi Konflik dan Peta Peristiwa Konflik sebanyak 1 kali TARGET B12: Monev Pemetaan Konflik (<i>Conflict Mapping</i>) yang meliputi Peta Potensi Konflik dan Peta Peristiwa Konflik sebanyak 1 kali		



• Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.37 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	624.753.500,00	561.868.800,00	89,93	100	
		2.Program Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.378.235.046,00	1.292.601.290,00	93,79		
		3.Program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pol PP	97.621.400,00	95.175.400,00	97,49		
		4.Program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibum /Linmas	385.037.450,00	358.392.700,00	93,08		
		5.Program Pencegahan dan Kearsipan Terhadap Bencana	1.099.857.807,00	1.053.538.554,00	95,79		
		6.Program Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan	1.088.742.826,00	895.763.842,00	82,28		
		7.Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	161.966.300,00	138.404.650,00	85,45		
					91,11	100	8,88

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,11% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 8,88.

• Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini salah satunya adalah melalui program yang dijalankan bersama dengan kementerian / lembaga lain, maupun yang di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan telah memiliki 13 Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di tingkat Provinsi yang program tersebut merupakan hasil pemetaan dari berbagai instansi vertikal maupun Perangkat Daerah yang ada.



2. Sosialisasi Program Deradikalisasi dan Counter Radikalisme, ini merupakan program nasional dalam rangka pencegahan paham radikal yang akan masuk dan berkembang di bumi Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
3. Workshop Pencegahan Konflik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, ini juga RKP Nasional yang nantinya mengundang pengurus FKUB dan beberapa tokoh agama. Program ini dilaksanakan melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
4. Penyegaran lewat Jalan Sehat Kerukunan, yang menghadirkan pengurus FKUB dan tokoh agama yang ada, dirangkai moment Ulang Tahun Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Program ini dilaksanakan melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
5. Program yang mendukung pada sasaran strategis ini adalah program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
6. Pemeliharaan Kamtrabtimas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
7. Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain ; Pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten/ Kota, Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana, Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Bantingsor dan Konflik Sosial, Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.
8. Program Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan, meliputi ; Simulasi peralatan penanggulangan bencana sebagai bentuk pelatihan penggunaan peralatan kebencanaan kepada anggota pokmas / relawan, Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan didaerah yang terkena bencana, Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana.
9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar. Pendataan terhadap korban bencana sangatlah penting sebagai bahan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan bencana berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sub urusan perumahan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. Hal ini juga termasuk dalam urusan pelayanan dasar yang masuk di dalam standar pelayanan minimal. Sedangkan dalam sub urusan bencana, kewenangan provinsi adalah penanggulangan bencana provinsi dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.



b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2019 dan Target Akhir Jangka Menengah 2023

**Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan Target 2023
Sasaran Strategis 5**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	0	0	100

Pada Tahun 2017- 2018 sasaran strategis meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator konflik sosial tidak terdapat di dokumen RPJMD periode 2013-2018, baru pada Dokumen perencanaan RPJMD 2018-2023 sasaran strategis ini dan indikator kinerja konflik sosial di jadikan alat ukur untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis ini. Akan tetapi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak ada konflik sosial yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 berdasarkan RPJMD 2018-2023 konflik sosial yang di diharapkan tetap pada angka Nol (tidak ada konflik).

• **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Penanganan terjadinya konflik sosial sebatas penanganan unjuk rasa atau kerusuhan yang ditangani di wilayah Pontianak dan sekitarnya;
2. Keterbatasan personel sumber daya manusia aparatur untuk penanganan konflik sosial.
3. Keterbatasan sarana prasarana berupa alat penanganan konflik.
4. Belum tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Rencana Kontijensi dan Reiew Rencana Kontijensi.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengoptimalkan peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Kalimantan Barat
2. Perlunya sosialisasi / dialog / forum kerukunan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, antar etnis maupun golongan baik melalui media cetak, elektronik serta pertemuan langsung antar umat beragama atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan nilai nasionalisme dan persatuan.
3. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait sinkronisasi program dan kegiatan prioritas penanganan konflik sosial.
4. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Rencana Kontijensi dan Reiew Rencana Kontijensi.



5. Peningkatan peran pokmas / relawan untuk penanganan konflik sosial maupun bencana.
6. Pemanfaatan sumber daya yang ada dengan optimal serta memperhitungkan penganggaran pengalokasian kedepannya pembaharuan peralatan pelindung diri personel terhadap konflik sosial yang terjadi;
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia relawan, pokmas anggota yang berwenang dalam urusan penanganan konflik sosial, melalui kerjasama dengan instansi vertikal baik TNI/ Polri dan instansi vertikal lainnya.
8. Masih perlunya peningkatan kompetensi sumber daya yang ada terhadap personel teknis terhadap penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial sebagai aparatur penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
9. *Updating* data sebaran daerah yang memiliki potensi bencana dan solusi alternatif penanganan bencana, mengingat Provinsi Kalimantan Barat memiliki daerah yang sangat luas.



Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,2	n/a	n/a

Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) yang dikembangkan sejak Tahun 2009, merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 target IKLH sebesar 66.2. Pada Tahun 2019 IKLH Provinsi Kalbar belum di rilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan diperkirakan pada bulan April 2020 akan dirilis, sehingga realisasi dan capaian kinerja belum dapat ditampilkan dalam tabel 3.39 diatas.

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.40 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		1. Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan	1,189,240,000,00	444,122,348,00	37.35		
		2. Program Perencanaan dan Tata Lingkungan	144,115,000,00	77,504,400,00	53.78		
		3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	482,313,500,00	457,442,400,00	94.84		
		4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia dan Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kemitraan antar Lembaga Lingkungan Hidup	246,691,000,00	228,625,800,00	92.68		
		5. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	424,225,000,00	195,793,730,00	46.15		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	213,534,000,00	160,303,960,00	75.07		
		7. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	247,495,000,00	187,046,300,00	75.58		
		8. Program Pengendalian Polusi	88,475,000,00	28,877,000,00	32.64		
		9. Program Pengendalian Perubahan Iklim	163,360,000,00	134,658,889,00	82.43		
		10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan ekosistem	27.584.678.060	17.219.109.606	62,42		
		11. Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	6.535.608.900	1.353.564.653	20,71		
					61.24	n/a	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 61.24% dengan realisasi capaian kinerja yang belum dapat di hitung, dikarenakan masih menunggu rilis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian LHK, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat ditampilkan.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program - program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019 dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta ekosistem yaitu:

1. Penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) dengan Kegiatan :
 - a. Pengamanan pencegahan kerusakan hutan, Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam / Hutan Tanaman IUPHHK-HA/HT Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengamanan Hutan, Patroli Pengamanan Hutan, Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengamanan Hutan.
 - b. Pencegahan kerusakan hutan yang disebabkan oleh Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT, Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Unit KPH, Peningkatan Kapasitas SDM Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT, Pengolahan Data dan Informasi HOTSPOT, Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan TUL, Kampanye Pencegahan KARHUTLA, Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan Unit Manajemen, Penerapan Agroforestry di Wilayah Unit KPH dan Sekitarnya.



2. Luas pengelolaan kawasan ekosistem esensial (Ha)
Pengelolaan kawasan ekosistem esensial didukung oleh kegiatan Identifikasi Potensi Pemanfaatan Jasling pada HL dan Kawasan Konservasi Lainnya, Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di Wilayah KPH, Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Potensi Jasa Lingkungan.
3. Luas Peningkatan areal Konservasi Ekosistem Lahan Basah (Ha)
Peningkatan areal konservasi ekosistem lahan basah didukung oleh kegiatan Pembuatan Peta Indikatif Sebara Kawasan Ekosistem Lahan Basah, Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah, Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah, Prakondisi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah.
Indikator Luas Peningkatan areal Konservasi Ekosistem Lahan Basah belum mencapai target disebabkan beberapa kegiatan yang terkait perencanaan pengelolaan ekosistem lahan basah tidak dapat terlaksana secara berkelanjutan karena tugas dan fungsinya pada Tahun 2019 dilakukan penyesuaian.
4. Peningkatan Jumlah Koleksi Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh.
Peningkatan Koleksi Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) didukung oleh kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan TAHURA, Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Kawasan TAHURA, Optimalisasi Fungsi Kawasan Daerah Penyangga TAHURA, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi SDA TAHURA. Indikator Peningkatan Jumlah Koleksi Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh belum mencapai target disebabkan beberapa kegiatan yang mendukung indikator tersebut tidak terlaksana secara berkelanjutan karena tugas dan fungsinya dilakukan penyesuaian.

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan selama Tahun 2019 diukur dengan Indikator yaitu :

1. Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)
Penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan didukung dengan kegiatan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, Rehabilitasi Lahan pada Hutan Hak / Hutan Rakyat (DBHDR), Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan, Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan, Fasilitas Pembangunan Hutan Kota, Pembangunan Hutan Rakyat, Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat, Pembangunan Areal Model DAS Mikro di Kalbar, Penanaman Bibit Rotan Jemang, Penanaman Jenis Tanaman HHBK, Rehabilitasi Kawasan TAHURA, Penanaman pada Areal Mangrove.
Target capaian Indikator Luas Penurunan Lahan Kritis tahun ini belum tercapai disebabkan kegiatannya bersifat penanaman dan tidak dapat terlaksana, karena belum adanya dokumen perencanaan RHL.



2. Jumlah Produksi Bibit Tanaman Hutan dan Multi Purpose Trees Spesies /MPTS (batang)

Didukung dengan kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Lokasi Pengembangan TUL Kalbar, Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan, Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan, Fasilitasi Sertifikasi Benih Tanaman Hutan.

Target capaian Produksi Bibit Tanaman hutan dan Multi Purpose Trees Spesies /MPTS belum tercapai disebabkan kegiatan Pengelolaan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan tidak dapat dilaksanakan karena pada tahun 2019 tugas dan fungsinya dilakukan penyesuaian.

Selain itu terdapat juga berbagai program yang mendukung pencapaian IKLH Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019 antara lain :

1. Program penataan dan penegakan hukum lingkungan dengan aksi koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengaduan lingkungan hidup, diantaranya pencemaran udara, kebakaran, pencemaran air limbah dan kebisingan udara di beberapa perusahaan di kabupaten. Selain itu pemantauan / pengawasan Rencana pengelolaan lingkungan bagi perusahaan yang tidak taat terhadap dokumen lingkungan.
2. Program kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan generasi lingkungan dan kemitraan antar lembaga lingkungan hidup, dengan aksi pendidikan lingkungan hidup (green school and clean school) dan adiwiyata terhadap 14 sekolah adiwiyata provinsi dan 4 sekolah calon adiwiyata nasional.
3. Program peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3, dengan aksi pemantauan dan pembinaan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Landak. Pembinaan pengelolaan sampah perkotaan melalui sistem 3R (reduce, reuse dan recycle) mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. Telah disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah.
4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dengan aksi melakukan inventarisasi kerusakan lahan akses terbuka di empat kabupaten/kota yaitu Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Ketapang dan Kota Singkawang.
5. Program pengendalian perubahan iklim, dengan aksi pemaparan tentang evaluasi inventarisasi Gas Rumah Kaca tahun 2018 dan rencana pengumpulan data status, kecenderungan perubahan emis secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya termasuk simpanan karbon Tahun 2019. Program Kampung iklim yang diluncurkan sebagai program nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas, dilaksanakan pada 11 Kampung iklim di 7 Kabupaten dan 1 Kota.



b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2017-2019 dan Target Akhir Jangka Menengah 2019

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan Target RPJMD Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.17	73.09	n/a	66.8	n/a

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebesar 73,09. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 74,17 atau menurun sebesar 1,08. Penurunan ini di pengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Sebagai informasi bahwa untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Kalbar Tahun 2019 belum di rilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga perbandingan realisasi yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini yaitu IKLH Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Tabel 3.42 Perubahan IKLH Kalimantan Barat Tahun 2017 dan 2018

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2017	80,00	89,12	58,58	74,17
2018	69,38	88,68	64,19	73,09
Perubahan	-10,62	-0,44	5,61	-1,08

Nilai IKA Kalimantan Barat turun sebesar 10,62 dibandingkan tahun 2017, yaitu dari 80,00 menjadi 69,38. Nilai IKU Kalimantan Barat turun sebesar 0,44 dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari 89,12 menjadi 88,68. Nilai IKTL Kalimantan Barat juga naik sebesar 5,61 dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari 58,58 menjadi 64,19 (lihat tabel 3.42).

IKLH Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 berfluktuatif seperti pada tabel berikut ini :

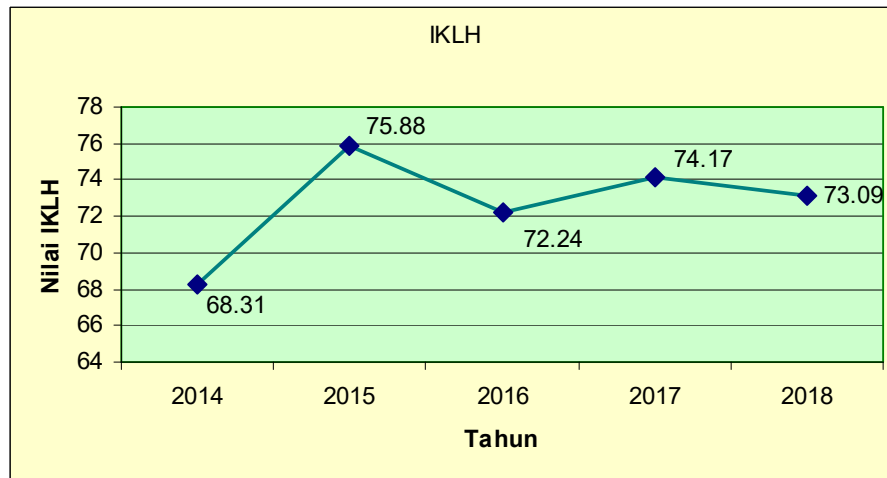
Tabel 3. 43 IKLH Kalimantan Barat dari 2014 – 2018

Tahun	IKLH
2014	68.31
2015	75.88
2016	72.24
2017	74.17
2018	73.09

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2014 nilai IKLH adalah 68,31, pada tahun 2015 meningkat menjadi 75,88 dan pada tahun menurun menjadi 72,24, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 74,17 lalu ditahun 2018 turun menjadi 73,09. Jadi belum

ada tren yang stabil yaitu meningkat, tetap atau menurun. Tapi walaupun tren belum stabil perubahan nilai tidak terlalu jauh. Yaitu pada tahun 2014 angka IKLH 68,31 dan masih dalam kategori sedang maka pada 4 tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018 angka IKLH mengalami peningkatan dan berkisar pada angka 72 sampai 75 dan angka tersebut berada pada kategori atau predikat cukup baik. Untuk jelasnya tren IKLH Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 sampai dengan 2018 atau selama 5 tahun terakhir seperti pada grafik berikut ini :

Grafik 3.10 IKLH Kalimantan Barat 2014-2018



Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini bukan semata-mata peringkat, juga merupakan indikasi upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di tingkat kabupaten dan provinsi maupun nasional.

Unit analisis terkecil dalam IKLH Provinsi adalah Kabupaten. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin rendah dari nilai 100, semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Bila IKLH kabupaten berada di bawah provinsi (atau lebih kecil), berarti kabupaten bersangkutan harus berupaya mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya.

Secara keseluruhan ada tiga indikator yang menentukan nilai IKLH, yaitu IKU, IKA dan IKTL. Bila kita telisik lebih jauh, kualitas air adalah penyumbang utama turunnya kualitas lingkungan hidup Kalimantan Barat. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kalimantan Barat tahun 2018 adalah sebesar 68,38. Nilai ini turun 10,62 jika dibandingkan dengan IKA Kalimantan Barat tahun 2018. Turunnya IKA yang begitu signifikan menyebabkan turunnya nilai IKLH.

Penurunan IKLH Kalimantan Barat perlu diwaspadai karena ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kalimantan Barat masih bersifat eksploitatif yang memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan, dan relatif lebih buruk dibanding rata-rata pembangunan secara nasional.



1. INDEKS KUALITAS AIR (IKA)

Air sungai juga merupakan sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu sungai juga dijadikan sebagai tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kualitas air adalah Indeks Kualitas Air (IKA). Perhitungan indeks untuk kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (Pollution Index – PI) serta parameter-parameter yang digunakan sebagai penentuan Indeks Kualitas Air. Parameter-parameter tersebut adalah yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform.

Berdasarkan data parameter tersebut dapat ditentukan Indeks Pencemar Air (IPA). Hasil IPA selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rentang angka sebagai berikut :

- 0 - 1 : Memenuhi baku mutu atau kondisi baik
- 1 - 5 : Tercemar ringan
- 5 – 10 : Tercemar sedang
- > 10 : Tercemar berat

Transformasi nilai IPA ke dalam bentuk IKA dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sample yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sample dalam persen. Sedangkan bobot nilai indeks diberikan batasan sebagai berikut :

- 70 untuk memenuhi baku mutu
- 50 untuk tercemar ringan
- 30 untuk tercemar sedang
- 10 untuk tercemar berat

Tahun 2019 dilakukan pemantauan kualitas air pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di sungai sambas, sungai mempawah dan sungai pawan. Pemantauan kualitas air dilakukan untuk mengetahui status mutu air. Target status mutu air pada Tahun 2019 sebesar 50,4 dan terealisasi sebesar 48,66.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 69,38. Nilai ini turun 10,62 jika dibandingkan dengan IKA Kalimantan Barat tahun 2017 yaitu 80,0. Hal ini menunjukkan bahwa air sungai di Kalimantan Barat semakin tercemar. Nilai IKA Kalimantan Barat juga masih berada dibawah nilai IKA nasional yaitu 72,77. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat baik pada tataran kebijakan maupun praktis.

Pada Tahun 2018 pengukuran kualitas air di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan dana APBD dilakukan sebanyak 33 titik sampel, yaitu tahap pertama 24 titik masing-masing di Sungai kapuas 21 titik sampel dan Sungai Sambas 3 titik sampel. Di Sungai Kapuas dilakukan di tujuh kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan masing-masing kabupaten 3 titik sampel. Sedang



pada tahap kedua dilakukan pada 9 titik sampel yaitu Sungai Kapuas enam titik sampel yaitu di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu masing-masing 3 titik sampel dan Sungai Sambas 3 titik sampel kabupaten/kota. Sedangkan untuk dana APBN dilakukan di enam titik di Sungai Kapuas yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak masing satu titik dan dilakukan pengambilan sampel masing-masing tiga tahap. Sedangkan di Sungai Jelai Kabupaten Ketapang dilakukan pengambilan sampel pada enam titik dengan pengambilan sampelnya dilakukan dalam dua tahap.

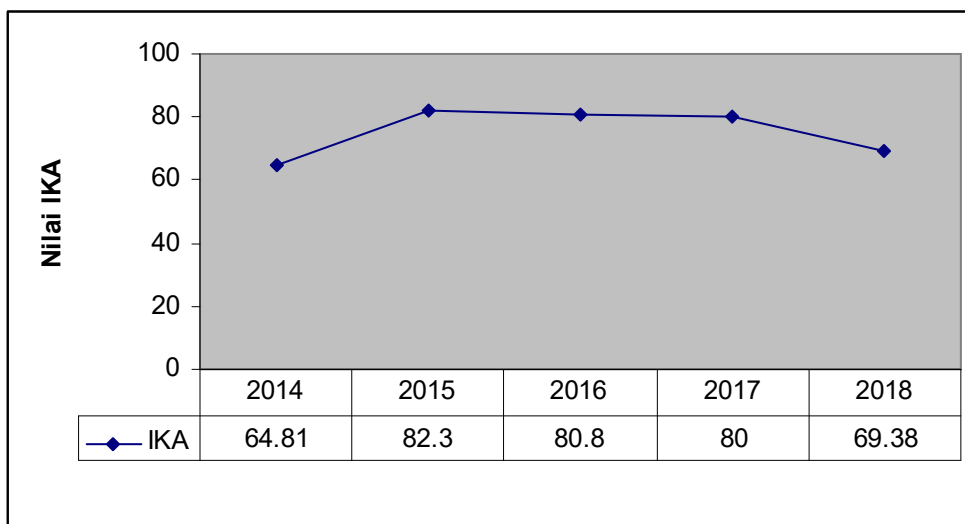
Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 nilai IKA Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuatif sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.44 IKA Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018

TAHUN	INDEKS KUALITAS AIR
2014	64,81
2015	82,30
2016	80,80
2017	80,00
2018	69,38

Pada tahun 2014 nilai IKA Provinsi Kalimantan Barat adalah 64,81 dan ini adalah nilai terendah selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 nilai IKA meningkat menjadi 82,30 dan ini merupakan nilai IKA tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 80,80 dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan walaupun hanya sedikit menjadi 80,00. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yang drastis menjadi 69,38. Tren IKA Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.11 Grafik IKA Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018





2. INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Salah satu instrumen untuk mengetahui seberapa baik kualitas udara di suatu daerah adalah dengan menggunakan instrumen Indeks Kualitas Udara (IKU). Untuk menghitung IKU diperlukan data kualitas udara. Instansi pengelola lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Barat telah melakukan pemantauan kualitas udara dengan menggunakan metode pasive sampler. Pemantauan dilakukan pada lokasi yang mewakili pemukiman, transportasi (road-side), industri dan perkantoran/komersil. Data hasil pemantauan tersebut digunakan dalam perhitungan IKU Provinsi Kalimantan Barat

Pada pemantauan kualitas udara tersebut parameter yang diukur adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya (SO₂ dan NO₂). Rumus perhitungan dan pengelolaan data adalah sebagai berikut :

Menghitung rata-rata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO₂ dan NO₂. Membandingkan angka rerata SO₂ dan NO₂ dengan referensi EU, dalam bentuk indeks sementara (Ieu) sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.45 dibawah ini.

Tabel 3.45 Baku Mutu Perhitungan IKU

PARAMETER	BAKU MUTU
NO ₂	40 (µg/Nm ³)
SO ₂	20 (µg/Nm ³)

IKU Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 88,68, bila dibandingkan dengan IKU tahun 2017 yaitu 89,12 berarti mengalami penurunan sebesar 0.43. Adanya penurunan ini harus diwaspadai walaupun masih dalam kategori sangat baik dan menjadi serius apabila di tahun-tahun berikutnya akan terus mengalami penurunan.

Secara keseluruhan IKU Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun ini masih berfluktuatif, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

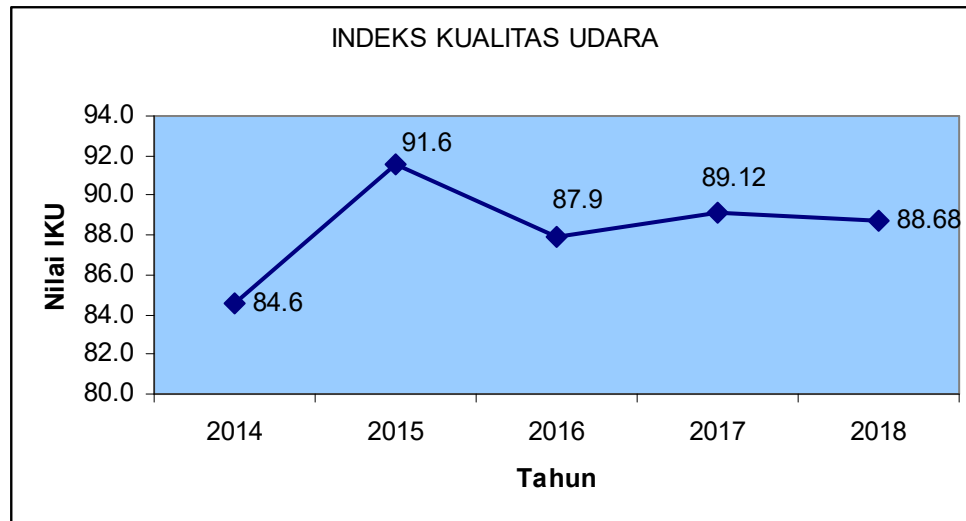
Tabel 3. 46 IKU Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018

TAHUN	INDEKS KUALITAS UDARA
2014	84.6
2015	91.6
2016	87.9
2017	89.12
2018	88.68

Pada tahun 2014 nilai IKU sebesar 84,67, pada tahun naik menjadi 91,9 dan merupakan angka IKU tertinggi selama 5 tahun terakhir ini. Namun pada tahun 2016 kembali turun menjadi 87,9 dan naik kembali pada tahun 2017 menjadi 89,12. Pada tahun 2018 ini nilai IKU Provinsi Kalimantan Barat adalah 88,68 menurun 0,44 dari tahun 2017. Namun nilai IKU tersebut masih di atas IKU Nasional yang berada pada angka 84,74.

Grafik IKU Provinsi Kalimantan Barat tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Grafik 3. 12 Grafik IKU Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018



Berdasarkan grafik diatas tren IKU Provinsi Kalimantan Barat selama periode lima tahun yaitu tahun 2014 ke 2018 terjadi peningkatan yaitu dari 84,6 menjadi 88,68 walau kalau dilihat pertahunnya berfluktuatif.

Data pengukuran sampel pencemaran udara Kalimantan Barat tahun 2018 dilakukan oleh instansi pengelola lingkungan hidup di Kalimantan Barat. Sampel diambil di 56 titik di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan masing kabupaten/kota sebanyak 4 titik yaitu ditempatkan pada daerah yang mewakili industri, pemukiman, perkantoran dan transportasi.

3. INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 belum rilis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara data yang disajikan masih menggunakan Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKTL) Kalimantan Barat Tahun 2018 sebesar 64,19. Nilai tersebut meningkat 5,61 dibanding tahun 2017 yaitu 58,58. IKTL Kalimantan Barat tahun 2018 masih berada diatas IKTL Nasional yaitu 61,03. Tahun 2016 nilai IKTL 58,87.

Selama dari tahun 2014 sampai 2017 nilai IKTL di Kalimantan Barat cenderung stabil walaupun terdapat perubahan tetapi tidak terlalu besar. Sedang pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang relatif besar. Hal ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperbaiki kualitas tutupan lahan. Nilai IKTL untuk periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

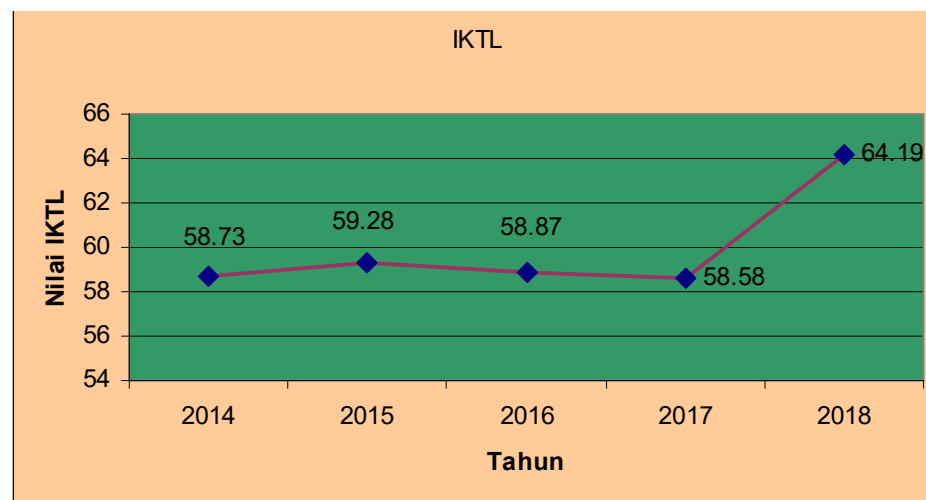


Tabel 3.47 IKTL Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

TAHUN	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN
2014	58,73
2015	59,28
2016	58,87
2017	58,58
2018	64,19

Dari tabel terlihat bahwa nilai IKTL Kalimantan Barat dari tahun 2014 sampai 2017 berada dikisaran angka 58, hanya tahun 2015 berada di angka 59,28 dan berada pada range kategori kurang. Namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,19. Nilai tersebut berada pada kategori cukup baik. Berarti dan perubahan status dari kategori kurang menjadi cukup baik.

Grafik 3.13 Grafik IKTL Kalimantan Barat 2014-2018



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang tidak mencapai target Pernyataan Kinerja :

1. Kebakaran Hutan dan Lahan setiap tahun yang masih tinggi menimbulkan kerusakan hutan dan lahan serta pencemaran udara.
2. Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Barat yang luas sampai tahun 2018 mencapai 1.015.631 ha dari luas wilayah Kalimantan Barat.



3. Menurunnya kualitas air sungai dengan semakin tumbuhnya usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan terutama limbah cair ke sumber air.
4. Belum terkelolanya limbah B3 dari rumah sakit secara baik
5. Belum optimalnya kelengkapan data terkait pelaksanaan perhitungan gas rumah kaca (GRK).
6. Belum terdatanya luas lahan akses terbuka bekas tambang
7. Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengelolaan sampah.
8. Khusus kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sesuai dengan PMK No. 230/PMK.07/2017 merupakan dana *earmark* yakni kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dijabarkan dalam bentuk petunjuk teknis dari Kementerian LHK. Namun sampai dengan TW III Juknis tersebut belum ditetapkan sehingga terdapat keraguan untuk melaksanakan kegiatan penanaman pada areal mangrove pada Program RHL dan Pengelolaan DAS. PMK No. 230/PMK.07/2017 telah dicabut dan diganti dengan PMK no. 131/PMK.07/2019.
9. Kegiatan yang terkait dengan Brigade Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan (DALKARHUTLA dan PAMHUT) baru dapat dilaksanakan pada Triwulan III. Hal ini disebabkan proses rekrutmen tenaga Brigade Dalkarhutla dan Pamhut Provinsi Kalimantan Barat memerlukan tahapan yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat salah satu kegiatan yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada masyarakat, melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan.
2. Guna mengatasi lahan kritis, salah satunya dengan konservasi lahan. Konservasi lahan tersebut melalui usaha pencegahan kerusakan lahan, memperbaiki kerusakan, serta mempertahankan kesuburan tanah. Untuk itu perlu program kegiatan prioritas yang mampu meminimalisir kerusakan yang terjadi, dapat berupa APBN maupun APBD, dan sinkronisasi data serta program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi lahan kritis.
3. Penyiapan Peraturan Daerah yang mengatur kelas mutu air sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
4. Perlunya peningkatan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair, sehingga tidak membahayakan.
5. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam pengelolaan dan penanganan sampah.
6. Perlunya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas udara pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.



7. Pemerintah Pusat atau Kementerian Keuangan agar segera menetapkan Petunjuk Teknis untuk penggunaan DBH-DR sehingga capaian serapan anggaran yang bersumber dari DBH-DR dapat lebih maksimal.
8. Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus menata pembentukan Brigade Dalkarhutla dan Pamhut untuk segera di realisasikan dengan pola rekrutmen.

KINERJA LAINNYA

Sebagai apresiasi atas prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerima beberapa penghargaan baik tingkat nasional dan internasional dari Pemerintah maupun dari Organisasi/LSM tingkat Nasional, yaitu :

1. Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak sebagai TERBAIK II dalam kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker DK/TP Semester I Tahun Anggaran 2019 yang diterima di Pontianak pada tanggal 2 Agustus 2019.
2. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik" Tahun 2019 yang diterima di Jakarta pada tanggal 22 November 2019.
3. Terbaik IV atas Capaian Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019 (APBN) dari Kementerian Sosial RI.
4. Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan 3 (tiga) penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas komitmen dalam kaitan pemenuhan hak-hak anak di Kalimantan Barat. Adapun Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak adalah :
 - a. Kota Pontianak dengan Kategori Pratama;
 - b. Kabupaten Kubu Raya dengan Kategori Pratama; dan
 - c. Kabupaten Sanggau dengan Kategori Pratama.
5. Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan Penghargaan Provinsi paling Informatif Tahun 2019. Seluruh Indonesia hanya 8 Provinsi yang informatif diantaranya DKI Jakarta , Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, K.H Ma'ruf Amin kepada Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta pada tanggal 21 November 2019.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat didapuk meraih peringkat 7 Badan Publik berpredikat Informatif Tahun 2019. Predikat informatif adalah penilaian tertinggi yang diberikan kepada Badan Publik dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Syarif Muhammad Herry pada tanggal 5 Desember 2019.
7. Gubernur Kalbar H. Sutarmidji raih Penghargaan sebagai Top Pembina Bumd 2019 di ajang Top BUMD 2019 pada tanggal 28 April 2019 bertempat di Hotel Sultan Jakarta.



8. Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan dianugerahi Tanda Penghargaan Anugraha Bhakti Pratama dalam Musyawarah Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) ke XIV di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis 14 Maret 2019. Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan Gapensi Tingkat Nasional ini diberikan kepada para tokoh yang terbukti dengan nyata dan mengesankan telah berbuat jasa/bantuannya terhadap pembinaan dan pengembangan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Gapensi dalam bentuk moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung.
9. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih penghargaan Adhi Purna Prima pada ajang Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Gubernur Awards berlangsung di Hotel Sangrilla Surabaya, Jawa Timur, Senin 28 Januari 2019. Bidang pendidikan dengan program "Sekolah Gratis 12 Tahun" dari Provinsi Kalbar keluar sebagai pemenang. Tanda penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

B. REALISASI ANGGARAN

Nilai efisiensi anggaran Tahun 2017, Tahun 2018 serta Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 3.48 Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

TAHUN	NILAI EFISIENSI (Pagu Belanja Langsung - Realisasi Belanja Langsung)	TOTAL APBD NON GAJI (Pagu Belanja Langsung)	PERSENTASE (Nilai Efisiensi/ Pagu Belanja Langsung x 100%)
	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4
2017	479.341.253.745	2.635.407.775.713	18,19
2018	240.008.039.435	2.214.254.825.989	10,84
2019	393.423.322.759,16	2.831.262.145.878,51	13,89

Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan anggaran belanja langsung sesuai sasaran strategis dalam APBD Tahun 2019 sebesar **Rp. 2.831.262.145.878,51** dengan realisasi sebesar **Rp 2.437.838.823.119,35**. Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Pemprov kalbar pada umumnya meningkat, dan jika dilihat dari realisasi anggaran strategis, maka terdapat **efisiensi anggaran sebesar Rp. 393.423.322.759,16**.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan data dari masing-masing Peringkat Daerah dengan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2018-2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan Kinerja yang disampaikan menggambarkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program. Selain itu Laporan Kinerja juga menjadi ukuran penilaian kualitas kinerja pelayanan guna mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 sebagian besar dapat terpenuhi dan terealisasi. Namun demikian terdapat juga beberapa program dan kegiatan yang masih menunggu penilaian dari Kementerian. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan melalui dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019. Beberapa capaian keberhasilan indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2019 dikemukakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan dengan indikator indeks infrastruktur yang ditargetkan sebesar 59.93 dapat direalisasikan sebesar 62.31.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang terdiri dari dua indikator yaitu pertama indeks reformasi birokrasi, dengan target Predikat B, dan realisasinya Predikat B. Indikator kedua yaitu nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat, dengan target Predikat B dan dapat direalisasikan predikat B.
3. Meningkatnya Kualitas SDM dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target sebesar 67.2 dan dapat di realisasikan sebesar 67.65.
4. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran di capai dengan menggunakan beberapa indikator yaitu :



- a. Pertumbuhan ekonomi memiliki target sebesar 5,2 dan dapat terealisasi sebesar 4,95
 - b. Indeks Gini memiliki target sebesar 0,33 dan dapat direalisasikan sebesar 0,318.
 - c. Desa Mandiri memiliki target sebesar 63 Desa dan dapat direalisasikan sebesar 86 Desa.
 - d. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki target sebesar 3,90 dan dapat direalisasikan sebesar 4,45.
 - e. Angka Kemiskinan memiliki target sebesar 6.92 dan terealisasi sebesar 7,28.
5. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan Indikator Konflik Sosial, yang memiliki target 0 (nol) dan direalisasikan 0 (nol) jumlah konflik.
 6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang memiliki target sebesar 66,2 dan hasilnya saat ini masih belum di rilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penilaian Tahun 2019.

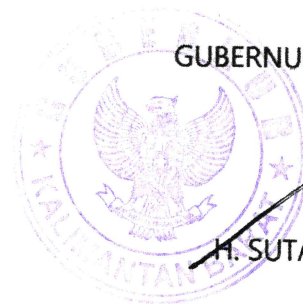
Berdasarkan capaian kinerja sasaran sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat mengalami kemajuan dan akan ditingkatkan secara optimal. Namun disisi lain masih terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam target perencanaan kinerja, tetapi belum tercapai secara optimal. Hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperbaiki kinerjanya.

Guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar dalam memperbaiki kebijakan dan program dalam memacu pembanguna. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja ini akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj.
2. Melakukan penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja perangkat daerah sehingga menjadi lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023.
3. Konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan dalam rangka membuka daerah-daerah terisolir, perbatasan dan daerah tertinggal serta mendukung peningkatan produktivitas di berbagai sektor pembangunan termasuk upaya peningkatan ekspor-impor dan investasi di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Melanjutkan program-program pembangunan melalui kegiatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan desa mandiri di Provinsi Kalbar, mengentaskan kemiskinan, ketimpangan dan menekan laju pengangguran.



5. Saling menjaga kerukunan antar umat beragama, etnis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat guna mewujudkan situasi yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Secara terus-menerus melakukan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan, dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, manajemen pemerintahan, sistem AKIP dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH.,M.Hum

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	59,93	62,31	103.97
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	100
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67,2	67.65	100.66
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5,2	4,95	96.15
		Indeks Gini	0,33	0.318	96.36
		Desa Mandiri (jumlah)	63	86	136.50
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90	4,45	85.89
		Angka Kemiskinan	6,92	7.28	94.79
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	100
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,2	n/a	n/a

Jumlah Total Anggaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 2.831.262.145.878,51
 Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 2.437.838.823.119,35



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, SH.,M.Hum